

Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag

# Manajemen PENGELOLAAN ZAKAT



**Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag**

# **MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau  
Seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis  
dari penerbit

*All Rights Reserved*

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT**

Penulis :

**Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag**

Editor :

**Muslimin Kara**

Layout:

**Mutmainnah**

Cetakan : I 2020

vi + 246 halaman, 15,5 x 23 cm

**ISBN : 978-623-226-167-9**

Penerbit:



**Pusaka AlMaida**

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18  
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

# KATA PENGANTAR

Bismillahir-Rahmani-Rahim

Alhamdulillah Rabillalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan buku yang sederhana ini bisa diselesaikan. Salawat dan salam juga penulis kirimkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga keteladanannya dalam mengembangkan dakwahnya, termasuk dalam hal ini masalah perekonomian dapat teraktualisasi di kalangan umat Islam dewasa ini.

Buku yang sederhana ini kami susun dalam rangka mereaktualisasikan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Konsep Zakat, Infaq dan Sadaqah telah mampu mengatasi kemelaratan dan kemiskinan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusiawi, memperkecil jurang perbedaan sosial, baik yang terjadi pada zaman Rasulullah saw maupun pada masa sahabat-sahabat beliau pada masa awal Islam.

Hal ini terjadi, karena pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan professional. Seandainya aturan-aturan hukum zakat ini dirumuskan kembali, baik dari segi penggalian sumbernya, pendayagunaanya dan organisasi pengelolannya diurus berdasarkan pengelolaan secara umum dan didasarkan pada pola pemahaman yang lebih maju dengan memberikan perhatian pada perkembangan masa kini dan tetap berdasarkan pada sumber-sumber ajaran Islam, maka pranata zakat akan tetap ampuh dan tangguh.

Selain itu dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan

kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan yang baik dalam hal ini tentunya harus ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan yang baik kepada muzakkiy, mustahiq dan pengelola zakat (amil)

Sebagai penulis, tentunya akan terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan tersebut.

Demikian dan hanya kepada Allahlah kita berserah diri dan Dialah Yang Maha Benar.

Wassalam

Penulis



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I KEDUDUKAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH</b>	
<b>DALAM ISLAM .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Zakat, Infaq dan Sadaqah .....	1
B. Kewajiban Zakat.....	6
C. Syarat-syarat Wajib Zakat .....	11
D. Prinsip-prinsip Zakat .....	16
E. Tujuan dan Hikmah Zakat .....	17
<b>BAB II JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI .....</b>	<b>27</b>
A. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati .....	27
B. Jenis-jenis Harta yang Wajib di Zakati .....	31
1. Hasil Pertanian.....	31
2. Hewan Ternak .....	37
3. Zakat Emas dan Perak .....	44
4. Zakat Barang Dagangan .....	49
5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang ..	56
6. Zakat Investasi.....	60
7. Zakat Profesi.....	64
<b>BAB III KELOMPOK PENERIMA ZAKAT .....</b>	<b>75</b>
A. Al-Fuqara (Orang-orang Fakir) .....	76
B. Miskin .....	76
C. Al-Amilin.....	77
D. Al-Muallaf Qulubuhum .....	77
E. Ar-Riqab .....	77
F. Al-Gharimin.....	78
G. Sabilillah.....	78
H. Ibnu Sabil.....	79

<b>BAB IV SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT .....</b>	<b>81</b>
A. Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat .....	81
B. Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	95
<b>BAB V MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SADAQAH .....</b>	<b>103</b>
A. Definisi Manajemen.....	103
B. Manajemen Zis .....	104
C. Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat ...	126
<b>BAB VI REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI NEGARA YANG MEWAJIBKAN ZAKAT .....</b>	<b>137</b>
A. Sudan .....	137
B. Pakistan .....	143
C. Saudi Arabia .....	152
D. Yordania .....	156
<b>BAB VII REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI NEGARA YANG TIDAK MEWAJIBKAN ZAKAT .....</b>	<b>163</b>
A. Bangladesh .....	163
B. Kuwait .....	164
C. Mesir.....	168
D. Malaysia .....	171
E. Indonesia .....	184
<b>BAB VIII TATA CARA MENGHITUNG ZAKAT MAL DAN CONTOH-CONTOHNYA .....</b>	<b>201</b>
A. Langkah –langkah Menghitung Zakat .....	201
B. Menghitung Zakat Harta Moneter .....	202
C. Menghitung Zakat Perhiasan .....	203
D. Menghitung Zakat Investasi Harta .....	204
E. Menghitung Zakat Perdagangan .....	206
F. Menghitung Zakat Industri .....	208
G. Menghitung Zakat Properti .....	209
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>213</b>
<b>Riwayat Penulis.....</b>	<b>217</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>219</b>

# BAB I

## KEDUDUKAN ZAKAT, INFAQ DAN SADAQAH DALAM ISLAM

### A. Pengertian Zakat, Infaq dan Sadaqah

#### 1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti suci, baik,berkah, tumbuh dan berkembang.<sup>1</sup> Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Alquran dan Hadis.

Menurut Wahidi dan lain-lain seperti disebutkan oleh Yusuf Qardhawi, bahwa zakat adalah kata dasar *zaka* yang berarti bertambah dan tumbuh, sehingga dikatakan tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih.<sup>2</sup>

Adapun menurut istilah atau syara adalah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan pada golongan tertentu.<sup>3</sup> Adapun definisi zakat yang telah dirumuskan oleh para fuqaha adalah:

- a. Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, menyatakan zakat adalah nama sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan juga

---

<sup>1</sup> Al--Mujam al-Wasit (Juz 1; Turki, Istambul, t.th), h. 398

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Cet II: Beirut, Libanon : Muassasah al- Risalah, 1993). Diterjemahkan oleh Tim (Salman Harun, Didin Hafiuddin, Hasanuddin) dengan judul “ *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdsarkan Quran dan Hadis*, (Juz I, Cet 3; Bogor, PT : Pustaka Lentera Anter Nusa, 1996), h. 34

<sup>3</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997), h. 24



untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.<sup>4</sup>

- b. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami Adillatuh*, mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:
1. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya, jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
  2. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh Syar'i untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
  3. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
  4. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>5</sup>

Adapun menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, definisi zakat adalah mengeluarkan sebagian harta guna digunakan kepada mereka yang telah diterangkan syara menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Alquran, Hadis, dan Undang-undang fiqih.<sup>6</sup>

Menurut Zamakhsyari dalam bukunya *Al-Faiq* seperti dikutip oleh Qardhawi, zakat adalah “ sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping itu berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih

---

<sup>4</sup> Mahmud Syaltut, *Al-fatawa*, (Kairo: Darul Qalam, 1996), h. 14

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyah Addillatuh*, (Jilid III, t.th), h. 1788-1789

<sup>6</sup> Hasbi Ash-Shhidiq, *Op. Cit*, h. 28

berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan, demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.

Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwa dan kekayaannya.<sup>8</sup>

Zakat juga adalah cambuk yang ampuh, yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Zakat terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Zakat mal, yaitu zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu.
- b. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan. Kadang zakat fitrah disebut dengan zakat badan atau sedekah fitrah.

## **2. Infaq**

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum.<sup>9</sup> Dalam terminologi syariah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang pendapatannya besar maupun kecil, baik disaat lapang maupun sempit, dan tidak ditentukan mustahiqnya, sebagaimana yang ada pada zakat. Q.S. Al-Imran, ayat 134:

---

<sup>7</sup> Al-Nawawi, *al Majmu*, (Jilid 5, Idharah al-Tibaah al-Munirah, t. th), h. 324

<sup>8</sup> Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, *Majmu al-Fatawa*, (jilid 5, Dar Al-fikr, 1983), h.8

<sup>9</sup> Al-Mujam al-Wasith, Juz II, h. 942.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

وَاللَّهُ تَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

dan Q.S. Al- Baqarah ayat 215, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Terjemahnya:

“mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

### 3. Sedekah

Sedekah, menurut bahasa berasal dari kata *shadaqa* atau *sidqun* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan keimanannya. Dalam beberapa ungkapan Alquran, zakat wajib di sebut juga sebagai sedekah, sehingga Maudhi sebagaimana dikutip Qardhawi mengatakan “Sedekah itu adalah zakat dan zakat ayat 103 adalah sedekah, berbeda nama tetapi arti sama, sebagaimana dalam Q.S al-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Pada dasarnya pengertian sedekah sama dengan infaq, namun ada perbedaannya yaitu, kalau infaq dikhususkan pada sifatnya yang materi saja, sedangkan sedekah mencakup materi (harta) dan non materi, seperti senyum, mengambil duri di jalan adalah masuk kategori sadaqah.

Zakat juga dinamakan sedekah, karena tindakan itu akan menunjukkan pada kebenaran (siddiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada allah SWT.

Kadang zakat disebut juga dengan sedekah. Semua zakat adalah sedekah, akan tetapi, tidak semua sedekah adalah zakat. Zakat adalah sedekah wajib.

Menurut ulama sedekah pada dasarnya dibagi atas 2 bagian yaitu :

1. Sedekah yang sifatnya wajib terbatas, dalam hal ini terbatas jenis, jumlah, kadar harta benda yang harus dikeluarkan, dalam hal ini ia adalah zakat.
2. Sedekah yang sifatnya wajib tidak terbatas, yaitu sedekah yang dituntut untuk kepentingan umum, yaitu suatu kewajiban bersedekah sesudah kewajiban zakat, karena situasi/kondisi masyarakat, menuntutnya untuk kepentingan umum sangat mendesak, seperti ada bencana banjir, gunung meletus, peperangan untuk mempertahankan agama atau negara.

## B. Kewajiban Zakat

Zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim melalui harta benda dengan syarat-syarat tertentu dan zakat merupakan ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat fardhu sebagaimana yang dijelaskan di dalam Alquran, Hadis dan Ijma.

Zakat bukanlah syariat baru yang hanya terdapat pada syariat nabi Muhammad saw, akan tetapi zakat merupakan bahagian dari syariat yang dibawa oleh para Rasul terdahulu sebagai rangkaian dari ibadah fardhu lainnya. Hal tersebut dialami pada masa nabi Ibrahim, nabi Ismail, Nabi Isa dan pada masa Rasulullah zakat itu disempurnakan dari segi pemasukan dan penyaluran serta beberapa bagian yang harus dikeluarkan.<sup>10</sup>

Ada yang menjadi perbedaan pelaksanaan zakat pada masa nabi-nabi sebelum nabi Muhammad saw dan pada masa nabi Muhammad saw, yaitu pada masa nabi-nabi sebelum Muhammad saw, zakat sifatnya hanya menjadi sunnah, sedangkan pada masa nabi Muhammad saw zakat itu menjadi suatu kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam syar'i.

Penentuan permulaan wajib zakat di dalam Islam, ada dua pendapat yang berbeda dari ulama. Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat itu diwajibkan pada tahun ke-2 sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Muhammad Ridha dan Abdul Wahab Khallaf dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sebelum hijrah ke Madinah, para ulama sepakat bahwa tidak pernah ada suatu yang harus dilakukan oleh para hartawan muslim dan tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah seperti kewajiban shalat.
2. Adapun infaq yang dilakukan oleh dermawan muslim kepada orang-orang muslim yang membutuhkannya sejak

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jilid I, Beirut; Dar al-fikr, 1977), h. 276

permulaan da'wah Islam tidak ada keterangan, bahwa infak adalah zakat wajib, melainkan atas kerelaan hati kaum muslimin, sehingga waktu dan jumlahnya terserah kepada mereka.

Adapun pendapat kedua menyatakan, bahwa zakat itu diwajibkan bersamaan dengan perintah kewajiban shalat, ketika nabi Nabi Muhammad saw berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ulama yang berpendapat demikian adalah Sayyid Sabiq dan Hasbi Ash-Shiddiq dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat perintah zakat pada umumnya adalah beriringan dengan perintah shalat, baik ayat-ayat yang menerangkan zakat itu pada syariat Rasul-rasul sebelum Islam, maupun dalam syariat Islam semuanya mengandung perintah langsung.
2. Di antara sekian banyak ayat-ayat perintah zakat yang beriringan dengan ayat perintah shalat, terdapat ayat Makkiyah. Ini satu dalil, bahwa zakat diwajibkan di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat dalam surah al-Mukmin ayat 4 yang terjemahnya”Dan orang-orang yang menunaikan zakat”

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan, bahwa jmhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud zakat di sini adalah zakat harta, padahal ayat ini turun di Makkah. Sedangkan zakat diwajibkan di Madinah hanyalah penegasan jenis harta yang wajib dizakati, nishab dan kadar zakatnya. Jadi jelaslah bahwa zakat itu secara mutlak diwajibkan di Madinah.<sup>11</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas mengenai sejarah diwajibkannya zakat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari kedua pendapat ulama tersebut, yaitu :

---

<sup>11</sup> Imam Imanuddin Abu Fida Ismail Ibnu katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, t. th, h. 239

- a. Zakat diwajibkan di Makkah bersamaan dengan shalat fardhu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, hanya waktu itu belum ada penegasan secara terinci tentang harta yang wajib dizakati dan belum ada ketentuan kadar zakat yang ditentukan.
- b. Adapun pendapat yang mengatakan zakat diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah, maka yang dimaksudkan itu bukan secara mutlak, akan tetapi barulah pada tahun itu syarat penetapan harta-harta yang wajib dizakati dan kadar zakatnya masing-masing secara terinci. Orang-orang yang menerima zakat waktu itu hanya terbatas pada dua golongan saja yaitu fakir dan miskin, hal tersebut berjalan sampai tahun ke-9 Hijriyah.

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan, di mana dalam hal ini zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam atau sebagai salah satu rukun Islam. Perintah untuk mendirikan shalat dalam kitab suci Alquran tidak pernah terpisahkan, melainkan selalu diikuti dengan zakat dengan tekanan yang sama.

Berdasarkan dengan pengakuan keimanan seseorang yang menyatakan dirinya beriman, haruslah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang menunjukkan arti penting keimanan seseorang kepada Allah, orang yang menyatakan keimanannya hanya dalam kata saja, tetapi tidak pernah membayar zakat, tidak dapat dikategorikan sebagai muslim sejati, dikarenakan tidak adanya perbuatan yang membuktikan keimanannya.

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya fikhi zakat, menyatakan bahwa pada hakikatnya zakat adalah bagian dari peraturan Islam tentang kehartaabendaan dan kemasyarakatan. Zakat juga merupakan ibadah yang saling beriringan dengan ibadah shalat.<sup>12</sup> Hal tersebut dapat dibuktikan pada beberapa dalil Alquran yang memerintahkan didirikannya shalat dan tunaikanlah zakat yang

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Jilid II, Beirut: Darul Irsyad, t.th, h.7

dirinci dalam Alquran sebanyak 82 kali disebutkan, adapun ayat yang berhubungan dengan perintah tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku.”

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka para ulama menyepakati bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yaitu tata atau cara bagaimana manusia mengabdikan kepada Allah, artinya penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal.

Berkaitan dengan masalah ibadah, tentunya dalam hal ini zakat merupakan konsekuensi akidah, yaitu cara bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah, bahwa zakat yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan tidak akan berarti zakat yang sebenarnya, jika tidak didasarkan pada kepercayaan kepada Allah swt.

Jadi intinya di sini, bahwa seseorang yang membayar zakat itu didasarkan pada kesadaran religius. Tindakan seseorang yang berzakat, bukanlah juga karena motif ekonomi, karena zakat secara harfiah berarti suci atau bersih. Jadi dengan berzakat pada dasarnya ia telah membersihkan hartanya dan tentunya ia akan menjadi lebih dekat kepada Allah swt.

Mengenai kedudukan zakat dalam Islam, BAZIS juga mempertegas dengan menyatakan bahwa zakat itu mengandung dua aspek, yaitu aspek kebaktian terhadap Allah dan kebaktian terhadap sesama manusia/masyarakat. Adapun kebaktian kepada Allah adalah, bahwa menunaikan zakat bukan memberikan upeti material kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintahnya. Adapun kebaktian kepada masyarakat mengandung segi sosial dan ekonomi.



Adapun segi sosial dalam hal ini adalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum. Sedangkan dalam segi ekonomi adalah bahwasanya harta-harta itu berputar di antara masyarakat, dan bahwa zakat itu adalah daya dorong untuk perputaran harta benda dalam masyarakat dan menjadi salah satu sumber dana Baitul Mal.<sup>13</sup>

Al-Kasani juga menjelaskan bahwa zakat menurut golongan Hanafiyah adalah nama bagi perbuatan, yaitu mengeluarkan harta kepada Allah. Jadi menurutnya, zakat itu adalah hak Allah bukan hak orang fakir. Orang fakir mendapatkan hak milik zakat dari Allah. Dengan orang yang mempunyai harta mengeluarkan zakat, maka berarti terjadi proses pengoperan hak milik dari orang yang punya harta benda kepada Allah, pada hakikatnya bukan kepada fakir. Inilah yang dimaksudkan zakat itu adalah ibadah, karena ibadah ialah mengikhlaskan amal perbuatan secara hakikat keseluruhannya kepada Allah.<sup>14</sup>

Apabila zakat ditinjau dari segi objek zakat dalam hubungannya dengan sipenerimaannya, maka zakat itu termasuk dalam *bidang maliyyah ijtimaiyyah* atau kehartabendaan dan kemasyarakatan. Dan apabila zakat ditinjau secara keseluruhannya, maka zakat itu bukan ibadah mahdhah, karena di dalamnya mengandung unsur amal sosial kemasyarakatan, selain unsur ibadah, oleh karenanya masalah-masalah yang terkandung dalam bab mengenai zakat memerlukan peran ijtihad didalamnya. Dengan demikian zakat itu bisa berkembang seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat sebagaimana manfaat-manfaat pendayagunaannya yang diharapkan oleh persyariaan dan pelembagaan zakat itu sendiri.

---

<sup>13</sup> Syehul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h.34.

<sup>14</sup> Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al Hanafi, *Badaai'us Sanai Fii Tarbitis Syarai*, Mesir: al-Imam, t.th, h.612

### **C. Syarat-syarat Wajib Zakat**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumhur ulama adalah :

#### **1. Merdeka**

Dalam hal ini, menurut kesepakatan ulama bahwa zakat itu tidak wajib atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Madzhab Maliki berpendapat, bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya itu pada dasarnya tidak sempurna, sedangkan zakat itu pada hakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh. Selain itu, tuan hamba sahaya tidak berhak memiliki harta hamba sahayanya.<sup>15</sup>

#### **2. Islam**

Menurut Ijma, zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Madzhab Syafi'i berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya, yang mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum riddahnya terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang muslim. Riddah menurut madzhab ini, tidak menggugurkan kewajiban zakat, sebab orang yang murtad sama dengan kafir. Adapun harta yang dimiliki sewaktu riddah berlangsung, menurut pendapat Syafi'i yang paling shahih, hukumnya adalah bergantung pada harta itu sendiri. Jika orang yang murtad tadi kembali ke dalam agama Islam, sedangkan hartanya (yang di dapatkan sewaktu riddahnya masih ada )zakat wajib atasnya, akan tetapi jika harta tersebut tidak ada, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, h. 98

### **3. Baligh dan Berakal**

Kedua hal tersebut (baligh dan berakal) dianggap sebagai syarat oleh madzhab Hanafi. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk di dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah.

Adapun menurut jumhur ulama, bahwa kedua syarat tersebut bukan merupakan syarat. Oleh karena itu zakat juga wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, di mana ia dikeluarkan oleh walinya. Lagi pula zakat dikeluarkan sebagai pahala untuk orang yang mengeluarkannya dan bukti solidaritas terhadap orang fakir dan miskin. Anak kecil dan orang gila termasuk juga orang yang berhak mendapatkan pahala dan membuktikan rasa solidaritas mereka. Atas dasar ini, mereka wajib memberikn nafkah kepada kerabat-kerabat mereka.

Pendapat ini, menurut penulis lebih baik, sebab di dalamnya terkandung upaya untuk merealisasikan kemaslahatan orang-orang fakir, memenuhi kebutuhan mereka, menyucikan jiwa, serta melatih sikap untuk suka menolong dan dermawan.

### **4. Harta Yang Dikeluarkan Adalah Harta Yang Wajib Dizakati**

Adapun jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati menurut Ibnu Rusyd adalah:

- a. Dari barang tambang. Dalam hal ini ada dua macam, yaitu emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan.
- b. Dari binatang yang sengaja ditenakkan, dalam hal ini ada tiga macam ternak, yaitu; unta, lembu, dan kambing.
- c. Dari biji-bijian, yaitu gandum dan syar'i.
- d. Dari buah-buahan, ada dua macam yaitu korma dan anggur kering (kismis).

Harta benda yang selain disebutkan di atas, diperselisihkan apakah wajib dizakati atau tidak, harta yang diperselisihkan zakatnya antara lain adalah; buah-buahan dan biji-bijian yang

selain disebutkan di atas, madu, perusahaan dan pendapatannya, surat-surat berharga, pertambangan kekayaan laut, peternakan ikan dan harta karun.

Menurut jumhur ulama, bahwa harta yang dizakati itu disyaratkan produktif, yakni berkembang, sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas. Yang dimaksud berkembang di sini adalah bukan berarti berkembang yang sebenarnya. Akan tetapi, maksud berkembang di sini adalah bahwa harta tersebut disiapkan untuk dikembangkan, baik melalui perdagangan, maupun ditenakkan kalau dia hewan ternak.

Syarat harta yang wajib dizakati adalah:

a. Harta Yang Dizakati Telah Mencapai Nisab

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut yang mewajibkannya. Dalam hal ini kita bisa mengambil contoh bahwa nishab emas adalah 20 mitsqal, kalau menurut ukuran sekarang kira-kira sekitar 100 gram, karena 1 mitsqal adalah 5 gram. Kemudian Nishab perak adalah 200 dirham yang seharga dengan 20 mitsqal. Adapun nishab kambing adalah 40 ekor, nishab sapi adalah 30 ekor, dan nishab unta adalah 5 ekor.<sup>16</sup>

b. Harta Yang Dizakati adalah Milik Penuh

Para fuqaha dalam hal ini berbeda pendapat mengenai tentang apa yang dimaksud dengan milik penuh atas harta milik. Apakah yang dimaksud dengannya ialah harta milik yang sudah berada di tangan sendiri, atautkah harta milik yang hak pengeluarannya berada di tangan seseorang, atautkah harta yang dimiliki secara asli. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang yang dimiliki secara asli, penuh dan ada hak untuk mengeluarkannya. Dengan demikian seorang tuan tidak wajib

---

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, Zakat Dalam Perspektif Sosial, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995, h. 42

mengeluarkan zakat dari harta hamba sahayanya yang akan menebus dirinya, karena dia belum memiliki harta itu. Begitu juga halnya dengan harta waqaf, tidak wajib dizakati, karena menurut pendapat yang paling shahih, harta wakaf adalah milik Allah SWT.

- c. Kepemilikan harta telah sampai setahun, menurut hitungan Qamariyah.

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa masa haul menjadi syarat dalam zakat uang, perdagangan, dan binatang ternak. Masa setahun yang sempurna yang berturut-turut juga menjadi syarat dalam zakat. Dengan demikian, jika harta yang telah mencapai nishab berkurang pada masa perjalanan setahun, kendatipun sebentar, maka tidak wajib zakat baginya.

Atas dasar ini, apabila harta yang telah dimiliki itu berkurang pada masa setahun, baik dengan proses tukar-menukar, atau yang lainnya seperti jual-beli dan hibah, maka masa haulnya dimulai lagi, karena pemilikan terhadap harta tersebut mengalami perubahan. Dan untuk menghitung haulnya tersebut, harta tadi tidak boleh digabung dengan harta yang telah dimiliki sebelumnya.

- d. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, seperti zakat dan pajak bumi, maupun utang untuk manusia, kendatipun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena kapan pun pemberi utang yang mendapat jaminan berhak mengambil hartanya dari pengutang (pemberi jaminan) atau merupakan utang yang ditanggguhkan atau utang tersebut berupa mahar yang ditanggguhkan dari seorang istri yang akan diceraikan atau bahkan utang tersebut merupakan nafkah yang mesti diputuskan oleh kadi atau perasaan saling merelakan.

Adapun utang yang tidak berkaitan dengan hak para hamba, seperti utang nazar, kafarat dan haji tidak mencegah kewajiban zakat. Begitu juga, utang tidak mencegah kewajiban sepersepuluh (untuk tanaman dan buah-buahan), kewajiban, pajak, kafarat.

Maksudnya ialah bahwa utang tidak mencegah kewajiban kafarat harta. Demikian menurut pendapat yang paling shahih.

Menurut madzhab Hanbali, bahwa utang mencegah kewajiban zakat untuk harta-harta yang tak terlihat (emas, perak, uang, dan barang-barang dagangan). Pendapat ini berdasarkan pernyataan Utsman bin Affan berikut : “Bulan ini adalah bulan dikeluarkannya zakat kalian. Dengan demikian barang siapa memiliki utang lunasilah sebelum kalian mengeluarkan zakat kalian. Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sebagai berikut: “Barang siapa memiliki utang, hendaknya dia melunasi utangnya dan meninggalkan sisa hartanya”. Pernyataan ini dikemukakan oleh Utsman bin Affan di depan para sahabat dan tidak di sangkal oleh mereka. Oleh karena itu, pernyataan Utsman bin Affan itu menunjukkan bahwa para sahabat menyepakati hal tersebut.

e. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok. Ibnu malik menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin dan pelunasan utang. Orang yang memiliki utang perlu melunasi utangnya dengan harta yang dimilikinya yang telah sampai nishab.

Apabila seseorang mempunyai beberapa dirham yang berhak dikeluarkan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok di atas, dirham-dirham tadi dipandang tidak ada. Sama halnya, air yang harus diberikan kepada seseorang yang haus, dipandang tidak ada. Oleh karena itu, orang yang memberikan air tadi boleh bertayamum.

Adapun syarat sah pelaksanaan zakat ada dua, yaitu :

1. Niat

Pelaksanaan zakat termasuk salah satu amalan. Ia merupakan ibadah seperti halnya shalat. Oleh karena itu ia

memerlukan adanya niat untuk membedakan antara ibadah yang fardhu dan sunnat.

Menurut madzhab Syafi'i niat itu wajib dilakukan di dalam hati. Ia tidak diisyaratkan untuk diucapkan dengan lisan. Niat juga sudah dipandang shahih, ketika ia dilakukan setelah harta itu dilepaskan atautkah mendahulukan niat sebelum harta diserahkan juga dipandang shahih.

2. Adanya tamlik (memindahkan harta kepada pemiliknya)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat. Tamlik tersebut adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq. Dengan demikian seseorang tidak boleh memberikan zakat kepada mustahiq kecuali dengan jalan tamlik.<sup>17</sup>

#### **D. Prinsip-Prinsip Zakat**

Menurut M. A. Mannan dalam bukunya “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, menyatakan bahwa zakat itu mempunyai beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip keyakinan keagamaan
2. Prinsip pemerataan dan keadilan.
3. Prinsip produktifitas dan kematangan
4. Prinsip nalar
5. Prinsip kebebasan
6. Prinsip etik dan kewajaran.<sup>18</sup>

Prinsip (pertama) keyakinan keagamaan, menyatakan bahwa orang yang membayar zakat merasa yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan keagamaannya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, maka ia belum merasa sempurna keimanannya.

---

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, Op.Cit, h.247

<sup>18</sup> M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997, h. 257

Prinsip (kedua) yakni pemerataan dan keadilan, hal tersebut cukup jelas menggambarkan bahwasanya tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Allah kepada umatnya.

Prinsip (ketiga) yakni produktifitas dan kematangan, hal tersebut menekankan bahwa zakat telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi) tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil hasil tertentu.

Prinsip (keempat) nalar dan (kelima) kebebasan, hal tersebut menjelaskan bahwa zakat hanya dapat dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa tanggung jawab untuk membayar zakat guna kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang sakit jiwa dan sedang dihukum.

Prinsip (keenam) etik dan kewajaran, menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, jika akibat dari pemungutan tersebut membuat orang yang membayarnya akan menderita.

## **E. Tujuan dan Hikmah Zakat**

### **1. Tujuan Zakat**

Adapun yang dimaksud tujuan zakat, dalam hal ini adalah sasaran praktisnya. Yusuf al-Qardhawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu dari pihak para wajib zakat (muzakkiy), pihak penerima zakat (mustahiq) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).

Tujuan zakat bagi pihak wajib zakat ( muzakkiy) dalam hal ini adalah untuk mensucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, selain itu juga melatih jiwa untuk bersikap terpuji, seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati bathin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri. Selain itu juga menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu dari unsur noda dan cacat,



dan melatih diri agar menjadi pemurah serta menumbuhkan kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.

Adapun tujuan zakat bagi penerima zakat (mustahiq) adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka apabila melihat orang kaya yang bakhil. Selain itu akan muncul dalam hati mereka rasa simpatik, hormat serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain adalah bahwa zakat itu bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Lebih luas lagi Wahbah menguraikan tujuan zakat bagi kepentingan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat menunjang solidaritas sosial di kalangan masyarakat muslim.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana alam dan lain sebagainya.
- d. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekacauan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana khusus untuk menanggulangi biaya hidup bagi para gelandangan, para pengangguran dan para tuna sosial lainnya, termasuk dana untuk membantu

orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.<sup>19</sup>

Dari beberapa uraian mengenai zakat tersebut di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan zakat itu pada dasarnya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seimbang, sehingga si kaya tidak tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Di samping itu zakat juga bertujuan untuk mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir dan bakhil, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi mereka yang mempunyai harta, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban zakat dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya, dan juga mengangkat derajat fakir miskin serta membantunya untuk keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan yang dialami.

## **2. Hikmah Zakat**

Dalam ajaran Islam tiap-tiap perintah untuk melakukan ibadah mengandung hikmah dan rahasia yang sangat berguna bagi pelaku ibadah tersebut, termasuk ibadah zakat. Adapun yang dimaksud dengan hikmah zakat dalam hal ini adalah makna yang bersifat rohaniah dan filosofis yang mengandung manfaat.

Sesuai dengan ibadah, zakat yang secara etimologis bermakna bersih, tumbuh dan baik, maka ibadah ini akan memberi keuntungan bagi pelakunya, meskipun secara tematik dan kuantitatif akan berakibat mengurangi jumlah harta kekayaan.

Dengan mengetahui hikmah suatu kewajiban atau larangan, kan diperoleh jawaban yang memuaskan dan logis, yaitu mengapa hal itu diwajibkan atau dilarang oleh Tuhan. Hikmah zakat ditujukan untuk kedua belah pihak, yaitu pihak wajib zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq).

---

<sup>19</sup> Muhammad Zaid Wahbah, Dkk, *Dirasat Muqaranat Fi Zakat al-Mal*, Cet I, 1984, Tihama; Jeddah, h. 97

Dengan memahami hikmahnya, pihak muzakki akan merasakan suatu keharusan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan harta benda yang sangat dicintainya. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah melakukan tindakan prefentif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya dilatarbelakangi oleh kemiskinan dan ketidakadilan.<sup>20</sup>

Wahbah al-Zuhaili mencatat 4 hikmah zakat, yaitu :

- a. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat.
- b. Membantu faqir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- c. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
- d. Mensyukuri nikmat Allah swt berupa harta benda.<sup>21</sup>

Sedangkan Didin Hafidhuddin mencatat ada 5 hikmah dan manfaat zakat yaitu :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materealistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus

---

<sup>20</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial )* Cet I, PT: Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1998,h. 79

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 1790-1791

menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah swt yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar guna memenuhi nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.<sup>22</sup>

Hasbi Ash-Shiddiq, membagi rahasia dan hikmah zakat atas empat sisi, yaitu hikmah bagi pihak wajib zakat (muzakkiy), pihak penerima zakat (mustahiq), gabungan antara keduanya, dan hikmah rahasia yang khusus dari Allah swt.

Dari empat aspek di atas dapat disimpulkan, bahwa hikmah dan rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pemantapan hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia secara simultan.

Pemantapan hubungan vertikal dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bidang harta. Kewajiban ini hampir sama dengan syariat berqurban, dalam hal ini dituntut suatu kepatuhan dan kerelaan untuk mengurbankan atau

---

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, h. 7

mengeluarkan sebagian reski yang diberikan oleh Allah. Kepatuhan inilah yang merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari keridhaannya semata-mata. Dengan kepatuhan ini akan memberi pengaruh yang mendalam bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, jiwanya semakin bersih dari sifat-sifat tercela, hartanya menjadi bersih dan ia betul-betul telah meyakini bahwa kepunyaan mutlak atas harta adalah Allah swt.

Kemudian dalam kitab Hikmah al-Tasyri wa Falsafah, Ali Ahmad al-Jurjani mengatakan, bahwa hikmah zakat adalah sebagai berikut :

- a. Menolong orang yang lemah dan membantu orang yang teraniaya serta menguatkannya untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang berkaitan dengan tauhid, ibadah dan sarana untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
- b. Membersihkan jiwa pemberi zakat dari dosa dan mensucikan akhlaknya dengan sifat dermawan dan mulia serta meninggalkan rasa kikir.
- c. Allah swt telah memberikan kenikmatan kepada orang kaya dan memberikan keutamaan dengan berbagai macam kenikmatan dan harta yang lebih dari kebutuhan aslinya, sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan dunia. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal maupun syara'. Pemberian zakat kepada fakir adalah termasuk dalam syukur nikmat tersebut.<sup>23</sup>

Wahbah Sulaiman Ghauji membagi juga hikmah zakat ats empat sisi, yaitu dari segi kepentingan orang-orang kaya sebagai muzakkiy, dari segi eksistensi harta benda itu sendiri, dari kepentingan kaum fakir miskin yang berhak atas zakat itu, serta dari pihak masyarakat pada umumnya.

---

<sup>23</sup> Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, Dar al-Fikr, Bairut, 1994, h. 111-112

Dari kepentingan pihak orang kaya hikmah yang terkandung di dalamnya adalah memantapkan hubungan dengan Allah, di samping meningkatkan hubungannya dengan sesama manusia dan sebagian untuk memberikan jaminan keselamatan harta benda dan kekayaannya dari kemungkinan hilang atau binasa.

Dari segi kepentingan harta benda yang dizakati itu sendiri, zakat memberi jaminan akan membentengi harta kekayaan itu dari kebinasaan dan memberikan keberkatan serta kesucian dari kekotoran dan subhat.

Adapun hikmah yang langsung dan nyata dirasakan oleh fakir miskin adalah bahwa zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk mereka merupakan bukti nyata wujud cinta kasih orang-orang kaya. Dengan demikian pihak fakir miskin menyadari dan akan membalasnya dengan sikap cinta kasih atas kebaikan hati mereka serta mendoakan kebaikan bagi mereka sehingga harta kekayaannya semakin bertambah dan penuh keberkatan.

Adapun hikmah yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat adalah dengan zakat yang berasal dari orang-orang kaya itu, maka berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kebodohan dan berbagai penyakit sosial lainnya dapat ditanggulangi.

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu aspek *diniyyah*, aspek *khuluqiyyah*, dan aspek *ijtimaiyyah*.

a. Faidah *dinniyah* (segi agama)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *dinniyah* ini adalah :

1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat.
2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Tuhannya, akan menambah

keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

3. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan oleh Allah SWT dalam QS. Al-baqarah ayat 261:

Terjemahnya:

“Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah sama dengan orang yang menanam sebutir benih, dimana tiap benih tumbuh tujuh bulir, tiap bulir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki . Dan Allah Maha Luas kurnia-Nya lagi Maha Mengethui”.

- b. Faidah *Khuluqiyah* (segi akhlak)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek khuluqiyah ini adalah :

1. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
2. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
3. Merupakan realita, bahwa dengan menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
4. Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

- c. Faidah *Ijtima'iyyah* (segi sosial kemasyarakatan)

Di antara hikmah zakat apabila di tinjau dari aspek *ijtima'iyyah* ini adalah ;

1. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
2. Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam

kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.

3. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin, karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Apabila harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
4. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
5. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

Dari beberapa uraian mengenai hikmah zakat, dapat kita simpulkan bahwa hikmah zakat itu memberi keuntungan kepada semua pihak, jika dilihat dari segi pengaruhnya. Di mana bagi orang miskin, dengan dana zakat itu akan mendorong dan memberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja keras sehingga pada gilirannya akan berubah dari golongan penerima menjadi golongan pemberi zakat. Dan bagi orang kaya sendiri akan memperoleh kesempatan untuk menikmati hasil usahanya, yaitu terlaksananya berbagai kewajiban agama dan ibadah kepada Allah dan juga memperoleh kesempatan mengembangkan kekayaannya melalui zakat. Dan tak kalah pentingnya adalah dapat mengembangkan jati diri dan fitrah manusia sebagai makhluk sosial.





## **BAB II**

### **JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATI**

#### **A. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati**

Di antara syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi dalam harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

1. Harta tersebut merupakan hak milik sempurna bagi muzakki (orang yang menunaikan zakat).
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk berkembang.
3. Harta tersebut mencapai nishab yang telah ditentukan.
4. Harta tersebut adalah kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok bagi muzakki dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
5. Harta tersebut terbebas dari hutang. Artinya, harta tersebut sudah dikurangi dengan hutang yang jatuh temponya.
6. Harta tersebut telah dimiliki selama satu haul (satu tahun), terhitung sejak dia mencapai nishab, kecuali zakat pertanian, buah-buahan, dan rikaz (harta karun).
7. Harta tersebut halal dan baik, karena Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik, juga karena harta yang haram tidak memenuhi syarat kepemilikan.

Adapun harta-harta yang tidak wajib dizakati menurut pendapat jumhur fuqaha, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Barang-barang yang dikhususkan untuk memperoleh manfaat pribadi, dan bukan merupakan bagian dari perdagangan, seperti kebutuhan-kebutuhan pokok manusia

yang terdiri dari rumah, kulkas, kendaraan, perabot rumah, pakaian, sarana pendidikan, kesehatan.

2. Pokok-pokok yang tetap, yang digunakan oleh pedagang, industriawan, dan lainnya untuk melakukan pelayanan, seperti tanah, bangunan, peralatan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengannya.
3. Piutang yang tidak diharapkan akan dibayar.
4. Harta yang diperoleh dari jalan yang haram.
5. Harta yang diperoleh dari kotoran, karena Allah adalah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik.
6. Harta yang tertahan dan terikat sehingga tidak dapat dicairkan dan dipergunakan. Harta semacam ini dizakati ketika telah dibebaskan untuk satu haul saja. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.
7. Harta yang tenggelam dalam hutang atau yang tersisa darinya setelah dikurangi hutang dan tidak mencapai nishab.
8. Harta yang belum mencapai nishab. Ukuran nishab berbeda-beda antara satu jenis harta dengan yang lain, sebagaimana yang akan kita jelaskan kemudian.
9. Barang-barang peninggalan dan bersejarah yang tidak diperjual-belikan atau dieksploitasi dengan syarat tidak berlebih-lebihan.
10. Mahar istri yang ditangguhkan, karena dia adalah piutang yang tertahan. Dia dizakati ketika telah diterima oleh istri untuk satu haul saja. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha.
11. Perhiasan yang dipakai dalam batas yang wajar. Sementara selebihnya harus dizakati dengan prosentase 2,5 % setiap tahun dengan penanggalan hijriah, menurut pendapat fuqaha yang paling kuat.
12. Harta umum yang digunakan untuk kepentingan umum.
13. Harta-harta sekolah tahfidz Alquran, panitia-panitia zakat, intitusi-institusi sosial dan perkumpulan-perkumpulan

ilmiah, karena semuanya termasuk pihak-pihak yang berhak menerima zakat.<sup>24</sup>

Jumhur fuqaha dari salaf dan khalaf berpendapat, bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas. Dalilnya adalah keumuman Firman Allah, QS. Al-Baqarah ayat 267 Berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwasanya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, kambing), emas, perak, barang dagangan, barang tambang dan rikaz (barang temuan), serta tanam-tanaman dan buah-buahan.<sup>25</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-

---

<sup>24</sup> Husein Syahatah, *Kaifa Tashibu Zakata Malika*, Cet I, Kalam Pustaka : Jakarta, 2005, h. 28

<sup>25</sup> Abdurrahman al-jaziri, Op.Cit, h. 307

buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun).<sup>26</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya *Zad al-ma'ad* mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Alquran dan hadis ada 4 (empat) jenis, yaitu tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas, perak serta harta perdagangan.<sup>27</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima (5), yaitu nuqud (emas, perak, surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanam-tanaman, buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakati.<sup>28</sup>

Ibnu Rusyd juga membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu pertama yang disepakati dua macam, yaitu dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi, kambing), dua macam dari biji-bijian (gandum dan syair), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi pakaian. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i, barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>29</sup>

Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati menjadi dua, yaitu harta-harta zhahir (al-amwal al zahirah), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (al-amwal al-bathiniyah), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op.Cit, h. 286

<sup>27</sup> Ibn al-Qoyyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, Dar al-Fikr, Kuwait, 1995, h. 3

<sup>28</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuh*, Op.Cit, h. 1819

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid I, Dar al-Kutub al-Islamiyah, h. 182-183

<sup>30</sup> Hasbi al-Syiddiqiy, *Pedoman Zakat*, Op.Cit, h. 79

Kewajiban zakat tidak hanya terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rasulullah saw, pada masa permulaan Islam, seperti emas dan perak, barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan rikaz (harta karun). Akan tetapi zakat wajib atas semua harta yang memenuhi syarat-syarat wajib zakat, menurut pendapat ahli ilmu yang kuat.

Fuqaha kontemporer telah membagikan harta dan pemasukan yang wajib dizakati, ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

1. Harta yang dirinya sendiri dan pertumbuhannya wajib dizakati, seperti barang-barang dagangan, barang-barang industri, kekayaan moneter, investasi, dan aktivitas-aktivitas kontemporer yang sejenis dengannya.
2. Harta yang dirinya sendiri wajib dizakati, seperti rikaz (harta karun), hasil pertanian, buah-buahan, dan mal mustafad (harta yang diperoleh).
3. Pemasukan-pemasukan yang wajib dizakati, seperti gaji dan penghasilan dari kerja lepas. (freelance).<sup>31</sup>

## **B. Jenis-Jenis Harta Yang Wajib Di Zakati**

### **1. Hasil Pertanian**

Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum. Sedang dari jenis buah-buahan, misalnya kurma dan anggur.

Hasil pertanian, baik tanam-tanaman maupun buah-buahan, wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Alquran, hadis, ijma, sebagaimana terdapat dalam QS al-An'am ayat 141:

---

<sup>31</sup> Ibid, h.30

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَاتِ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Dalam ayat tersebut di atas ada kalimat” dan tunaikanlah haknya” oleh para mufassir ditafsirkan dengan zakat dan Q.S al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. Ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek. Sebagai landasan kedua adalah sabda Rasulullah saw sebagai berikut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir, bahwa beliau mendengar Nabi saw bersabda:

فيما سقت السماء والعيون وكان عشريا لعشر و فيما سقى بالنضح  
نصف العشر

Artinya:

Pada yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan al-usyur (sepersepuluh) dan pada yang disirami dengan mengangkut air nishfu al-usyur (setengah dari sepersepuluh/seperlima).

فيما سقت الانهار والغيم العثور وفيما سقى بالسانية نصف العشر

Artinya:

“Pada apa-apa yang disiram dengan air sungai dan hujan sepersepuluh dan apa-apa yang disiram dengan pengairan (irigasi), maka zakatnya seperlima”. (H.R. Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu dawud)”

a. Ijma Ulama

Para ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) dan seperlima (5%).

Dari keterangan landasan tersebut di atas, maka para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam penentuan jenis dari tanam-tanaman dan buah-buahan tersebut. Wahbah al-Zuhaili mencatat berbagai pendapat para ulama mujtahid.



*Pertama*, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat itu harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak sengaja. Akan tetapi apabila suatu tanah sengaja dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput-rumputan dan diairi secara teratur dan dilarang orang lain menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar sepersepuluh (10%). Sebagaimana hadis yang artinya:

“Pada yang disiram hujan dan mata air dan tumbuh-tumbuhan itu hanya minum air hujan, dikenakan al-usyr (sepersepuluh) dan pada yang disirami dengan mengangkatnya air nishfu al-usyr (setengah dari sepersepuluh/seperlima).”

*Kedua*, jumhur ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah mengatakan, bahwa zakat tanam-tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan, sedangkan menurut madzhab Hambali, bisa dikeringkan, bertahan lama dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, menjelaskan pendapat dari para imam madzhab, diantaranya:

1. Madzhab Maliki berpendapat, bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 (dua puluh) macam tanaman, dimana 17 (tujuh belas) macam dari biji-bijian, yaitu kacang kedelai, kacang tanah, kacang pendek, kacang adas, pohon kayu yang pahit, julban (tumbuhan rumput yang ditanam bijinya dan bunganya berwarna-warni, gandum, jagung, tembakau, beras, zaitun, simsim (tumbuh-tumbuhan penghasil minyak nabati), qirthim, dan lobak merah. Sedang lobak putih tidak wajib

---

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Op. Cit, h. 1884-1885

dizakati karena tanaman ini tidak mengandung minyak. Adapun tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari buah-buahan ada 3 (tiga) jenis, yaitu anggur, kurma kering dan zaitun.

2. Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh (10%) hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma, dan anggur kering. Sedangkan tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dari biji-bijian adalah biji gandum, beras, kacang adas, dan semua makanan yang mengenyangkan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, jagung.
3. Madzhab Hanbali, berpendapat bahwa zakat sepersepuluh (10%) wajib dikeluarkan zakatnya dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan, misalnya hinthah, syair, sult, jagung, simsim, biji-bijian, tembakau, beras, julbanah, karsanah, hulbah, khasykhasy, adas.

*Ketiga*, Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.<sup>33</sup> Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdhah yang diterimanya dari Abu Muza dan Muadz, yang artinya : “Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw, mengutus keduanya (Abu Musa dan Muadz) ke Yaman buat mengajari manusia soal agama. Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat kecuali dari yang empat (4) macam ini: gandum, padi, kurma, dan anggur kering.”

b. Nishab, Ukuran, dan Cara Mengeluarkan Zakatnya.

Adapun nishabnya ialah 5 wasaq, berdasarkan sabda Rasulullah saw: “Tidak ada zakat di bawah lima wasaq. Wasaq adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sha', pada masa Rasulullah saw, satu (1) sha' sama dengan 4 mud, yakni 4 takaran dua telapak tangan orang dewasa. Satu (1) sha'

---

<sup>33</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit*, h. 340

oleh Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka satu wasaq 180 liter, sedangkan nishab pertanian 5 wasaq sama dengan 900 liter atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 kg.<sup>34</sup>

Adapun ukuran yang dikeluarkan bila pertanian itu di dapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian itu diairi dengan hujan (tadah hujan), maka zakatnya sebanyak 1/10 (10%). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw yang artinya “ Pada yang disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10) dan yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka ia 1/20 atau 5%”.

Penunaian zakat pertanian tidak menunggu adanya *haul*, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, kemudian sisanya (apabila lebih dari senishab) dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% (tergantung sistem pengairannya).

Adapun zakat tanah yang disewakan, Islam menganjurkan kepada umatnya yang memiliki lahan atau tanah supaya diolah sedemikian rupa agar mendapatkan hasil. Tanah harus diolah, baik diolah sendiri maupun diserahkan kepada orang lain. Ada beberapa cara yang bisa ditempuh, yaitu :

1. Tanah dipinjamkan kepada orang lain untuk diolah dan ditanami, tanpa memungut imbalan. Yang demikian ini adalah perbuatan terpuji yang dianjurkan dalam Islam. Apabila sampai nishab zakatnya dibebankan kepada si peminjam.
2. Tanah diserahkan kepada si penggarap dengan suatu perjanjian bagi hasil atau dengan ketentuan lain. Maka bila sampai nishab zakatnya dibebankan kepada kedua belah pihak atau dikeluarkan zakatnya dulu sebelum dibagi.

---

<sup>34</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, UIN Malang, Press, Cet I, 2008, h. 97

3. Tanah yang disewakan kepada orang lain dalam bentuk uang. Di sini timbul masalah, siapa yang membayar zakatnya, pemilik atau penyewa, menurut fakhrudin apabila uang sewa telah mencapai nishab, maka wajib bagi pemilik membayar zakat begitu juga penyewa. Apabila hasil telah sampai nishab, wajib pula mengeluarkan zakatnya.<sup>35</sup>

Apabila lahan tanah ditanami dengan berbagai macam tanaman, maka cara menghitung zakatnya, sebaiknya dihitung hasilnya dengan uang dan apabila telah sampai nishab, maka dikeluarkan zakatnya 2,5 %.

Adapun syarat zakat pertanian bisa ditunaikan, ialah ;

- a. Berupa biji-bijian dan buah. Dalilnya adalah hadis yang artinya “ Tidak ada zakat atas biji-bijian dan buah-buahan sebelum mencapai lima (5) wasaq.”
- b. Cara perhitungan atas biji dan buah tersebut sebagaimana yang berlaku di masyarakat adalah dengan ditimbang (dikilogramkan).
- c. Biji dan buah tersebut bisa disimpan (bukan diawetkan).
- d. Mencapai nishab , yaitu minimal 5 wasaq berat bersihnya, kering dan bersih.
- e. Pada saat panen, barang tersebut masih sah menjadi pemiliknya.

## **2. Hewan Ternak**

Hewan ternak termasuk bagian dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun demikian tidak semua hewan ternak dapat dizakati. Para ulama sepakat bahwa hewan ternak yang termasuk bagian dari sumber zakat dan wajib dikeluarkan zakatnya ada tiga (3) jenis, yaitu unta, sapi, kambing/domba. Hal ini di

---

<sup>35</sup> Ibid, h. 99

dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar yang artinya:

“Tiada seorang laki-laki yang mempunyai unta, lembu, atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan datanglah binatang-binatang itu pada hari kiamat dalam keadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia, lalu ia menginjak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai binatang-binatang itu melakukan hal itu, ia kembali lagi melakukannya dan demikian terus-menerus sehingga Allah selesai menghukum para manusia”.

Ketiga jenis hewan ternak tersebut wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hewan tersebut dipelihara.
- b. Memenuhi ketentuan jumlah nishabnya.<sup>36</sup>
- c. Memenuhi masa satu (1) tahun dalam tangan pemiliknya.
- d. Hewan ternak (unta, sapi, kambing) tersebut jinak, bukan liar.<sup>37</sup>

Adapun di luar ketiga jenis hewan ternak tersebut, seperti kuda dan sebagainya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Abu Hanifah, bahwasanya kuda termasuk bagian hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Maliki, kuda tidak wajib dizakati, kecuali kalau telah merupakan barang dagangan. Pendapat seperti ini juga dilontarkan oleh Sayyid Sabiq, menurutnya hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya tiga yaitu unta, sapi, kambing.<sup>38</sup> Beliau juga mengutip pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam memberikan syarat-syarat bagi hewan yang dikenai zakat, tersebut, yaitu :

- a. Sampai satu nishab.
- b. Berlansung sampai satu tahun.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzhahib*, Op.Cit, h. 309

<sup>37</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy*, Op.Cit, h. 1915-1916

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Op.Cit, h. 311

- c. Hendaklah ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam sebagian besar masa setahun itu.<sup>39</sup>

Adapun syarat wajib bagi pemilik hewan ternak tersebut adalah :

1. Beragama Islam.
2. Merupakan milik sempurna.
3. Cukup sampai nishab.
4. Dimiliki sampai satu tahun lamanya.
5. Tidak dipekerjakan, artinya sapi atau kerbau yang digunakan untuk membajak sawah untuk menarik gerobak tidak wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>40</sup>

a) Ketentuan Pembagian Zakat Unta

Diantara syarat wajib dikeluarkan zakat unta adalah telah mencukupi *nishab* (ukuran jumlah).

Adapun jumlah nishab unta adalah 5 ekor dengan perincian sebagai berikut:

JML	Ketentuan Zakat Wajib	JML	Ketentuan Zakat Wajib
1-4	Tidak dikenakan zakat	130-139	1 ekor <i>hiqqah</i> dan bintu labun
5-9	1 ekor kambing	140-149	2 ekor <i>hiqqah</i> dan 2 bintu labun
10-14	2 ekor kambing	150-159	3 ekor <i>hiqqah</i>
15-19	3 ekor kambing	160-169	4 ekor bintu labun
20-24	4 ekor kambing	170-179	3 ekor bintu labun, 1 ekor <i>hiqqah</i>
25-35	1 ekor <i>bintu makhad</i>	180-189	2 ekor bintu labun, 2 ekor <i>hiqqah</i>
36-45	1 ekor <i>bintu labun</i>	190-199	3 ekor <i>hiqqah</i> , 1 ekor bintu labun

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 312

<sup>40</sup> Hasahuddin AF, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, h. 47

## Jenis harta yang Wajib Dizakati

46-60	1 ekor <i>hiqqah</i>	200-209	4 ekor <i>hiqqah</i>
61-75	1 ekor <i>jadza'ah</i>	210-219	4 ekor bintu labun, 1 ekor <i>hiqqah</i>
76-90	2 ekor <i>bintu labun</i>	220-229	3 ekor bintu labun, 2 ekor <i>hiqqah</i>
91-120	2 ekor <i>hiqqah</i>	230-239	3 ekor <i>hiqqah</i> , 2 ekor bintu labun
121-129	3 ekor bintu labun	240-249	4 ekor <i>hiqqah</i> , 1 ekor bintu labun

### Penjelasan Istilah :

1. *Bintu Makhad* artinya unta yang sudah berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua.
2. *Ibnu Labun atau Bintu Labun* artinya unta yang sudah berumur 2 tahun dan memasuki tahun ke tiga.
3. *Hiqqah* artinya unta yang sudah berumur 3 tahun dan memasuki tahun keempat.

Bila seseorang terkena kewajiban mengeluarkan binatang yang berumur sekian, namun tidak ada, maka ia boleh mengeluarkan binatang yang umurnya kurang dari yang ditentukan dengan ditambah dua kambing atau 20 dirham. Namun , bila ternyata binatang yang ada umurnya lebih dari yang ditentukan, maka boleh ia keluarkannya. Nanti si amil (petugas zakat) akan memberikan kepadanya dua (2) kambing atau 20 dirham untuk menutupi kelebihanannya. Misalnya;

1. Ia terkena zakat *jadza'ah*, yang ia punya *hiqqah*, maka bisa diterima *hiqqah*nya dengan ditambah dua (2) kambing bila mudah atau 20 dirham.
2. Jika ia terkena zakat *hiqqah*, namun ia tidak punya *hiqqah*, yang ia punya *jadza'ah*, maka bisa diterima, yang nanti sipemungut zakat memberikan kepada si pemberi zakat 20 dirham atau dua kambing.

3. Jika ia terkena zakat *hiqqah*, namun ia tidak punya *hiqqah*, yang ia punya bintu labun, maka bisa diterima dengan menambahkan dua kambing bila muda atau 20 dirham.
4. Dan bila ia terkena zakat *bintu labun*, namun ia tidak punya bintu labun, yang ia punya *hiqqah*, maka *hiqqah* bisa diterima, yang nanti si pemungut zakat memberikan kepada pemberi zakat 20 dirham atau 2 kambing. Lain halnya *ibnu labun*, maka ia sebagai pengganti *bintu makhadh* tanpa tambahan.<sup>41</sup>

b) Ketentuan Pembagian Zakat Sapi

Nishab sapi adalah sebanyak 30 ekor dengan perincian sebagai berikut :

JML	Ketentuan Zakat Wajib
1-29	Tidak dikenakan zakat
30-39	1 ekor <i>tabi'i</i>
40-59	1 ekor <i>musinnah</i>
60-69	2 ekor <i>tabi'i</i>
70-79	1 ekor <i>musinnah</i> , 1 ekor <i>tabi'i</i>
80-89	2 ekor <i>musinnah</i>
90-99	3 ekor <i>tabi'i</i>
100-109	1ekor <i>musinnah</i> , 2 ekor <i>tabi'</i>
110-119	2 ekor <i>musinnah</i> , 4 ekor <i>tabi'i</i>
120-129	3 ekor <i>musinnah</i> , 4 ekor <i>tabi'i</i>

Keterangan :

1. *Tabi'* dan *tabi'ah* adalah sapi jantan dan sapi betina yang telah berusia satu tahun.
2. *Musinnah* adalah sapi betina yang berusia dua tahun.
3. Setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah satu ekor *tabi'i* dan setiap 40 ekor sapi zakatnya adalah satu ekor *musinnah*.

Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor, maka zakatnya ditambah dengan satu (1) ekor sapi berumur 1 tahun dan setiap

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dar-al Fiqr, jilid 1, h. 309



bertambah 40 ekor, maka zakatnya ditambah dengan 1 ekor sapi berumur 2 tahun.

c) Ketentuan Pembagian Zakat Kambing

Kambing menjadi wajib dikeluarkan zakatnya kalau telah mencapai nishab sebanyak 40 ekor. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Jumlah	Ketentuan Zakat Wajib
1-39	Tidak dikenakan zakat
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-300	3 ekor kambing
301-400	4 ekor kambing. Dan seterusnya, dengan pertimbangan setiap 100 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor kambing.

Dalam mengeluarkan zakat untuk hewan ternak ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya :

1. Dalam zakat tidak boleh petugas mengambil hewan tua, cacat yang mengurangi nilainya (seperti buta sebelah ) dan yang sangat jelek. Juga tidak boleh mengambil binatang yang sedang hamil dan binatang pilihan/berharga seperti binatang pejantan dan kambing yang sedang digemukkan untuk dimakan. Oleh karena itu yang diambil adalah yang pertengahan.
2. Digabung binatang yang sejenis, seperti domba dengan kambing, unta Arab dengan unta yang bukhth (unta negeri khorosan, yakni yang memiliki dua punuk), sapi dengan kerbau, dan dihitung jumlahnya, bila sampai nishab, maka dikeluarkan zakatnya.
3. Tidak diterima zakat kambing dengan mengeluarkan kambing yang masih sangat kecil, juga tidak diterima sapi sangat kecil dalam zakat sapi, dan unta yang sangat kecil dalam zakat unta. Namun semua itu dihitung jumlahnya dengan binatang yang besarnya. Umar ra pernah berkata kepada petugas zakat (amil),

“Masukkan anak kambing dalam hitungan itu, namun jangan kamu ambil.

4. Apabila seseorang telah memiliki senishab unta atau sapi atau kambing, lalu ditengah-tengah menjalani haul ternyata binatang tersebut melahirkan, maka dihitung semuanya, bila telah setahun penuh bagi unta, sapi atau kambing yang dewasa, maka dikeluarkan zakatnya dari keseluruhan (yang telah dijumlahkan antara binatang yang dewasa dan yang masih kecil ).
5. Tidak ada zakat dalam waqs, (yakni antara dua nishab), misalnya orang yang memiliki 40 ekor kambing ia wajib mengeluarkan zakat satu kambing sampai mencapai 120 ekor kambing. Bila lebih wajib mengeluarkan dua (2) ekor kambing, antara 40 sampai 120 ekor disebut waqs dan tidak ada zakatnya.
6. Apabila binatang ternak itu milik dua orang yang bersekutu, yang ternyata bila digabung telah mencapai nishab (dan penggembala binatang milik kedua orang yang bersekutu itu sama, tempat gembalanya sama, kampungnya sama), maka diambil zakat dari keduanya satu zakat. Misalnya, teman sekutu pertama memiliki 20 ekor kambing juga, maka petugas zakat cukup mengambil zakat dari salah satu dari dua orang yang bersekutu tadi satu kambing, lalu sekutu yang diambil kambingnya meminta uang senilai setengah harga satu kambing kepada sekutu yang tidak diambil kambingnya.
7. Tidak boleh menggabungkan dua kumpulan kambing yang terpisah karena lari dari zakat, misalnya ada tiga orang, masing-masing memiliki 40 ekor kambing, jelas masing-masing orang tadi kena zakat satu (1) ekor kambing, mereka yang tiga orang tadi pun menggabungkan kambing-kambingnya yang kalau dijumlahkan menjadi 120 ekor, mereka pun akhirnya mengeluarkan zakatnya hanya satu ekor kambing.
8. Tidak boleh juga memisahkan dua kumpulan kambing yang sebenarnya bersatu agar tidak kena zakat. Misalnya kambing milik masing-masing dua orang yang bersekutu sejumlah 101

ekor, kalau digabungkan menjadi 202 ekor sehingga zakatnya 3 ekor kambing, keduanya pun karena takut diambil tiga (3) ekor kambing, lalu memisahkan kambing-kambingnya sehingga masing-masing hanya mengeluarkan zakat satu (1) ekor kambing.

Untuk lebih jelasnya penghitungan zakat hewan ternak ini, dapat dilihat sebagai berikut :

Keterangan	Unta	Sapi	Kambing
Jumlah binatang ternak	10	30	250
Dikurangi:	2	10	
1. Binatang yang dipekerjakan			
2. Binatang yang diperdagangkan			
Bejana zakat	8	20	200

Bejana zakat dibanding dengan nishab zakat (8 ekor unta, 30 ekor untuk sapi dan 40 ekor kambing). Jika bejana zakat mencapai nishab, maka kadar zakat dihitung berdasarkan daftar khusus sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

### 3. Zakat Emas dan Perak

#### a. Pengertian dan Landasan Hukum

Emas dan perak adalah merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah SWT. Ia merupakan hasil bumi yang banyak manfaatnya kepada manusia, sehingga dijadikan pula sebagai nilai tukar uang bagi segala sesuatu. Sementara syariat mengibaratkan emas dan perak sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup dan berkembang. Syariat juga telah mewajibkan keduanya boleh digunakan dalam bentuk uang atau kepingan, bekas bejana, cendera mata, ukiran, atau perhiasan. Zakat diwajibkan kepada pihak yang memiliki emas dan perak apabila sampai nishab dan telah cukup haul (setahun).

Pembahasan mengenai zakat emas dan perak perlu dibedakan antara sebagai perhiasan atau sebagai uang (alat tukar). Sebagai perhiasan emas dan perak juga dapat dibedakan antara

perhiasan wanita dan perhiasan lainnya, misalnya ukiran, souvenir, perhiasan pria, dan lain-lain. Dangkalnya pemahaman fungsi emas dan perak sebagai alat tukar atau mata uang menyebabkan banyaknya simpanan uang di kalangan umat Islam tidak tertunaikan zakatnya.

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah Alquran, Surah al-Taubah, ayat 34

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda yang artinya :

“Setiap pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat dijadikan kepingan lalu dibakar dalam api neraka, kemudian diseterika rusuk dan belakang mereka, setiap kali kepingan itu menjadi sejuk, ia kembali dibakar semula pada hari yang ukurannya bersamaan dengan lima puluh ribu (50.000) tahun sehingga ia dihukum diantara hamba-hamba”.(H,R.Muslim).

Ayat dan hadis tersebut menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas dan perak wajib hukumnya. Syara' telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak

yang sampai nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki dengan penuh nishabnya, terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup satu tahun (haul).

Barang siapa yang telah memiliki satu nishab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya, bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila di tengah-tengah tahun, yang satu nishab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nishab lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus, kemudian kalau di kemudian hari genap senishab kembali karena membeli atau sebab lain, maka pada saat itu dimulai lagi tahun yang baru, sebab tahun sebelumnya telah terputus dengan tidak genapnya satu tahun, artinya genapnya satu nishab kali ini merupakan pemilikan baru.

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senishab dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajiblah atasnya mengeluarkan zakat. Dan jika tidak sampai senishab, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat, kecuali jika emas yang tidak sampai senishab itu diperniagakan dan ada padanya yang menyampaikan nishabnya ataupun ada pada barang yang lain, maka wajiblah zakat padanya atas nama perniagaan barang yang lain, dan wajib atasnya zakat atas nama perniagaan.

#### b. Nishab Emas dan Ukuran Zakatnya

Apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senishab dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat. Apabila tidak sampai senishab, tidak wajib zakat kecuali jika emas yang tidak sampai senishab tersebut diperdagangkan dan ada perak yang menyampaikan nishabnya ataupun barang yang lain, maka wajiblah zakat atas nama perdagangan barang yang lain.

Menurut Ibnul Munzhir sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddiq, bahwasanya para ulama telah berijma bahwa apabila ada 20 misqal, harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya

nishab emas adalah 20 mitsqal.<sup>42</sup> Adapun madzhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan Maliki juga berpendapat bahwa nishab emas 20 mitsqal atau 20 dinar sama dengan 200 dirham. Pendapat para ulama fiqih ini mengacu pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Ali, Rasulullah saw bersabda yang artinya : “Tiada atas engkau sesuatu hingga ada emas itu, 20 dinar. Apabila ada pada engkau 20 dinar telah sampai setahun engkau miliki, maka zakatnya setengah dinar, an yang lebih dari padanya menurut perhitungannya”.

Dari hadis tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ukuran zakat emas ialah dua setengah persen.

c. Nishab Perak dan Ukuran Zakatnya

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tidak ada zakat pada perak hingga berjumlah lima auqiyah. Satu auqiyah= 40 dirham. Sehingga kalau 5 auqiyah =200 dirham. Para ulama sepakat dalam menetapkan nishab perak ini. Diriwayatkan oleh Bukhari , bahwasanya Nabi saw bersabda:

وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوُرُقِ صَدَقَتْ

Artinya :

“Tidak ada zakat perak yang kurang dari 5 auqiyah”.

d. Campuran Emas dan Perak

Hasbi al-Shiddiq mengutip beberapa pendapat imam madzhab tentang emas dan perak yang digabung, yaitu :

1. Menurut Abu Hanifah dan Malik, apabila digabungkan perak dan emas yang sampai senishab, yakni jumlah keduanya sampai senishab, maka wajiblah zakat terhadapnya.
2. Menurut Syafi'i, Abu Tsaur, Daud dan Ahmad, bahwasanya tidak digabungkan emas dan perak, dihitung

---

<sup>42</sup> Hasbi al-Shiddiq, *Op.Cit*, h.66

sendiri-sendiri, tidak digabungkan salah satu dari keduanya dengan yang lain.<sup>43</sup>

e. Perhiasan Emas dan Perak

Para ulama berbeda pendapat tentang emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Secara umum pendapat para ulamatersebut dapat dibagi dua, yaitu : pendapat yang mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan. Syechul Hadi Permono merinci masalah ini sebagai berikut :

- i. Menurut Abu Hanifah, murid-muridnya, al-Auza'i dan al-Hasan bin Hayy mengatakan bahwa emas dan perak yang dijadikan perhiasan, maka diwajibkan keluar zakatnya. Alasan mereka berdasarkan pada surah al-Taubah, ayat 34, yang berbunyi ;

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan bathil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, makka beritahukanlah kepada mereka, bahwasanya mereka akan mendapat siksa yang pedih”.

- ii. Menurut imam Malik, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan pendapatnya yang lebih tegas dari dua pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya zakat perhiasan dari emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Alasan mereka adalah:

---

<sup>43</sup> Hasbi ash-Shiddiq, *Ibid*, h. 68

1. Asal segala sesuatu itu bebas dari tanggungan beban, selama belum berlaku dalil syar'i yang shahih. Sedangkan dalil yang seperti itu tidak ditemukan pada zakat perhiasan, baik dari nash maupun dari qiyas terhadap asal yang mempunyai nash.
2. Zakat itu diwajibkan pada harta benda yang berkembang atau disiapkan untuk dikembangkan. Sedangkan perhiasan bukanlah harta yang berkembang atau disiapkan untuk dikembangkan.
3. Bukti-bukti dari para sahabat. Mereka tidak mengeluarkan zakat perhiasan, seperti Aisyah ra tidak mengeluarkan zakat perhiasan anak perempuannya dan budak-budak perempuannya.
4. Hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda:

ليس في الحلي زكاة

Artinya:

“Tidak ada zakat pada perhiasan”.

Apabila perhiasan tersebut digunakan untuk diperdagangkan dengan alasan bahwa harga emas itu akan selalu naik yang tentunya akan menghasilkan uang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun perhitungan zakatnya adalah sebagai berikut :

- a. Terlebuah dahulu membatasi bulan pada setiap tahun yang pada akhir bulan tersebut harus dapat mengeluarkan zakat.
- b. Menghargakan perhiasan yang digunakan untuk dikembangkan itu sesuai dengan harga pasar, yaitu perhiasan ditimbang dalam harga per-gram.



- c. Membandingkan harga perhiasan itu dengan harga emas pasaran dan harus dikeluarkan zakatnya sekitar 2,5% jika sudah mencapai nishab.<sup>44</sup>

#### **4. Zakat Barang Dagangan**

##### **a. Pengertian dan Landasan Hukum**

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.

Kemudian apa yang menentukan barang tersebut termasuk komoditas perdagangan atau tidak ? Yang menentukan suatu barang termasuk komoditas dagang ialah niatnya ketika membeli. Oleh karena itu, apabila seseorang membeli sebuah mobil dengan niat untuk pemakaian pribadi, maka mobil itu tidak termasuk komoditas dagang yang harus dizakati, walaupun dalam niat tersebut terdapat pula maksud jika dijual akan mendapat keuntungan. Sebaliknya, jika ia membeli beberapa unit mobil dengan niat untuk diperdagangkan dan mendapatkan keuntungan lalu salah satu dipakai, maka mobil yang dipakai itu termasuk komoditas dagang yang harus dibayar zakatnya. Pedagang harus menghitung kekayaan komoditas dagangannya berdasarkan harga pasaran yang berlaku, walaupun harga itu lebih rendah dari harga beli atau pun lebih tinggi karena yang menjadi standar adalah harga pasaran yang berlaku. Yang dimaksud dengan harga pasaran yang berlaku adalah harga jual komoditas itu yang berlaku pada waktu zakat wajib dibayar.

Hampir seluruh ulama sepakat, bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang

---

<sup>44</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Terj H. Dudung RH, Idhoh Anas, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, h. 229

dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjualbelikan dan bisa mendapatkan keuntungan.<sup>45</sup>

Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Alquran, hadis, dan ijma. apun dasar wajibnya zakat barang dagangan terdapat dalam Alquran, surah al-Baqarah, ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِينَ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Nash Alquran di atas bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli atau perdagangan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah zakat perdagangan, sebab Allah SWT memerintahkan para hamba-Nya yang mukmin untuk berinfaq dari hasil usaha yang baik-baik dan dari apa yang Allah keluarkan dari dalam bumi, baik biji-bijian, buah-buahan maupun barang mineral. Dan sebesar-besar infaq yang Allah fardhukan adalah zakat barang perdagangan dan itulah yang dimaksudkan apa-apa yang diusahakan manusia.

---

<sup>45</sup> Facruddin, Op.Cit, h.109

Dalam menafsirkan ayat tersebut di atas, Wahbah al-Zuhaili mengatakan, bahwa perintah ayat tersebut adalah untuk semua umat Nabi Muhammad saw. Selanjutnya dia mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “*infaq*” dalam ayat tersebut. Ali ibn Abi Thalib, Ubaidah al-Salmani dan ibn Sirin menafsirkannya dengan “*al-zakah al Mafrudhah*” atau zakat yang diwajibkan. Sementara itu al-Barra’ibn Azib, Hasan al-Basri dan Qatadah menafsirkannya dengan nafkah sunnah atau *tathawwu*.<sup>46</sup>

Adapun Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa dalil konsensus sahabat, tabi’in dan ulama salaf, dapat dilihat dari tuntunan yang diberikan oleh para sahabat. Di antaranya adalah peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dengan sanad ia sendiri dari sumber Abdul Qari: “Saya bertugas di kas negara pada masa Umar bin Khatab.” Beliau bila keluar, mengumpulkan kekayaan para pedagang kemudian menghitungnya, baik yang ada pada waktu itu maupun yang tidak.” Ibn Hazm meriwayatkan pula hadis itu dalam *al-Muhalla* dan mengatakan bahwa sanadnya shahih.<sup>47</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawi bahwa dari segi analogi atau qiyas, bahwa harta benda yang diperdagangkan adalah kekayaan yang dimaksudkan untuk dikembangkan, karena hal itu sama statusnya dengan tiga jenis kekayaan yang disepakati wajib zakat, yaitu, tanaman, ternak, emas, dan perak.<sup>48</sup>

#### b. Syarat-syarat Wajib Zakat Perdagangan

Kata “memperdagangkan” mengandung dua unsur, yaitu : tindakan dan niat. Tindakan adalah perbuatan penjual dan pembeli, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut. Kedua unsur tersebut harus ada, tidak cukup salah

---

<sup>46</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Dar al-Fikr, Damasqus, Jilid II, h. 66

<sup>47</sup> *Ibid*, h.318

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 321

satunya. Bila seseorang membeli sesuatu untuk dipakai sendiri dengan niat apabila menguntungkan, nanti ia akan menjualnya, maka hal tersebut tidaklah termasuk barang dagangan.

Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas, tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sudah mencapai nishab, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok.

Nishab barang dagangan adalah senilai harga 85 gram emas. Nishab tersebut dihitung pada akhir tahun. Mengenai nishab barang dagangan ini para imam madzhab berbeda pendapat.

Pendapat pertama, dari Imam Malik dan Syafi'i yang mengatakan bahwa nishab diperhitungan pada akhir tahun, karena nishab erat kaitannya dengan harga barang, sedangkan menilai harga barang dagangan setiap waktu adalah pekerjaan yang sulit. Maka masa wajibnya adalah akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat obyek-obyek zakat lain, karena nishab dihitung dari bendanya yang tidak sulit menghitung.

Pendapat kedua, nishab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila harta belum mencapai nishab dalam suatu waktu, maka tempo dianggap batal, karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nishab dan waktu. Oleh karena itu, jumlah senishab penuh harus konstan pada setiap waktu. Pendapat ini di anut oleh Imam Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur dan Ibnu Mundzir.

Pendapat ketiga, bahwasanya perhitungan nishab cukup dilakukan di awal dan akhir tahun, bukan antara dua masa itu. Bila nishab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nishab belum cukup. Ini pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 329-330

c. Cara Membayar Zakat Harta Perdagangan

Kalau kita mengikuti pendapat yang pertama di atas, maka zakat perdagangan ditunaikan pada akhir waktu haul atau akhir tahun. Caranya dengan menghitung nilai barang dagangan tersebut. Yang menghitungnya adalah sang pemilik usaha jika ia memiliki keahlian dalam hal tersebut. Jika tidak, maka boleh dihitung oleh orang lain yang ahli. Perhitungannya dilakukan di akhir haul atau akhir tahun.

Kekayaan yang diinvestasikan oleh seorang pedagang tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
2. Kekayaan dalam bentuk uang yang secara kongrit berbeda dalam genggamannya atau berada dalam kekuasannya, seperti uang yang berada di dalam rekeningnya di bank.
3. Kekayaan dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi.

Untuk menjawab tiga problem yang dipaparkan diatas, maka kita sebaiknya menelaah pendapat para ulama dan tabi'in mengenai hal tersebut. Maimun bin Mihrum berkata : "apabila sudah datang temponya atau berzakat, hitunglah jumlah uang kontan yang ada padamu dan berapa barang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan piutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa". Selain itu Hasan basri juga berkata, bila telah sampai pada bulan pembayaran zakat, maka ia menghitung zakat uang yang ada di tangannya, barang yang dijual dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali, seseorang harus menghitung harga barang dagangan, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain".

Dari paparan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik yang berupa modal, laba, simpanan, dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.

Pada badan usaha yang berbentuk perusahaan (kerjasama), maka jika semua anggota perusahaan beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berperusahaan. Tetapi jika anggota perusahaan terdapat orang yang non muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota perusahaan muslim saja.

Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap/ tidak berkembang. Usaha yang bergerak di bidang jasa, seperti perhotelan, penyewaan apartemen, taksi, rental mobil, bus, kapal laut, pesawat, kemudian dikeluarkan zakatnya dapat dipilih di antara dua cara:

1. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti taksi, kapal, dan hotel, kemudian keluaran zakatnya 2,5 %.
2. Pada perhitungan akhir tahun (tutup buku), hanya dihitung dari hasil bersih yang diperoleh usaha tersebut selama satu tahun, kemudian zakatnya dikeluarkan 10 %. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, di

mana perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada hasil pertaniannya, tidak dihitung harga tanahnya.

d. Standar Zakat Harta Perdagangan

Standar zakat ini biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang bisa diperjualbelikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap. Sedangkan nilai zakat harta perdagangan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha mengenai nilai yang dihitung ketika mengeluarkan zakat, yaitu:

*Pertama*, harta perdagangan hendaknya dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada riwayat dari Zaid bin Jabir, dia berkata”Hitunglah sesuai dengan harganya ketika datang zakat, kemudian keluarkan zakatnya”.

*Kedua*, harga barang tersebut dihitung dengan harga yang hakiki terhadap nilai barang dagangan. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, dia berpendapat, “Sebaiknya menunggu waktu sampai menjual untuk memperkuat bahwa taksiran itu sempurna atas nilai barang yang hakiki yang dijual dengan harta perdagangan”.

*Ketiga*, bahwasanya orang harus membayar zakat dengan harga yang dia beli dengan nilai harta dagangan. Nishab zakat harta perdagangan adalah senilai dengan 20 mitsqal emas, dengan ukuran zakat 2,5 %, berdasarkan bunyi hadis yang artinya: “Berikan zakatnya dari setiap 40 dirham, 1 dirham”.

## **5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang**

a. Pengertian dan Landasan Hukum

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma’din) dan barang temuan (rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan. Menurut Hanafiyah,

bahwasanya barang tambang (*ma'din*) adalah barang temuan (*rikaz*) itu sendiri, sedangkan menurut jumhur ulama keduanya berbeda.

*Rikaz* menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Sedangkan *ma'din* adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi, dan sulfur. Menurut Ibn Atsir sebagaimana dikutip Yusuf al-Qardhawi, bahwa *ma'din* berarti tempat dari mana kekayaan bumi, seperti emas, perak, dan tembaga keluar. Sedangkan *kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia. *Rikaz* mencakup keduanya yakni (*ma'din* dan *kanz*), karena kata ini berasal dari kata *rakz* yang berarti simpanan, tetapi yang dimaksud adalah *maruz* “ yang disimpan”.<sup>50</sup>

Wahbah al-Zuhaili mengutip pendapat beberapa ulama, yaitu :

1. Menurut Hanafiyah, bahwa *ma'din*, *rikaz* dan *kanz* itu mempunyai arti yang sama, yaitu semua harta yang ditanam di bawah bumi, hanya saja *ma'din* itu ciptaan Allah SWT di bumi sejak diciptakan. Sedangkan *rikaz* dan *kanz* adalah harta yang ditanam oleh orang-orang kafir.
2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa *ma'din* itu bukan *rikaz*. *Ma'din* adalah semua yang diciptakan oleh Allah SWT, baik berupa emas, perak tau yang lainnya. Sedangkan *rikaz* atau *kanz* adalah apa yang tertanam, baik berupa emas, perak, atau lainnya pada masa jahiliyah. Apabila ragu apakah itu telah tertanam pada masa jahiliyah atau tidak, maka dianggap jahiliyah.
3. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *ma'din* bukan *rikaz*. *Madin* adalah apa yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah SWT. *Ma'din* ini khusus untuk emas dan perak. Sedangkan *rikaz* adalah apa yang ditanam oleh orang-

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*,h. 433



orang sebelum Islam atau sebelum kebangkitan Nabi Muhammad saw.

4. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa apa yang dikeluarkan dari bumi yang merupakan ciptaan Allah SWT, bukan sesuatu yang ditanam baik itu padat maupun cair. Sedangkan *rikaz* adalah harta orang kafir yang diambil pada masa Islam, baik sedikit maupun banyak.<sup>51</sup>

Kewajiban zakat atas *rikaz* dan *ma'din* ini didasarkan hukumnya pada keumuman nash dalam QS al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

#### b. Nishab dan Ukuran Zakat

Barang temuan (*Rikaz*) dan barang tambang (*ma'din*) tidak disyaratkan mencapai haul, akan tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Ukuran zakatnya adalah seperlima atau 20%. Namun mengenai nishabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf al-Qardhawi adalah bahwa *rikaz* tetap harus memenuhi persyaratan nishab, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian

---

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 1854-1864

juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti: mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nishabnya dianalogikan dengan zakat pertanian.<sup>52</sup>

Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang di dapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku satu tahun.

Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau ditempa harus dikeluarkan zakatnya, akan tetapi barang tambang cair atau padat yang tidak diolah dengan api tidak dikenakan atau wajib zakat. Pendapat mereka di atas diqiyaskan pada emas dan perak yang kewajiban mengeluarkan zakatnya ditetapkan dengan dalil nash dan ijma para ulama.

Adapun nishab barang tambang dan waktu penghitungannya, menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya adalah barang tambang wajib dizakati baik sedikit maupun banyak dan mereka tidak mensyaratkan harus bermasa satu tahun. Sedangkan para imam yang lain, seperti Imam Malik, Syafi'i dan para sahabatnya, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa nishab pada barang tambang tetap diperhitungkan atau berlaku.

Pengertian cukup satu nishab barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu nishab dalam sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan dijumlahkan. Hal ini disebabkan karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali sama dengan akumulasi hasil pertanian.

Pengertian cukup satu nishab barang tambang yang diperoleh, bukanlah berarti bahwa cukup satu nishab dalam sekali penemuan, tetapi diperoleh berkali-kali dan dijumlahkan. Hal ini disebabkan karena penemuan logam mulia biasanya terjadi tidak satu kali sama dengan akumulasi hasil pertanian.<sup>53</sup> Ketentuan haul (satu tahun) bagi barang tambang menurut jumhur ulama fiqih,

---

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h.447

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 447

bahwa barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu berhasil ditambang dan dikeluarkan setelah dibersihkan.

## 6. Zakat Investasi

### a. Pengertian dan Landasan Hukum

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi, misalnya bangunan atau kendaraan yang disewakan. Hal ini dilakukan oleh suatu perusahaan, jika ia memiliki surplus anggaran untuk membiayai kegiatan pokoknya. Tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga.<sup>54</sup>

Investasi jangka panjang dapat berupa investasi surat-surat obligasi dan investasi real estate. Pada zaman modern sekarang, investasi merupakan sektor ekonomi yang amat vital. Yang dimaksud dengan zakat investasi adalah kekayaan yang tidak wajib atas materinya, tetapi hasil dari produknya.

Wahbah al-Zuhaili di dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatiuhu menyatakan, bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengolahan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga sudah diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut, darat, dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

Yusuf al-Qardhawi dalam fiqh zakat mengistilahkan kegiatan ini dengan *al-musthaghallat* atau investasi, baik untuk disewakan maupun untuk melakukan kegiatan produksi yang kemudian dijual. Ia memberikan contoh perumahan, alat transportasi yang disewakan, bahkan juga pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian di jual di pasar-pasar.<sup>56</sup>

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan beberapa ulama lainnya, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin, menyatakan

---

<sup>54</sup> Fakhruddin, *Op.Cit*, h. 172

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 1947

<sup>56</sup> Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 458

bahwa harta tersebut bukan merupakan sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut:

*Pertama*, Rasulullah saw telah menjelaskan secara rinci sumber-sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber-sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau dengan perkataan lain, tidak ada nash dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat terhadap benda-benda tersebut.

*Kedua*, mereka juga berpendapat bahwa para ulama fiqih sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.<sup>57</sup> Sementara kelompok lain, seperti ulama madzhab Hambali, madzhab Maliki, madzhab Zaidiyyah, juga Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman Hasan, berpendapat bahwa harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun alasannya sebagai berikut :

- 1.) Dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti surah al-Taubah ayat 103, terdapat perintah yang mewajibkan mengeluarkan zakat bagi segala macam harta yang dimiliki .
- 2.) Alasan diwajibkan zakat pada suatu sumber zakat, sebagaimana yang disepakati para fuqaha adalah tumbuh dan berkembang. Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang tidak berlebihan yang di pakai wanita, kuda yang digunakan untuk berperang, sapi dan unta yang dipekerjakan adalah tidak wajib zakat, berdasarkan ijma ulama. Sedangkan harta dalam berbagai bentuk terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.
- 3.) Di antara hikmah disyariatkan zakat adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir dan miskin, keikutsertaan para pemilik harta untuk membela agama dan menjaga serta menyebarkan dakwa Islam. Semua

---

<sup>57</sup> Didin Hafidhuddin, Op.Cit, h. 116

itu akan terealisasi, manakala para pemilik harta mau mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya.<sup>58</sup>

b. Nishab, Waktu dan Cara Mengeluarkan Zakat Investasi

Zakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang masuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan dan investasi pada ternak atau tambak. Yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi itu, tetapi pemasukan hasil dari investasi itu. Apabila bentuknya rumah kontrakan, maka yang dizakati adalah uang sewa kontrakannya dan apabila kendaraan yang disewakan, maka uang sewanya diketyarkan zakatnya. Bila pabrik dan industri ,maka zakatnya aalah nilai produknya. Bila saham, maka zakatnya adalah nilai pertambahannya atau euntungannya.

Pengeluaran zakatnya bukan dihitung berdasarkan perputaran tahun, tetapi berdasarkan pemasukan hasil. Kapan menerima uang masuk, maka dikeluarkan zakatnya. Harta investasi yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil pemasukan dari investasi itu setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Ini adalah salah satu pendapat yang cocok diterapkan kepada mereka yang pemasukannya relatif kecil, sedangkan kehidupannya sangat tergantung pada investasi ini. Jadi, pengeluaran zakatnya bukan dari pemasukan kotor, tetapi setelah dikurangi dengan pengeluaran kebutuhan pokoknya.

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang harus dikeluarkan zakatnya adalah pemasukan kotornya. Pendapat ini agaknya lebih cocok bagi pemilik investasi yang besar dan mendatangkan keuntungan berlimpah sehingga pemiliknya hidup berkecukupan.

Dilihat dari karakteristik investasi, biasanya modal tidak bergerak dan tidak terpengaruh terhadap hasil produksi. Dengan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 117

demikian, zakat investasi lebih dekat ke zakat pertanian, yaitu seharga 520 kg beras tiap panen. Apabila harga 1 kg beras 2.500, maka 520 kg xRp 2500 hasilnya adalah Rp 1.300.000. Pendapat ini diikuti oleh ulama modern seperti Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Abu zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman Hasan. Dengan demikian zakat investasi dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% atau 10% dengan perincian 5% untuk penghasilan kotor dan 10 % untuk penghasilan bersih.

Adapun nishab zakat investasi mengikuti nishab zakat pertanian. Para ulama berpendapat, bahwa nishab zakat investasi adalah jumlah penghasilan bersih selama satu tahun, meski pemasukan itu terjadi tiap waktu. Bila nilai total pemasukan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional melebihi Rp 1.300.000, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Sedangkan waktu membayarnya berdasarkan perbedaan penghitungan nishab oleh para ulama, maka waktu pembayarannya pun dibedakan. Apabila menganut pendapat pertama, maka zakatnya dikeluarkan saat menerima setoran. Dan apabila menganut pendapat kedua, maka membayar zakatnya tiap satu tahun atau haul, yaitu hitungan tahun dalam system Hijriyah.

Para ulama menganalogikan zakat investasi ini dengan zakat pertanian, yaitu antara 5% sampai 10%. Adapun cara pembayaran zakatnya adalah jika perusahaan yang mengeluarkan saham itu telah membayarkan zakatnya, maka tidak ada lagi kewajiban zakat atas pemilik saham. Tetapi jika belum, maka si pemilik harus menzakatkannya sesuai dengan tujuan , apa ia memiliki saham tersebut. Sebagaimana di sebutkan di atas, bahwa tujuan investasi ini adalah untuk menghasilkan income ataupun dengan tujuan niaga:

a) Investasi Saham Untuk Tujuan Menghasilkan Income

Maksudnya di sini adalah investasi berupa saham yang dimiliki dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan dan

memberikan pemasukan yang dinamakan juga dengan istilah investasi jangka panjang. Investasi itu bisa masuk dalam kelompok aset tetap dan aset beredar yang ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga beli (harga tercatat) ataupun harga pasarannya dan harus disediakan dana penurunan harga saham bila harga pasarannya lebih rendah dari pada harga tercatatnya.

Penaksiran dan hukum syariatnya ada dua macam, yaitu bila pemilik saham dapat mengetahui nilai setiap saham dari aset zakat perusahaan yang mengeluarkannya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak diketahui, maka ia harus menggabungkan income yang dihasilkan dari saham itu dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan kemudian membayarkan zakatnya sebesar 2.5%.

#### b) Investasi Berupa Saham Untuk Tujuan Niaga

Yaitu investasi berupa saham yang dibeli untuk tujuan diperdagangkan atau dijual kembali agar menghasilkan keuntungan. Saham yang seperti ini ditaksir berdasarkan harga terendah di antara harga tercatat atau pun harga pasarannya dengan menyediakan dana apabila harga pasarannya itu lebih rendah dari pada harga tercatatnya.

Penaksiran dan hukum syariatnya : Investasi saham yang diperdagangkan ini ditaksir dengan harga pasaran ketika telah tiba haulnya dan digabungkan dengan kekayaan lain yang harus dizakatkan.

## **7. Zakat Profesi**

### **a. Pengertian Profesi dan Landasan Hukum**

Zakat atau penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf, bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan al-mal mustafad. Yang termasuk dalam kategori zakat al mal-Mustafad. Yang termasuk dalam kategori zakat al-mustafad adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan, bahwa barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Selanjutnya menurut Yusuf Qardhawi, bahwasanya pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan dokter, insinyur, advokat, seniman, dan lainnya. Kedua, adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa, gaji, upah, ataupun honorium.<sup>59</sup>

Sementara itu fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.<sup>60</sup> Pertanyaannya kemudian adalah wajibkah penghasilan yang berkembang sekarang ini untuk dikeluarkan zakatnya atau tidak? Bila wajib, berapakah nishabnya, besar zakatnya, dan bagaimana cara mengeluarkan zakatnya?.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat, bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas, baik yang berasal dari Alquran maupun hadis. Bahkan Rasulullah

---

<sup>59</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op.Cit*, h. 487

<sup>60</sup> Didin Hafidhuddin, *Op.Cit*, h. 94



saw, tidak pernah menerapkan zakat profesi di masa beliau masih hidup, sementara sekian jenis profesi dan spesialisasi telah ada. Bahkan sampai sekian abad kemudian, umumnya para ulama pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam kitab-kitab fiqh dalam bab khusus.

Oleh karena itu, apabila sekarang ini ada sebagian ulama yang mengatakan, bahwa tidak ada zakat profesi di dalam syariat Islam, hal ini masih bisa diterima. Sebab dasar pengambilan hukumnya memang sudah tepat, yaitu tidak diajarkan oleh Rasulullah saw dan juga tidak dipraktekkan oleh para sahabat beliau.

Hanya saja terlalu terburu-buru memvonis bahwa zakat profesi adalah bid'ah hanya karena kita tidak menemukan contoh kongkritnya di masa Rasulullah saw, karena tentunya tidak sesederhana itu masalahnya. Sebab ketika kita mengatakan sebuah perbuatan itu sebagai bid'ah, maka konsekuensinya adalah kita memvonis bahwa pelakunya adalah penghuni neraka. Masalahnya adalah apakah bisa disepakati bahwa semua fenomena yang tidak ada di masa Rasulullah itu langsung dengan mudah bisa dijatuhkan ke dalam kategori bid'ah?.

Sebab bila memang demikian, maka mengeluarkan zakat dengan beras pun, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. Sedangkan kita semua di negeri ini (Indonesia) dan di kebanyakan di negeri muslim umumnya makanan pokoknya adalah beras, makanya zakat fitrahnya adalah beras. Apakah ini juga termasuk bid'ah karena tidak berzakat dengan gandum?.

Yusuf al-Qardhawi menyebut istilah profesi dengan *kasb al-Amalwa almihana alhurrah*, yaitu setiap pekerjaan atau usaha yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain atas kemampuan, keterampilan, atau pemikiran yang dilakukan untuk orang atau badan lain dengan menerima imbalan.

Sebagian dari nama dan macam ragam sumber harta kekayaan tersebut merupakan rincian atas pengertian *amwal* dalam

beberapa ayat Alquran dan penjabaran dari firman Allah, surah al-baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dalam ayat tersebut di atas, terdapat kata *min thayyibat ma kasabtum* yang berarti hasil usaha yang baik-baik dari segi kualitasnya dan dari segi prosedur memperolehnya.

Beberapa ulama kontemporer, seperti Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khallaf dan Abdurrahman Hasan telah membahas prospek perkembangan macam-macam harta yang wajib dizakati pada abad modern sekarang ini. Dalam seminar internasional yang diadakan di Damascus tahun 1952 menghasilkan fatwa, bahwa kekayaan dan penghasilan yang diperoleh dari berbagai usaha profesi, wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana ketentuan zakat mal lainnya.

Selain itu mereka juga mengatakan bahwa profesi di masa Rasulullah saw itu berbeda hakikatnya dengan profesi di masa kini. Sebab sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya bukan karena dia berprofesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang itu sudah masuk dalam kategori kaya atau tidak.

Dan memang benar bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah memungut harta dari orang kaya untuk diserahkan kepada orang miskin. Persis seperti pesan Rasulullah saw ketika mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah saw mengatakan, bahwa beritahukan kepada mereka, bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka.

Menurut kalangan pendukung zakat profesi, meski di masa Rasulullah saw ada beberapa jenis profesi, namun mereka tidaklah termasuk orang kaya dan penghasilan mereka tidak besar. Maka oleh Rasulullah saw, mereka pun tidak dipungut zakat. Sebaliknya, di masa itu yang namanya orang kaya identik dengan pedagang, petani atau peternak atau mereka yang memiliki simpanan emas dan perak. Maka kepada mereka inilah dikenakan zakat. Meski demikian, jelas tidak semua dari mereka itu pasti kaya, karena itu ada aturan batas minimal kepemilikan atau yang kita kenal dengan nishab. Oleh Rasulullah saw, nishab itu lalu ditentukan besarnya untuk masing-masing pemilik kekayaan dan sudah bisa dipastikan bahwa kalangan pekerja profesional di masa itu tidak akan pernah masuk dalam daftar orang kaya.

Lain halnya dengan masa sekarang ini. Yang disebut sebagai profesional di masa kita hidup ini, bisa jadi orang yang sangat kaya dan teramat kaya. Jauh melebihi kekayaan para petani atau peternak. Bahkan di negeri ini, yang namanya petani dan peternak itu sudah dipastikan miskin, sebab mereka tertindas oleh sistem yang sangat tidak berpihak kepada mereka.

Kalau para petani yang setiap hari mencangkul sawah membanting tulang, memeras keringat dan ketika panen, hasilnya tidak cukup untuk membayar hutang kepada rentenir itu diwajibkan membayar zakat, sementara tetangganya adalah seorang yang berprofesi sebagai pengacara kaya raya itu tidak wajib bayar zakat, di manakah rasa keadilan kita?. Padahal para pengacara itu sekali didatangi kliennya bisa langsung mengantongi 100 atau 200 juta. Di

lain tempat ada peternak yang miskin, hidup berdampingan dengan tetangganya yang konsultan ahli yang sekali memberi *advice* bisa mengantongi ratusan juta, tentu saja rasa keadilan itu terusik.

Semua penghasilan melalui kegiatan profesional, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Q.S al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Imam al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Tafsir al-Munir menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat tentang makna *haqqun* adalah ukuran yang telah diketahui secara syara' yaitu zakat. Hal ini juga diperkuat oleh ibn al-Araby dan al-Jashash. Muhammad ibn Sirin dan Qatadah mengatakan bahwa kata *haqqun* dalam ayat tersebut bermakna zakat wajib.<sup>61</sup>

Para peserta muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 30 april 1984 telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan di atas, Didin Hafidhuddin menyimpulkan, bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang terkait dengan orang lain, seperti seorang pegawai atau karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Menurutny, kesimpulan ini antara lain berdasarkan beberapa hal, yaitu:

---

<sup>61</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 14, h. 18

- 2.) Ayat-ayat Alquran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
- 3.) Berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah –istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwal* , sementara sebagian yang lain secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-mal al-mustafad*, seperti terdapat dalam fiqih zakat dan *al-fiqh al-islamy wa adillatuh*.
- 4.) Dari sudut keadilan, yang merupakan ciri utama ajaran Islam, bahwasanya penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional.
- 5.) Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif terhadap perkembangan zaman.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, maka zakat yang berasal dari *al-mal al mustafad* ini sudah disepakati oleh jama'ah sahabat dan ulama-ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat. Perbedaan pendapat hanya tentang persyaratan *haul*.

- a. Menurut Abu Hanifah, *mal mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna satu tahun di tangan pemiliknya, kecuali apabila pemiliknya mempunyai harta sejenis yang pada permulaan tahun sudah mencapai satu nishab, maka *mal mustafad* itu dipungut zakatnya bersamaan.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h.95-96

- b. Menurut Imam Malik, *mal mustafad* tidak dizakati sebelum sempurna setahun, baik sipemilik mempunyai harta yang sejenis, kecuali tentang ternak.
- c. Menurut Imam Syafi'i *mal mustafad* ini tidak dizakati sebelum setahun, meskipun sipemilik mempunyai harta yang sejenis, kecuali anak ternaknya sendiri, maka *mal mustafad* yang berupa anak ternaknya sendiri dizakati mengikuti induknya.
- d. Menurut Daud al-Zahiri, *mal mustafad* wajib zakat tanpa syarat satu tahun.
- e. Menurut Ibnu Hazm, beliau mengkritik penafsiran ulama sebelumnya, ia mengatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut tanpa dalil sama sekali. Menurut dia, semua harta itu disyaratkan setahun, baik harta *mal mustafad* maupun tidak.
- f. Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwa *mal mustafad* seperti gaji pegawai upah buruh, penghasilan dokter, pengacara, pemborong, pengusaha rental mobil, dan penghasilan lainnya wajib bagi mereka dikenakan zakat dan tidak pula disyaratkan sampai setahun, akan tetapi dizakati waktu menerima penghasilan tersebut.<sup>63</sup>

Kalau kita melihat sejarah pelaksanaan zakat profesi ini, sebenarnya telah diterapkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Usman bin Affan kemudian diterapkan secara resmi oleh khalifah Umar ibn Abdul Azis pada abad ke II H, yaitu terhadap para pejabat di lingkungan kerajaan dengan memotong gaji dan penghasilan mereka sebagai zakat.

Kewajiban zakat profesi ini didasarkan pula pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Turmuzy dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam dari ayahnya dari ibn Umar, bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya:

---

<sup>63</sup> Syechul Hadi Permono, *Op. Cit*, h. 141-142

“Siapa yang memiliki tambahan harta (*mal mustafad*) maka tidak ada kewajiban zakat baginya, hampir berlaku zakat satu tahun”.

Hadis di atas mengandung pengertian, bahwa harta kekayaan apapun bentuknya yang diperoleh secara halal, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nishab dan haul.

Dr Yusuf Qardhawi sebagai seorang ulama Mesir modern telah menggunakan istilah zakat profesi ini, meskipun sebagian ulama masih belum menerima zakat profesi ini, mengingat tidak adanya kategori itu dalam hukum fiqih. Sebagian ulama juga masih mendebatkan, hendak dinisbahkan kepada jenis zakat apa gerangan zakat profesi itu, apakah dinisbahkan pada zakat perdagangan yang tarifnya 2,5% atau dinisbahkan pada zakat pertanian yang dikeluarkan 5%-10% atau malah dinisbahkan kepada zakat pertambangan yang besar zakatnya sampai 20%. Sebagaimana pendapat Prof . Amin Rais yang pernah melontarkan pendapatnya, bahwa zakat profesi tertentu seperti akuntan, dokter, pengacara, profesi yang lebih mudah memperoleh penghasilan atau pendapatan yang tinggi harus dikenakan zakat 20%, karena mereka itu seperti menambang emas.

Mengenai kadar ketentuan zakat profesi ini ditetapkan sebanyak 2,5% atau senilai 94 gram emas murni, sesuai ketentuan Instruksi Menteri Agama RI No 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat.

Menurut Dawam Raharjo, bahwasanya zakat profesi ini tergantung dari produktifitas bidang pekerjaan tersebut, lebih tepat jika dianalogikan dengan zakat pertanian, sebab sifat pekerjaan sama dengan industri, dalam arti keduanya sama-sama memproduksi sesuatu, bahkan industri lebih produktif dari pertanian.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 540.

Mengenai zakat profesi ini, menurut penulis erat kaitannya dengan zakat progresif, yang jika dihubungkan dengan pajak sama artinya dengan pajak pertambahan nilai. Implikasinya di sini dalam hubungannya dengan zakat adalah, jika seseorang yang mempunyai profesi tertentu yang biasanya zakat dikeluarkan 2,5%, maka jika pendapatannya dari usaha profesi itu mengalami peningkatan, maka seharusnya dana zakat yang harus dikeluarkan muzakkiy tersebut juga harus lebih banyak dari sebelumnya, katakanlah meningkat yang tadinya 2,5% menjadi 5-10%.

Jadi di sini tergantung dari masyarakat yang mempunyai profesi tersebut, apakah ia mempunyai pemahaman mengenai zakat itu tinggi dan juga tergantung dari keyakinan dan pertimbangan rasionalnya, apakah tarif zakat untuk dirinya harus dikeluarkan 5% atau 10%. Karena itu da'wah atau informasi yang disampaikan di lingkungan masyarakat ini perlu bersifat analitis dan kiranya jangan hanya bersifat dogmatis.

Dalam era laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sekarang ini, tampak kecenderungan dari berbagai jenis mata pencaharian utama, seperti pertanian dan peternakan semakin menurun, karena sebagian lahan pertanian sudah beralih fungsi menjadi sentra produksi, pemukiman baru, mall, hotel-hotel, jalan raya dan sebagainya.

Dengan demikian, beberapa jenis sumber daya dan mata pencaharian yang menjadi sumber primadona penerimaan zakat konvensional selama ini terasa semakin langka, digantikan oleh sumber-sumber mata pencaharian dan berbagai bentuk dunia usaha baru dalam berbagai lapangan keahlian dan profesi. Tidaklah adil, jika harta benda dan kekayaan yang sangat potensial yang merupakan lapangan pekerjaan sebagian besar manusia dewasa ini, jika tidak dikenakan kewajiban zakat. Dengan demikian penghasilan dan harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha profesi modern ini, harus dijadikan sebagai



## Jenis harta yang Wajib Dizakati

sumber primadona penerimaan zakat untuk masa sekarang dan masa mendatang.



### BAB III

## KELOMPOK PENERIMA ZAKAT

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. at-Taubah ayat 60)

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang

berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain<sup>65</sup>. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

#### A. Al-Fuqara (Orang-orang Fakir)

Kata *fuqara* adalah bentuk jamak dari kata fakir, yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan, tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya.

Adapun orang-orang yang meminta-minta disebut juga dengan fakir dan termasuk dalam pengertian ini adalah gelandangan. Nama fakir itu mencakup *sa'il* dan *mahrum*. pengemis. Sedangkan *mahrum* adalah orang fakir yang tidak mau meminta-minta, karena menjaga kehormatan dirinya, dan ia disebut dengan miskin. Mengenai kata *sail* dan *mahrum*, hal tersebut terdapat dalam surah az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

“Dan pada harta-harta mereka, ada hak orang yang meminta dan tidak meminta.”

#### B. Miskin

Adapun pengertian *miskin* adalah orang yang mempunyai kekayaan melebihi dari apa yang dipunyai oleh prang fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya bisa menutupi setengah lebih sedikit dari kebutuhannya.<sup>65</sup>

Memang kalau kita tinjau dari segi sama-sama berhajat dan membutuhkan, antara fakir dan miskin tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya pada intensitasnya. Fuqara dan miskin adalah mereka yang berhajat, yang tidak mencukupi kebutuhan hidup.

---

<sup>65</sup> Mansur Ali Nashif, At Tajhul Jami' Lil Ushul Fi Haditsir Rasul, Cet IV, Mesir, Cairo, al-Babi al-Halabi, h.29

### **C. Al-Amilin**

*Amilin* adalah jamak dari kata *amil*. Imam Syafi'i mengatakan, bahwa *amilin* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemiliknya-pemiliknya, yaitu para *sai'* (orang-orang yang datang ke daerah-daerah untuk memungut zakat).<sup>66</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang mengangkat para *amil* tersebut adalah imam atau kepala negara.<sup>67</sup>

Termasuk dalam kategori *amilin* adalah orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, pendayagunaan dan segala sesuatu yang terkait dengannya.<sup>68</sup>

### **D. Al-Muallaf Qulubuhum**

*Al-Muallafah Qulubuhum* adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat, dan bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.

Menurut Sayyid Sabiq dan Yusuf al-Qardhawi, mereka membagi para muallaf itu menjadi dua golongan, yaitu golongan orang muslim dan non muslim.

### **E. Ar-Riqab**

*Ar-Riqab* menurut golongan Syafi'i dan Hanafiah adalah budak mukatab yaitu budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya dari tuannya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

Adapun menurut jumhur Ulama, yang dimaksud budak di sini adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan, meskipun mereka telah

---

<sup>66</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Mesir :, tt.tp, h.61

<sup>67</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhuz Zakah*, Jilid 1, Kuwait: Darul Bahrn, 1388 H, h.112

<sup>68</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhuz zakah*, Op.Cit, h. 579

berusaha keras dan bekerja mati-matian. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk memberi zakat kepada mereka, agar dapat memerdekakan dirinya.

Yusuf al-Qardhawi, mengembangkan pengertian *riqab* tidak hanya pada pengertian di atas, akan tetapi sesuai dengan perkembangan sosial politik. Sehingga ia mengembangkan pengertian *riqab* itu kepada pemerdakaan tawanan muslim di bawah kekuasaan fakir. Demikian juga al-Qardhawi, Rasyid Ridha, dan Syaltut, mengembangkan pengertian *riqab* ini kepada pemerdakaan bangsa yang terjajah oleh kolonialis, karena semuanya sama-sama mengandung sifat perbudakan.

#### ***F. Al-Gharimin***

*Al-Gharimin* adalah kata jamak dari *al-Gharim*, yaitu orang yang berhutang yang tidak dapat melunasi hutangnya.<sup>69</sup>

Dilihat dari segi motivasinya, *gharim* menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad ada dua macam, yaitu :

- a. Berhutang untuk kepentingan pribadi di luar maksiat.
- b. Berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum)

Jadi *gharim* pada dasarnya adalah orang yang berhutang dalam hal yang tidak bersifat pemborosan. Kepala negara, harus membayar hutangnya yang diambilkan dari Baitul Mal.<sup>70</sup> Baitul Mal kalau kita kondisikan dengan keadaan sekarang bisa berarti perbendaharaan negara atau lembaga keuangan negara.

#### ***G. Sabilillah***

*Sabilillah* dalam kitab *al-Bada'i* diterangkan bahwa *fi sabilillah* adalah semua pendekatan diri kepada Allah, jadi masuk

---

<sup>69</sup> Abdul Khaliq an-Nawawi, an-Nizam al-Malifil Islam, Mesir : Al-Matba'ah al Fanniyah al-hadis, 1971, h. 109

<sup>70</sup> Yusuf al-Qardhawi, Op.Cit, h. 623

dalam pengertian ini adalah tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Allah dan jalan-jalan kebaikan.<sup>71</sup>

Dalam tafsir al-Manar, diterangkan juga bahwa *sabilillah* itui mencakup kemaslahatan syari'ah secara umum, yang mencakup urusan agama dan negara.<sup>72</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, Sabilillah adalah jalan menuju kepada kerelaan Allah, baik tentang ilmu, maupun mal perbuatan.<sup>73</sup> Ada tiga pandangan mengenai sabilillah, yaitu ;

- 1) Mempunyai arti pertahanan dan keamanan Islam.
- 2) Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam.
- 3) Mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum, jalan menuju ridha Allah meliputi semuanya itu, baik masalah kemaslahatan agama dan masyarakat. Adapun menurut istilah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya.

#### **H. Ibnu Sabil**

*Ibnu sabil* menurut jumhur Ulama adalah orang yang sedang melakukan perjalanan, yaitu orang-orang bepergian (musafir) untuk melakukan suatu hal yang baik atau ketaatan kepada Allah SWT. Dia (ibnu sabil) diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya, jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan tersebut adalah melaksanakan ibadah haji atau orang yang berperang di jalan Allah yang kehabisan bekal.

---

<sup>71</sup> Ibnu Abidin, Muhammad Amin, Raddul-Mukhtar alaad-Duril-Mukhtar, Mesir, Al-Amirah, 1307 H, h. 343

<sup>72</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir Quranul Karim*, Cet 1, Mesir :Al-manar, 1353 H, h. 124

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 124



## BAB IV

### SEJARAH PENGELOLAAN ZAKAT

#### A. Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Ajaran tersebut berasal dari pemerintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya sebagaimana yang terdapat dalam Alquran, surah at-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Demikian juga petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah saw kepada Muaz bin jabal ketika diutus ke Yaman untuk menjadi gubernur, agar dapat memungut zakat dari orang-orang kaya kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin.

Ibadah zakat itu tidak sekedar amal karitatif (kedermawanan), akan tetapi ia juga sebagai kewajiban otoritatif



(ijbari).<sup>74</sup> Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa, dan haji yang telah dibakukan dengan nash yang penerapannya hanya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, sedangkan zakat itu selain dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT juga dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, karena itu pengalamannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah lain. Untuk itu perlu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar hak-hak para asnaf delapan golongan, terutama fakir miskin dalam harta orang kaya dapat diterimanya dengan pasti, demi tegaknya keadilan. Untuk itu demi terlaksananya ibadah zakat, ditetapkan pula sanksinyabagi mereka yang enggang membayar zakat.

Sanksi terhadap pembangkang ibadah zakat sangat tidak sama dengan pembangkang ibadah-ibadah lainnya yang hanya bersifat ukhrawi dan preventif, akan tetapi pembangkang ibadah zakat dapat dikenakan saksi di dunia dan di akhirat, karena pembangkang zakat ini telah melakukan kesalahan ganda pula, yaitu kepada Allah dan kepada orang-orang yang mempunyai hak dalam hartanya itu.

Justru itu pelaksanaan zakat itu mutlak ditangani oleh pemerintah melalui suatu lembaga khusus (amil zakat) yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.<sup>75</sup>

Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan, yaitu :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan lansung dengan wajib zakat (muzakki).

---

<sup>74</sup> Arif Abdul Fatah Thabarah, *Ruh al-Din al Islami, Dar al-Ilmy al-Malayiin*, Cet VII, Beirut, 1996, h. 333

<sup>75</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*, Cet II, Maktabah Wahbah, Mesir, 1975, h. 85

3. Untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.<sup>76</sup>

Sebaliknya jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap wajib zakat, maka nasib dan hak orang fakir, miskin, dan mustahiq lainnya pada orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.

Azas operasionalisasi dan pelaksanaan zakat seperti dikemukakan di atas tidak mengabaikan sifat dan kedudukan zakat itu sendiri sebagai ibadah mahdhah yang harus dilaksanakan atas dasar kesadaran, keikhlasan dan ketakwaan seseorang kepada Allah SWT. Dengan demikian azas ikhlas dan sukarela tetap dominan dalam pelaksanaan dan penerapan zakat sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan pemerintah Islam di belakangnya.

Untuk mengetahui bagaimana model operasionalisasi dan penerapan zakat pada masa klasik Islam, secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

a. Masa Rasulullah saw

Syariat zakat baru diterapkan secara efektif pada tahun kedua Hijriyah. Ketika itu nabi Muhammad saw mengembang dua fungsi, yaitu sebagai Rasulullah dan juga sebagai pemimpin umat. Zakat juga pada waktu itu mempunyai dua fungsi, yaitu ibadah bagi muzakky dan sumber utama pendapatan negara. Dalam pengelolaan zakat ini, Rasulullah sendiri turun tangan memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya.

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw dan yang kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari muzakki atau muzakki sendiri

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 90

secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul-Mal, lalu para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para mustahiq yang tergabung dalam delapan kelompok penerima zakat.

Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, Rasulullah menugasi para sahabatnya sebagai amil zakat. Para Amil yang diangkat oleh Rasulullah di bagi 2 bagian, yaitu:

1. Amil yang berdomisili di kota Madinah, dimana statusnya bersifat sementara untuk membantu Rasulullah dalam pengumpulan zakat dan menyalurkannya. Mereka tidak digaji, hanya kadang-kadang diberi honor sebagai balas jasa mereka. Di antara amil tersebut adalah Sayyidina Umar bin Khatab.
2. Amil yang bertugas di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai pemerintah daerah sekaligus sebagai amil zakat. Sebagai pejabat mereka diberi tunjangan tertentu sesuai tugasnya, agar mereka tekun serta ikhlas melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.<sup>77</sup>

Pada masa Rasulullah saw, masalah pengorganisasian pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk organisasi yang sederhana, namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh faktor manusia (SDM)nya, karena amil pada waktu itu adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat, lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Salim pun mengelolanya sehingga ia mampu memberikan sedekah dari usaha tersebut. Sejarah tersebut menjadi tonggak awal bagaimana mengelola zakat sehingga menjadi sesuatu yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para mustahiqnya.

---

<sup>77</sup> Muh. Qutub, *Qabasatun Minar Rasuli*, Cet II, Mesir :Maktabah Wahbah, 1962, h. 256

Para petugas yang ditunjuk oleh Nabi dibekali dengan petunjuk-petunjuk teknis operasional dan bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Nabi beserta keluarga dalam hal ini tidak dibenarkan oleh syara' sebagai penerima zakat.<sup>78</sup>

b. Masa Khalifah Abu Bakar (51SH-13H/573-634M)

Khalifah Abu Bakar melanjutkan tugas Rasulullah, terutama tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam mengembangkan ajaran agama Islam, termasuk menegakkan syari'at zakat yang telah diterapkan sebagai sendi atau rukun Islam yang penting.

Beliau diangkat sebagai khalifah untuk melanjutkan tugas Rasulullah, karena dialah sahabat Rasulullah yang pertama kali beriman, banyak merasakan kesulitan dan penderitaan bersama Rasul, selain itu beliau banyak menafkahkan hartanya untuk dakwah, mendampingi Rasul saw saat perjalanan hijrah, saat berada di gua Tsur, dan masih banyak kejadian-kejadian penting dimana khalifah Abu Bakar selalu bersama Rasulullah.

Khalifah Abu Bakar memandang masalah zakat adalah masalah serius, karena fungsi zakat sebagai pajak dan sumber utama pendapatan negara. Pada masanya ini menjalankan tugas penanganan zakat itu selalu berpedoman pada kebijakan yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Di samping itu Khalifah Abu Bakar secara implisit berpedoman pula pada sebuah hadis Nabi Muhammad saw yang artinya: "Aku (Rasulullah) diperintahkan memerangi suatu golongan umat manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat".

Hadis diatas merupakan landasan teoritik dan operasional yang dijelaskan Nabi Muhammad saw, meskipun Nabi sendiri di

---

<sup>78</sup> Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Thayyar, *al-Zakah wa Tathbigatuha al Muashirah Dar al-Wathan*, Cet II, Riyadh, 1414 H, h.36

masa hidupnya tidak pernah melakukan tindakan tugas memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, karena tidak menemukan tantangan seperti yang disebutkan pada hadis tersebut, khususnya orang Islam yang menentang kewajiban membayar zakat. Akan tetapi pada awal pemerintahan Abu Bakar timbul suatu golongan yang tidak mau membayar zakatnya. Maka khalifah Abu Bakar dengan berdasar hadis di atas, mengambil suatu kebijakan bahwa golongan yang tidak mau lagi membayar zakat itu dihukum murtad, maka mereka boleh diperangi.

Khalifah Abu Bakar tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dalam pembagian zakat di antara kaum muslimin yang berhak menerimanya. Beliau biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat. Diriwayatkan dari Baihaqi bahwa Aslam ra mengatakan, “Ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, ia menetapkan persamaan hak di dalam pembagian zakat di antara anggota-anggota masyarakat. Ketika ada usulan untuk menyerahkan pilihan kepada kaum Muhajirin dan Anshar, Abu Bakar menjawab, “Aku memandang seseorang dalam kaitannya dengan urusan dunia. Oleh karena itu lebih baik menyamaratakan mereka dari pada menyerahkan pilihan kepada mereka.

Khalifah Abu Bakar dikenal sangat hati-hati dalam masalah harta. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari, beliau tidak mau mengambil dana dari Baitul Mal. Hanya setelah mendapat saran dan pendapat dari Umar bin Khatab. Karena itulah khalifah Abu Bakar selama dua tahun berkuasa mendapat tunjangan dari negara, akan tetapi ketika menjelang ajalnya, santunan yang diberikan selama menjabat sebagai khalifah dikembalikan lagi ke kas negara, yang waktu itu dikenal dengan Baitul Mal.

Khalifah Abu Bakar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat ini, beliau langsung turun tangan dan mengangkat beberapa petugas (amil zakat) di seluruh wilayah kekuasaan Islam waktu itu, sehingga pemungutan dan penyaluran harta zakat berjalan dengan

baik. Harta-harta zakat yang dipungut pada waktu itu segera didistribusikan langsung kepada golongan yang berhak menerimanya, agar tidak sampai menumpuk di Baitul Mal. Bagian yang menjadi haknya sebagai amil hanya diambil sekedarnya saja.<sup>79</sup>

c. Masa Khalifah Umar bin Khatab (13-23H/634-644M)

Setelah khalifah pertama Abu Bakar meninggal, maka kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh khalifah Umar bin Khatab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khatab bin Nufail al-Quraissy al-Adawi. Pada masa khalifah Abu Bakar dia ditugasi menjadi hakim, sekaligus merupakan hakim pertama dalam Islam. Keadilannya dijadikan sebagai bahan rujukan dalam sejarah. Beliaulah yang pertama menggunakan kelender Hijriah sebagai sistem penanggalan Islam .

Pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab selama 10 tahun, di berbagai wilayah (propinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, kaum muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru, buktinya tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman.

Abu Ubaid menuturkan bahwa Muadz pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Khalifah Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun Khalifah Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Khalifah Umar kembali menolaknya, dan berkata” Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti. Saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga.”Muadz menjawab, “Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepada Anda.”

---

<sup>79</sup> Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, *al-Zakah wa Tathbigatuha al-Mu'ashirah Dar al-Wathan*, Cet II, Riyadh, 1414 H, h. 84-85.

Pada tahun kedua Hijriah, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada khalifah Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ke tiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, tetapi khalifah Umar juga mengembalikannya.

Dalam beberapa tahun saja, sistem ekonomi Islam yang adil telah sukses meraih keberhasilan yang fantastis. Namun demikian, keadilan ini tidak hanya berlaku untuk rakyat yang Muslim, tetapi juga untuk yang non Muslim. Keadilan adalah untuk semua, tidak ada diskriminasi atas dasar agama dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab.

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab ini, banyak negeri yang telah ditundukkan, maka banyak harta yang masuk ke kas Khilafah Islamiyah melalui lembaga Baitul Mal. Karena banyaknya harta yang mengalir ke Madinah, maka Khalifah Umar bin Khatab membangun rumah-rumah tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staff yang bekerja di lembaga Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khatab sangat hati-hati dengan masalah pemasukan dan pengeluaran keuangan di Baitul Mal dan menyerahkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya.

Pada masa Khalifah Umar bin Khatab, masalah pengelolaan zakat ini makin diintensifkan, sehingga penerimaan harta zakat makin meningkat, karena semakin banyak jumlah para wajib zakat dengan pertumbuhan dan perkembangan umat Islam di berbagai wilayah yang ditaklukkan.

Perhatian Khalifah Umar terhadap pelaksanaan zakat sangat besar. Untuk itu ia selalu mengontrol para petugas amil zakat dan mengawasi keamanan gudang penyimpanan harta zakat, khususnya harta-harta yang dzahir. Untuk itu beliau tidak segan-segan mengeluarkan ancaman akan menindak tegas petugas (amil) yang lalai atau menyalah gunakan harta zakat.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab ini, organisasi pengelolaan zakat dibentuk atas empat bagian, yaitu :

1. Katabah atau Hasabah. Bagian ini yang melakukan registrasi tentang siapa-siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Selain itu ia bertugas pula untuk mendaftar dan menghitung zakat yang diterima.
2. Jubaah atau hasyarah. Bagian ini yang melakukan penagihan dan pengumpulan zakat dari daftar registrasi.
3. Qasamah. Bagian ini yang mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak sesuai daftar yang diperoleh dari bagian katabah.
4. Khasanah. Bagian ini yang menjaga dan memelihara harta zakat yang tersisa.

Jadi pengelolaan zakat pada masa beliau, sudah ada pembagian tugas yang rapi sehingga mereka saling mengontrol antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena lembaga ini sebagai pemegang amanah ummat, sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan kepada publik atau masyarakat secara terbuka atau transparan.

d. Khalifah Usman bin Affan (24-36 H/644-656M)

Khalifah Usman mempunyai nama lengkap Utsman Ibn Affan Ibn al'Ash Ibn Umayyah Ibn Ka'ab Ibn Luay Ibn Ghalib Ibn al Quraisy al Umawiy, beliau termasuk golongan al-Sabiqun al-Awwalun dalam memeluk Islam dan Khifah ketiga setelah Umar bin Khatab ra.

Pribadi Usman dikenal dengan kesederhanaannya, lemah lembut dan santun. Menurut suatu riwayat, dia menggunakan sebagian besar kekayaannya untuk kepentingan Islam, membekali umat Islam dengan 950 unta, 50 kedelai, dan 100 dirham dalam ekspedisi yang dipersiapkan Nabi untuk melawan pasukan Byzantium yang berkumpul di perbatasan Palestina.

Pada waktu Usman bin Affan dibai'at jadi khalifah, dia sudah berumur 70 tahun dengan masa pemerintahannya yang berlangsung sekitar 12 tahun. Pada dasarnya, masa pemerintahannya



dapat dibagi menjadi dua periode, yaitu enam tahun pertama dan enam tahun kedua.

Pada periode pertama, pemerintahan Usman mengalami kemajuan dan kesuksesan. Di antara kemajuan yang dia capai adalah perluasan imperium Islam sampai ke Asia dan Afrika. Bahkan boleh dikata Usmanlah sebagai pelopor perluasan Islam pertama yang kemudian diteruskan Bani Umayyah sampai ke Eropa dan mengungguli kekuasaan Byzantium. Dia juga berhasil memadamkan pemberontakan orang-orang Persia.

Pada masa pemerintahan Khalifah Usman ini, penerimaan zakat makin meningkat lagi, sehingga gudang Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Untuk itu Khalifah sekali lagi memberi wewenang kepada para wajib zakat untuk atas nama Khalifah menyerahkan sendiri zakatnya langsung kepada yang berhak.<sup>80</sup>

Sebagaimana Khalifah sebelumnya yang mempunyai perhatian besar terhadap pelaksanaan zakat, maka demikian juga halnya dengan beliau, bahkan harta dia sendiri tidak sedikit dikeluarkannya untuk kepentingan negara. Beliau dikenal sebagai orang yang dermawan dan memiliki kekayaan pribadi yang banyak sebelum menjadi khalifah.

Bagi Khalifah Usman, urusan zakat ini demikian penting, untuk itu dia mengangkat pejabat yang khusus menangani masalah zakat ini, yaitu Said ibn Tsabit, sekaligus mengangkatnya untuk mengurus lembaga keuangan negara (Baitul Mal).

Pelaksanaan pemungutan zakat dan pendistribusiannya semakin lancar dan meningkat. Harta zakat yang terkumpul segera dibagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga hampir tidak terdapat sisa harta zakat yang tersimpan di dalam Baitul Mal. Memang pernah suatu ketika, Khalifah mengadakan inspeksi mendadak memeriksa Baitul Mal. Ketika itu ditemukan saldo kas sebanyak seribu dirham, yaitu sisa setelah dilakukan pembagian kepada seluruh asnaf yang berhak. Khalifah Usman waktu itu

---

<sup>80</sup> *Ibid*, h. 50

lansung memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menyalurkan sisa saldo ini ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, termasuk untuk biaya pembangunan dan ta'mir masjid Rasulullah.

e. Khalifah Ali bin Abi Thalib (35 H-40 H/656 M-661 M)

Nama lengkap Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib Al-Hasyimi Al-Quraisyi. Beliau adalah khalifah ke empat menggantikan Khalifah Usman bin Affan, dia juga termasuk orator terbesar dan ahli hukum Islam, pernah menjadi komandan dalam perang jamal, perang shiffin, dan masih banyak lagi perang –perang penting dalam Islam.

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Thalib, ia menghadapi persoalan yang sangat kompleks, yaitu masalah politik dan perpecahan dalam masyarakat sebagai akibat terjadinya pembunuhan atas diri Khalifah Usman bin Affan.

Meskipun dalam situasi politik yang goncang itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap mencurahkan perhatiannya yang besar dalam menangani masalah zakat yang merupakan urat nadi pemerintahan dan agama, bahkan pada suatu ketika ia sendiri yang turun tangan lansung mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Dalam penerapan dan pelaksanaan zakat, Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu mengikuti kebijaksanaan khalifah-khalifah pendahulunya. Harta zakat yang sudah terkumpul ia perintahkan kepada petugas (amil) supaya segera membagi-bagikannya kepada yang berhak yang sangat membutuhkannya, dan jangan sampai terjadi penumpukan harta zakat dalam Baitul Mal.

Setelah membagikan harta zakat itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib nampak lega dan lansung shalat sunat sebagai tanda syukurnya, karena telah melaksanakan tugas yang berat itu, tanpa terpengaruh sedikit pun oleh godaan melihat harta zakat yang melimpah ruah.

f. Khalifah Umar bin Abdul Azis (99 H-102 H/ 818-820 M)

Dalam periode Daulah Bani Umayyah yang berlangsung hampir sembilan puluh tahun (41-127 H), tampil seorang khalifah yang terkenal, yaitu Umar bin Abdul Azis. Dia terkenal karena kebijaksanaan dan keadilannya serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilan dalam penanganan zakat, sehingga dana zakat melimpah ruah dalam Baitul Mal sampai menimbulkan kesulitan bagi petugas Amil zakat mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat tersebut.

Khalifah Umar bin Abdul Azis tidak jauh berbeda dengan Khalifah Umar bin Khatab. Meskipun masa kekhalifahannya cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun, umat Islam akan terus mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil mensejahterakan rakyat.

Kemakmuran yang dirasakan masyarakat waktu itu, hampir di seluruh wilayah kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Azis, meliputi Afrika, Irak, Basrah, dan beberapa wilayah lainnya.

Mungkin indikator kemakmuran yang ada ketika itu sulit akan terulang kembali, yaitu ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan-perkampungan Afrika, tetapi mereka tidak menemukan seseorang pun yang mau menerima zakat. Negara pada waktu itu benar-benar mengalami surplus, bahkan sampai ke tingkat di mana utang-utang pribadi dan biaya pernikahan warga pun ditanggung oleh negara.

Sebenarnya Umar bin Abdul Azis menyadari dengan baik, bahwa ia adalah bagian dari masa lalu. Ia tidak mungkin sanggup melakukan perbaikan dalam kehidupan negara yang luas kecuali kalau ia berani memulainya dari dirinya sendiri, kemudian melanjutkannya pada keluarga dan selanjutnya pada keluarga istana yang lebih besar. Oleh karena itu, maka dia mengatur beberapa langkah, di antaranya sebagai berikut ;

*Pertama*, membersihkan diri sendiri, keluarga, dan istana kerajaan. Dengan tekad itulah ia memulai sebuah reformasi besar yang abadi dalam sejarah. Begitu selesai dilantik, Umar segera memerintahkan mengembalikan seluruh harta pribadinya, baik berupa uang maupun barang ke kas negara, termasuk seluruh pakaiannya yang mewah. Ia juga menolak tinggal di istana, ia lebih memilih menetap di rumahnya. Pola hidupnya berubah secara total, menjadi seorang zahid yang hanya mencari kehidupan akhirat yang abadi.

Setelah selesai dengan diri sendiri, ia melangkah kepada keluarganya. Ia memberikan dua pilihan kepada istrinya, “Kembalikan seluruh perhiasan dan harta pribadimu ke kas negara atau kita bercerai”, kata Umar, akan tetapi istrinya Fatimah binti Abdul Malik, memilih ikut bersama suaminya dalam kafilah reformasi tersebut. Hal yang sama juga dilakukan kepada anak-anaknya untuk tidak lagi menikmati makanan enak dan lezat.

Selanjutnya Khalifah Umar bin Abdul Azis melangkah ke istana dan keluarga istana. Ia memerintahkan menjual seluruh barang-barang mewah yang ada di istana dan mengembalikan harganya ke kas negara. Setelah itu ia memulai mencabut semua fasilitas kemewahan yang selama ini diberikan kepada keluarga istana, satu persatu dan perlahan-lahan.

Langkah pembersihan diri, keluarga dan istana ini telah meyakinkan publik akan kuatnya political will untuk melakukan reformasi dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pemberian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sang pemimpin telah menunjukkan tekadnya dan memberikan keteladanan yang begitu menakjubkan.

*Kedua*, penghematan total dalam penyelenggaraan negara. Langkah ini jauh lebih muda dibanding langkah pertama, karena pemerintah telah menunjukkan kredibilitasnya di depan publik melalui langkah pertama. Tapi dampaknya sangat luas dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi ketika itu.

*Ketiga*, melakukan redistribusi kekayaan negara secara adil. Dengan melakukan restrukturisasi kekayaan negara secara adil. Dengan melakukan restrukturisasi organisasi negara, pemangkasan birokrasi, penyederhanaan sistem administrasi, pada dasarnya Umar telah menghemat belanja negara dan pada waktu yang sama, mensosialisasikan semangat bisnis dan kewirausahaan di tengah masyarakat.

Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan objek penerima zakat (*mustahiq*), sesungguhnya mempunyai arti bahwa zakat adalah bentuk subsidi langsung. Zakat harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya beli mereka, secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya *demand* atau permintaan dari masyarakat yang selanjutnya mendorong meningkatnya suplai. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka produksi juga akan meningkat. Jadi pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut tapi juga dapat menjadi faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro.

Hal itulah yang kemudian terjadi di masa Umar Bin Abdul Azis. Jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara jumlah penerima zakat terus berkurang, bahkan habis sama sekali. Para amil zakat berkeliling untuk membagikan harta zakat, akan tetapi tak seorang pun yang mau menerima zakat. Artinya para *mustahiq* benar-benar habis, sehingga negara mengalami surplus. Kemudian redistribusi kekayaan negara selanjutnya diarahkan kepada subsidi pembayaran utang-utang pribadi (*swasta*) dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan kebutuhan dasar yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan negara, seperti biaya perkawinan. Suatu saat akibat surplus yang berlebih, negara mengumumkan, bahwa negara akan menanggung seluruh biaya pernikahan bagi setiap pemuda yang hendak menikah.

Tentang kepeduliannya terhadap zakat, Umar meminta dengan tegas, agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai aturan ilahi semata. Melainkan hal itu dijadikan sebagai hak bagi muslim yang miskin. Umar berkata “Allah SWT menentukan zakat dan menetapkan penerimanya.” Jadi zakat harus dikumpulkan dan dibagikan sebagaimana ditegaskan dalam Alquran dan hadis.

Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis ini, sistem dan manajemen zakat sudah mulai maju dan profesional dibanding khalifah-khalifah sebelumnya. Jenis ragam harta dan kekayaan yang dikenakan zakat sudah bertambah banyak. Yusuf al-Qardhawi menuturkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Azis adalah orang pertama yang mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa yang baik, termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai harta mustafad lainnya.

## **B. Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia, terdapat beberapa tahap sejarah, yaitu :

### **1. Sebelum kelahiran UU No 38**

#### **a. Pengelolaan Zakat di Masa Penjajahan**

Zakat sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib ditunaikan oleh umat Islam terutama yang mampu tentunya sudah diterapkan dan ditunaikan oleh umat Islam Indonesia berbarengan dengan masuknya islam ke nusantara. Kemudian ketika Indonesia dikuasai oleh para penjajah, para tokoh agama Islam tetap melakukan mobilisasi pengumpulan zakat. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran agama Islam termasuk zakat di atur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruaru 1905. Dalam pengaturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai dengan syariah Islam.

b. Pengelolaan Zakat di Awal Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat juga diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hanya menggembirakan dan menggiatkan masyarakat untuk menunaikan kewajibannya melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian dari hasil pungutan tadi dapat berlangsung menurut hukum agama.

Pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta pembentukan Baitul al-Mal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.

c. Pengelolaan Zakat di Masa Orde Baru

Pada masa orde baru, Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-Undang tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dengan surat Nomor: MA/095/1967 tanggal 5-juli 1967. Dalam surat Menteri Agama tersebut disebutkan antara lain: “Menegenai rancangan undang-undang zakat pada prinsipnya, oleh karena materinya mengenai hukum Islam yang berlaku bagi agama Islam, maka diatur atau tidak diatur dengan undang-undang, ketentuan hukum Islam tersebut harus berlaku bagi umat Islam, dalam hal mana pemerintah wajib membantunya. Namun demikian, pemerintah berkewajiban moril untuk meningkatkan manfaat dari pada penduduk Indonesia, maka inilah perlunya diatur dalam undang-undang”.

Rancangan undang-undang tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial selaku penanggung jawab masalah-masalah sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama. Kemudian pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal. Kedua PMA (Peraturan Menteri Agama) ini mempunyai kaitan sangat erat, karena Baitul Mal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat, dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat (BAZ) untuk disalurkan kepada yang berhak.

Pada tahun 1968 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ). Pada tahun yang sama dikeluarkan juga Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mal. Baitul Mal yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) tersebut berstatus yayasan dan bersifat semi resmi. PMA Nomor 4 tahun 1968 dan PMA Nomor 5 tahun 1968 mempunyai kaitan yang sangat erat. Baitul Mal itulah yang menampung dan menerima zakat yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) seperti dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 maret 1984 tentang infaq seribu rupiah selama bulan ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor 19/1984 tanggal 30 april 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama aNomor 16 tahun 1989 tentang peembinaan Zakat, Sadaqah dan Infaq yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan



pendidikan Islam dan lain-lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil zakat, infaq dan sadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang pedoman Pembinaan teknis Badan Amil zakat, Infaq dan Sadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 1988 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah.

d. Pengelolaan Zakat di Era Reformasi

Adapun era reformasi, adalah era runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Setahun setelah era reformasi tersebut, yakni tahun 1999 terbitlah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terwujudnya Undang-undang Pengelolaan Zakat Indonesia merupakan catatan yang dikenang umat Islam selama periode Presiden BJ. Habibie.

Di era reformasi, pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun

dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas), yayasan dan lembaga-lembaga lainnya.

Dalam undang-undang No 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental dibanding kondisi sebelum tahun 1970-an. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh beda di banding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh muzakki untuk membayar zakat. Mereka tidak diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam melakukan pengumpulan. Pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) . Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disahkan oleh presiden DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 November 2011 tentang Pengelolaan Zakat diundangkan oleh Menhumkam Amir Syamsuddin tanggal 25 November 2011 di Jakarta. Kemudian ditindak lanjuti tentang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya, yaitu UU No 38 Tahun 1999 . Adapun yang menjadi perbedaan UU sebelumnya, diantaranya adalah :

1. Namanya adalah UU Zakat, Infaq dan Sedekah, sebelumnya adalah UU Zakat
2. Posisi Pemerintah, dalam hal ini BAZNAS lebih tinggi dari masyarakat, yg tadinya kedudukan pemerintah dan masyarakat sejajar.
3. Hanya yang mendapat izin sj dr pemerintah yang boleh mengelola zakat, sebelumnya masyarakat dibebaskan untuk mengelola zakat.
4. Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) dibentuk oleh ormas Islam, sebelumnya LAZ dibentuk oleh masyarakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktual, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama .

BAZNAS terdiri atas 11 anggota, 8 orang berasal dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah. Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan.

Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif masyarakat. Lembaga Amil Zakat dibina dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ harus memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama atas usulan dari LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan ijin, setidaknya LAZ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial yang berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariah, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melakukan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Dalam menjalankan operasionalx LAZ dibiayai oleh hak amil dari total dana zakat yang dihimpun. Sedangkan BAZNAS operasionalnya dibiayai selain dari hak amil dan dana APBN/APBD.



## **BAB V**

### **MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, DAN SADAQAH**

#### **A. Deinis Manajemen**

Seperti banyak bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, mendefinisikan manajemen bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena itu, maka dalam kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Mary Parker Follent mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Pengertian manajemen begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada definisi yang digunakan secara konsisten oleh semua orang.<sup>81</sup>

Kata manajemen merupakan serapan dari bahasa Inggris, yakni management. Menurut Oxford Advanced Dictionary Of Current English sebagaimana dikutip Sudirman, bahwa manajemen berakar dari kata manage yang berarti control dan succeed (sukses).<sup>82</sup>

Menurut Sukarna, bahwa kata manage dalam kamus mempunyai beberapa arti, yaitu :

1. To direct and control (membimbing dan mengawasi).
2. To treat and control (memperlakukan dengan seksama).
3. To carry on business or affairs (mengurus perniagaan).

---

<sup>81</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, EPFE, Yogyakarta, cet XIV, 1999, h. 8

<sup>82</sup> Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN Press, malang, 2007, h. 71

4. To achieve one's purpose (mencapai tujuan tertentu).<sup>83</sup>

Sedangkan secara istilah, terdapat berbagai macam definisi. Abu Sinn mengutip beberapa definisi manajemen, di antaranya menurut Stonner, mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berkenaan dengan kebenaran-kebenaran universal mengenai manajemen. Dalam tataran praktik, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan skill dalam pelaksanaan.

Definisi manajemen dalam Islam, tidak terlalu jauh dari pemahaman di atas. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan.<sup>84</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu ; perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan dan pengawasan (controlling).

## **B. Manajemen ZIS**

Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen ,maka kata manajemen sendiri sama dengan pengertian pengelolaan, di mana dalam hal ini jika mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan

---

<sup>83</sup> Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 1992, h. 1

<sup>84</sup> Ahmad Abraham, Abu Sinn, *Manajemen Syari'ah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1996, h. 28

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.<sup>85</sup>

Adapun pengertian zakat itu sendiri adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Dari pengertian zakat di atas, maka ada dua istilah yang sangat berhubungan dengan zakat. Pertama, muzakki yakni orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat. Kedua adalah mustahiq yaitu orang atau badan yang berhak menerima dana zakat. Keduanya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sama sekali.

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima'iyah, yang harus dikelola secara profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apabila zakat memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Bila kita kembali ke sejarah pengelolaan zakat pada masa awal Islam, yakni pada masa Khalifah Umar bin Khatab, organisasi pengelolaan zakat pada waktu itu terdiri dari empat bagian, yaitu :

1. Katabah atau hasabah, bagian ini yang melakukan registrasi tentang siapa-siapa yang wajib mengeluarkan zakat.
2. Jubaah atau hasyarah, bagian ini yang melakukan penagihan dan pengumpulan zakat dari daftar registrasi.
3. Qasamah, bagian ini yang mendistribusikan zakat yang berhak sesuai daftar yang diperoleh dari katabah.
4. Khasanah, bagian ini yang menjaga dan memelihara harta zakat yang tersisa.

---

<sup>85</sup> Departemen Agama, *UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, h. 2



Jadi pengelolaan zakat dari dulu sudah ada pembagian tugas (division of work) yang rapi sehingga saling mengontrol antara satu bagian dengan bagian yang lain. Hal ini disebabkan karena lembaga ini sebagai pemegang amanah ummat, sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan kepada public atau masyarakat secara terbuka/transparan. Bahkan Rasulullah saw telah menetapkan kriteria atau sifat yang harus dimiliki seseorang yang mengelola lembaga atau institusi yang disingkat STAF, yaitu :

1. Siddiq, artinya jujur, bersih (clean governance).
2. Tabligh, artinya terbuka, transparan dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi.
3. Amanah, artinya dapat dipercaya dan berani bertanggung jawab.
4. Fatonah, artinya professional, memiliki skill dalam perencanaan dan penuh perhitungan.

Dengan adanya Undang-undang Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah RI No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011, maka hendaklah organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada selama ini perlu disesuaikan dengan menempatkan tenaga pengelola yang memiliki sifat STAF tadi.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Namun demikian, apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama. Akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ).

a. Manajerial Muzakki

*Pertama*, perlunya ada kerja sama antara Baznas dan lembaga pemerintah lainnya perlu ditingkatkan, dalam hal ini Baznas perlu menggandeng Departemen Keuangan. Salah satu langkah baik pemerintah, meski sangat controversial yaitu Sunset Policy untuk mendorong penambahan jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pembebasan biaya fisik luar negeri bagi pemegang NPWP dan menaikkan hingga 150% bagi yang tidak memiliki NPWP. Sehingga jumlah pemegang NPWP ini meningkat secara tajam dalam waktu yang relative singkat. Dengan penambahan ini, maka Baznas dan Depkeu dapat saling bertukar data, siapa saja pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan siapa saja pemegang NPWZ yang belum memiliki NPWP. Harapannya adalah jumlah pajak dan zakat yang dihimpun dapat bertambah secara simultan, sebagaimana yang telah dicontohkan Malaysia selama ini, sehingga keduanya dapat saling memperkuat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

*Kedua*, memperkuat database muzakki dan mustahiq dengan lebih baik. Ini adalah kelemahan umum dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Sering kali lembaga pengelola zakat tidak memahami urgensi memiliki data base yang baik, serta kurang memahami data-data apa saja yang harus dikumpulkan dan dimilikinya. Karena itu, penulis memandang perlu diciptakannya *blue print* pengembangan database yang terstandardisasi, sehingga akan tercipta data secara nasional yang sama. Misalnya, di samping data jumlah muzakki, mustahiq dan penghimpun zakat (Amil), juga perlu dipikirkan keberhasilan/kegagalan program zakat melalui pengembangan indeks-indeks kinerja program.

Data-data ini nantinya di-update secara periodik, misalkan setiap tiga bulan, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Dengan pengelolaan yang baik, maka pada sisi keilmuan, keberadaan data

tersebut akan mendorong berkembangnya riset-riset zakat secara luas dan mendalam, sehingga ilmu ekonomi syariah akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Dinamika inilah yang dibutuhkan untuk mengembangkan dunia perzakatan nasional kedepannya, sehingga segala kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan zakat dapat diperbaiki dari waktu ke waktu.

*Ketiga*, yaitu perlunya koordinasi zakat satu atap. Ada banyak keuntungan yang di dapat jika zakat dikelola satu atap. Pertama, dari sisi senergi dan koordinasi antra BAZ dan LAZ, pengelolaan zakat satu atap akan memberikan banyak kemudahan dan percepatan, sehingga potensi dan kelebihan setiap lembaga zakat yang ada dapat dioptimalkan. Kedua, dari aspek sosialisasi, akan lebih memperluas jangkauan dan cakupan wilayah sosialisasi zakat, baik secara territorial maupun berdasarkan segmen masyarakat. Baznas harus difungsikan sebagai payung yang menaungi BAZ dan LAZ yang ada. Karena itu, hal tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang zakat.

*Keempat*, adalah melakukan ekspansi zakat secara besar-besaran dengan menggarap sektor korporasi secara lebih intensif. Fatwa MUI yang mewajibkan zakat perusahaan pada siding Komisi Fatwa MUI di Padang akhir januari 2009 lalu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang selama ini, telah terjalin kerja sama dengan BUMN peduli, namun hal tersebut belumlah cukup, mengingat belum optimalnya penggalan dana zakat perusahaan, baik BUMN, BUMD maupun perusahaa-perusahaan swasta. Padahal potensi zakat perusahaan itu sangat besar setiap tahunnya. Oleh karena itu perlu dipikirkan strategi yang tepat untuk menggali potensi zakat perusahaan secara lebih mendalam.

*Kelima*, adalah mendorong kerja sama internasional antara Negara Islam dalam mengembangkan dunia perzakatan. Bagaimanapun juga, Indonesia tidak bisa sendirian. Inilah masa yang tepat untuk menumbuhkan semabgat kerja sama dan saling membantu antar komponen umat dunia. Pemerintahan tetap harus

mendorong kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat antara Baznas, Depag, dan Deplu dalam mengembangkan diplomasi zakat internasional.

b. Model Penggalangan Muzakki

1. Sistem *drive thru* berupa counter outdoor yang bisa diakses langsung oleh pemakai kendaraan.

Sepuluh tahun lalu, mungkin kita masih bertanya-tanya, kemana zakat akan dibayarkan? Lembaga amal zakat masih sangat kurang, pengelolaannya pun masih terbatas, mereka menerima lalu memberikan kepada fakir-miskin di sekitarnya. Bahkan banyak kaum muslimin bahkan memilih membayar langsung zakatnya kepada yang berhak.

Kini lembaga amal zakat bagai jamur di musim hujan. Mulai dari yang berskala kecil hingga yang berskala nasional. Pengelolaannya pun lebih tertata dan pendidikan amal pun sudah tersedia banyak. Pertanyaannya sekarang, buka lagi kemana membayar zakat, tapi bagaimana membayar zakat secara praktis? Dompot Dhuafa salah satu lembaga zakat di Indonesia, boleh dibilang terdepan dalam berinovasi soal ini. Saat ini diposisikan sebagai cermin gaya hidup yang konsumtif, lembaga ini memilih mencegah calon muzakikinya dari pintu masuknya. Lembaga ini juga menggandeng rumah makan waralaba asing yang laris dikunjungi pembeli. Langkah ini yang kemudian banyak diikuti lembaga zakat lainnya.

Selain hal tersebut di atas, Dompot Dhuafa juga membuka program *drive thru* dalam penggalangan dana zakat. Sistem ini berupa *counter outdoor* yang bisa diakses langsung oleh pemakai kendaraan. “Pengemudi tidak harus turun atau keluar dari kendaraannya, mereka bisa membayar langsung uang yang akan dizakatkan kepada petugas loket *drive thru* zakat.

Tujuan penyediaan layanan ini: *Pertama* adalah untuk mempermudah pembayaran zakat bagi muzakki yang sibuk. *Kedua*, adalah untuk mensosialisasikan zakat di kalangan pekerja dan

ketiga adalah memperkuat image bahwa Dompot Dhuafa Republika sebagai lembaga amil zakat yang professional. Selain itu tentu saja untuk memperkuat *masterpiece* Dompot Dhuafa untuk kemudahan system pembayaran zakat.

Sasaran program ini adalah para pekerja sibuk terutama para eksekutif yang potensial menjadi muzakki dan pekerja yang beraktifitas di seputar pusat-pusat bisnis.

## 2. *Road Show* ke Sekolah

Bila Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa memiliki teobosan baru dalam bentuk *drive thru*, maka Lembaga Amil Zakat Al Azhar Peduli Umat memilih melakukan *road show* ke sejumlah sekolah Al-Azhar yang ada di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor. Tujuannya selain menghimpun dana zakat, juga menumbuhkan kesadaran di kalangan generasi muda mengenai kewajiban ber zakat dan pentingnya berbagi. “ Mereka adalah penerus umat di masa mendatang,” ujar M.Anwar Sani, direktur eksekutif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-azhar peduli umat. Meski kelihatan enteng, namun dana yang dihimpun dari siswa tersebut cukup lumayan.

Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai kegiatan untuk membangkitkan motivasi siswa. Untuk tingkat TK dan SD dilakukan dalam bentuk dongeng. Sedang untuk siswa SMP/SMA dilakukan dalam bentuk motivasi berbagi. “Untuk program kedua ini ditayangkan video-video di daerah bencana yang kita lakukan sendiri, kemudian diisi games,”ujarnya. Kegiatan lainnya adalah dengan membuka gerai di sebuah pusat perbelanjaan besar di Jakarta Selatan. Pihak mal menyediakan tempat di lokasi yang strategis bagi penggalangan dana ini di akhir pekan. Cara yang dilakukan pun sama, antara lain dengan mendongeng atau aktivitas menghibur lainnya. Di akhor acara dilakukan penggalangan dana.

Terobosan lain yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat PT Garuda Indonesia, menurut Dody Muhadi ketua LAZ PT Garuda Indonesia adalah akan membuka gerai di seluruh kantor

Garuda Group, antara lain Aerowisata yang membawahi beberapa perusahaan, Angkasa Cita Sarana, Satria Fee dan Abacus Indonesia. Pihaknya juga akan membuat buku saku sebagai panduan berzakat bagi karyawan garuda. Tujuannya adalah untuk menggali potensi zakat di lingkungan Garuda.

c. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat.<sup>86</sup>

Oleh karena itu, maka dalam melakukan perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil yang ingin dicapai.
2. Yang akan melakukan.
3. Waktu dan skala prioritas.
4. Dana (capital).<sup>87</sup>

Perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Ini merupakan prinsip yang penting, karena fungsi perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.<sup>88</sup>

Faktor-faktor pokok yang perlu diperhatikan dalam suatu perencanaan, adalah :

1. Faktor manusia, baik dalam arti hukumnya, pelakunya, groupnya, masyarakatnya maupun diri pribadinya sendiri.

---

<sup>86</sup> T. Hani Handoko, Manajemen, Edisi kedua, EPFE, Yogyakarta, Cet XIV, 1999, h. 78

<sup>87</sup> Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, h.78

<sup>88</sup> Sukarna, Op.Cit, h. 10

Manusia itu jujur, akan tetapi tidak dapat dipercaya janjinya, disamping itu orang bisa jujur dan dapat dipercaya akan tetapi tidak cocok untuk tugasnya.

2. Faktor keterbatasan, bahwasanya manusia tidak bisa mengenal keadaan hari depan, bisa melihat tendensinya tetapi tidak mungkin mengetahui bagaimana kelanjutannya.<sup>89</sup>

Dengan demikian, maka dalam perencanaan zakat mutlak diperlukan beberapa hal yang dianggap penting, yaitu :

- a. Aktivitas-aktivitas berupa pengumpulan data dan informasi disertai pemikiran, apa yang hendak dicapai, mengapa harus dicapai, di mana harus dijalankan, bilamana waktunya, siapa-siapa yang menjalankan dan bagaimana cara menjalankannya.
- b. Membuat pasti segala apa yang dapat dipastikan oleh karena faktor-faktornya berada di tangan.
- c. Menentukan dan merumuskan segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi dari pada badan usaha/unit organisasi.

Dan dalam penyusunan perencanaan strategis kelembagaan zakat diperlukan empat unsur utama, yaitu:

- a. Tujuan yang jelas.
- b. Fakta-fakta, yaitu apa yang terdapat sekarang yang merupakan lanjutan dari yang telah ditentukan masa lampau.
- c. Perkiraan hari.
- d. Serangkaian perbuatan dan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan upaya pencapaian tujuan.

Jadi, perencanaan zakat pada pokoknya adalah mengerjakan urusan zakat dengan mengetahui apa yang dikehendaki untuk dicapai, baik yang diselesaikan sendiri atau orang lain yang setiap waktu selalu mengetahui apa yang akan harus dituju. Dalam perencanaan diperlukan semacam kemahiran untuk melakukan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin kompleks

---

<sup>89</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat Seri 8, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, 1997, h. 377

perencanaannya, maka semakin diperlukan ketinggian dan kompleks tingkat kemahirannya dalam menilai dan menyusun apa yang diperlukan.

Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Sejak menggagas konsep perencanaan, rekrutmen, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, seluruhnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat.

Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Memudahkan muzakki menunaikan kewajiban berzakat.
2. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada mustahiq yang berhak menerimanya.
3. Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri.
4. Terwujudnya kesejahteraan sosial.

Lembaga pengelolaan zakat secara umum harus mempunyai visi dan misi organisasi. Visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan ke mana suatu organisasi harus di bawa agar dapat secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Menurut manajemen pengelolan zakat, ada lima kriteria dalam penyusunan sebuah visi, yaitu:

1. Rumusan visi harus jelas, singkat, padat dan mudah diingat.
2. Mencerminkan suatu yang ingin dicapai dan berorientasi terhadap masa depan.
3. Mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan dan dapat menjembatani keadaan sekarang dan akan datang.
4. Mampu menumbuhkan komitmen dan menggerakkan orang.
5. Mudah dikomunikasikan dan dimengerti oleh pengurus maupun masyarakat.

Sedangkan misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan organisasi untuk merealisasikan visi yang telah



ditetapkan. Ada tiga criteria yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu misi, yaitu:

1. Rumusan misi harus simple, jelas, tidak bermakna ganda dan sejalan dengan visi.
2. Mengambarkan fungsi atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
3. Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan perkembangan atau perubahan visi.<sup>90</sup>

Dari visi dan misi akan dilahirkan program-program unggulan sebagai implementasi pengelolaan zakat. Dari sejumlah program yang dicanangkan Badan/Lembaga Pengelola Zakat dapat dikelompokkan menjadi empat (4) program besar, yaitu program ekonomi, program social, program pendidikan dan program dakwah.

#### d. Sistem Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat itu sebenarnya mempunyai dua sisi penting yang harus diperhatikan pembinaannya yaitu pada sisi penerimaan dan pendistribusian. Pada sisi penerimaan ada beberapa aspek penting yang terkandung di dalamnya, seperti aspek pengumpulan dan pengolahan data, aspek pelayanan perhitungan zakat, aspek penagihan, dan aspek pencatatan setoran zakat.<sup>91</sup>

Banyaknya aspek penting yang harus diperhatikan para pengelola zakat menunjukkan tidak mudahnya masalah pengelolaan zakat itu. Apalagi kalau kita ingin agar pengelolaan zakat itu dapat mencapai sasarannya secara optimal. Pengorganisasian intern yayasan atau badab pengelola zakat harus mencerminkan diperhatikannya aspek-aspek penting di atas. Sarana dan prasarana jelas harus dipersiapkan secara memadai, demikian

---

<sup>90</sup> Depag RI, , Op. Cit, h. 16

<sup>91</sup> Karnaen Parwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, cet 1, Jakarta ; Usaha Kami, t. th, h. 125

juga orang yang akan menanganinya sudah harus dilatih dan dibimbing secara baik.

#### 1. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Zakat

Pada sisi penerimaan zakat, aspek penyuluhan menduduki fungsi utama untuk keberhasilan suatu badan pengelola zakat. Sesuai dengan perkembangan zaman, mendengar dan melihat secara langsung, akan lebih efektif dari pada membaca. Terbukti orang zaman sekarang ini kebanyakan tidak menggubris lagi apabila penyuluhan dengan menggunakan brosur yang isinya hanya tulisan saja. Tingkatan penyuluhan akan lebih meresap apabila harus mendengar sendiri kewajiban zakat tersebut dari ceramah-ceramah dan juga melihat secara langsung penyaluran atau pendayagunaan zakat itu dalam bentuk gambar, tayangan di televisi ataupun melihat secara langsung hasil pendayagunaan zakat tersebut.

Aspek lainnya dari sisi penerimaan adalah pengumpulan dan pengolahan data muzakki. Walaupun pengelolaan pajak hampir sama dengan pengelolaan zakat, namun wajib zakat banyak tidak mengetahui di mana kantor dan tempat menyetorkan dana zakatnya. Makanya dalam hal ini petugas zakat dapat bekerja sama dengan mesjid-mesjid atau majlis-majlis ta'lim unruk mendata para muzakki.

Dawam Raharjo dalam hal ini pernah mencetuskan suatu gagasan untuk memberikan identifikasi muzakkiy secara nasional. Apabila identifikasi wajib pajak disebut dengan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka para muzakki juga diberi Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Selain pemberian NPWZ ini juga diberi Surat Pemberitahuan Tahunan Zakat (SPT). Apabila kedua system ini diberlakukan, maka pembayaran zakat secara teratur sudah bisa diharapkan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta : Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 540

Suatu badan pengelola zakat hendaknya juga mampu menampilkan laporan penerimaan dan penyaluran zakat secara transparan yang dapat menarik simpati dan kepercayaan umat Islam sehingga mau menyimpan zakatnya di lembaga tersebut.

Pengumpulan zakat yang terdapat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Badan Amil Zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, sadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Hal yang menggembirakan sekarang ini adalah adanya kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin di Indonesia telah mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang dikelola oleh swasta.

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan di kalangan pakar zakat, infaq dan shadakah, bahwa dana zakat tersebut belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin, kalau kita perhatikan dari sekian banyak instansi pemerintah dan perusahaan di Indonesia, baru beberapa instansi pemerintah dan perusahaan yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ) yang telah dikelola dengan baik.

Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi saat awal-awal berdirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat di kalangan pegawai maupun masyarakat. Oleh karena itu diperlukan kiat-kiat atau strategi tertentu untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan kaum muslimin.

Ada tiga strategi dalam pengumpulan zakat, yaitu ;

- a. Pembentukan unit pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat (BAZ) dapat membuka Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, propinsi, dan daerah.
- b. Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat dapat membuka counter atau loket tempat pembayaran zakat atau secretariat lembaga yang bersangkutan. Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang representatif, seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan membayar zakat, disediakan alat tulis dan penghitung seperlunya, disediakan tempat penyimpanan uang atau brangkas sebagai tempat pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.
- c. Pembukaan rekening di bank. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.<sup>93</sup>

Di samping itu, untuk menumbuhkan kesadaran berzakat, baik untuk pegawai institusional pemerintah maupun swasta, dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya adalah:

- a. Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang zakat, infaq dan shadaqah, baik dari segi epistimologis, terminology maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.

---

<sup>93</sup> Departemen Agama, Op.Cit, h. 33-34

- b. Manfaat serta hajat dari zakat, infaq dan shadaqah, khususnya untuk pelakunya maaupun para mustahiq zakat.

Karenanya untuk menumbuhkan kesadaran zakat di kalangan masyarakat, selain penting mengetahui tentang ketentuan fiqih mengenai wajibnya zakat, juga penting untuk memahami masalah zakat dalam kaitannya dengan factor a:jaran-ajaran Islam lainnya, seperti etika dan akidah.

## 2. Pelaksanaan Sistem Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Adapun dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahiq.
- b. Aspek pengumpulan dan penyaluran zakat.
- c. Aspek monitoring.
- d. Aspek pembinaan.
- e. Aspek pelaporan dan pertanggung jawaban.

Dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat, maka pihak pengelola harus mengetahui betul-betul kedelapan asnaf yang berhak menerima zakat tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada Surah at-Taubah ayat 60 di atas tidak dirinci cara-cara dan pertimbangan antara orang yang terdapat dalam suatu golongan dan antara golongan yang lain. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat. Nabi Muhammad saw tidak pernah menerangkan cara-cara pembagian itu, bahkan member mustahiq sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda zakat yang ada.<sup>94</sup>

Hal tersebut berarti membukakan keluasaan pintu ijtihad bagi kepala negara atau Badan Amil Zakat (BAZ) untuk mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi hasil pungutan yang ada dalam batas-batas ketentuan pada ayat 60 surah at-Taubah di atas.

Pengkhususan hanya ke delapan golongan tidak berarti, bahwa zakat harus dibagi kepada mereka secara merata, sama dan menyeluruh. Sistem pendistribusian ini persoalannya adalah masalah maslahat. Maslahat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan social politik dan social ekonomi dewasa ini.

Beberapa ahli ekonomi muslim, seperti Akram Khan beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi karena sebagian besar dari delapan kategori yang berhak menerima zakat termasuk dalam strata social golongan ekonomi lemah, seperti fakir miskin dan gharim. Bagaimanapun zakat adalah pemindahan kekayaan dari orang kaya kepada yang miskin, di mana dalam hal ini akan membawa kecenderungan untuk menimbulkan kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi. Oleh karenanya lembaga zakat adalah sumber potensial bagi bertambahnya jumlah permintaan dalam dunia ekonomi yang mengakibatkan inflasi.

---

<sup>94</sup>Syehul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 46

Selama harga naik, suatu distribusi yang kurang hati-hati tidak hanya akan mendorong harga lebih meningkat, tetapi juga akan menghancurkan kepentingan golongan masyarakat ekonomi lemah yang menerima zakat itu sendiri. Agar supaya terpelihara dari baahaya seperti ini, maka ide *surplus budget* rasanya dapat diterima. Surplus zakat *budget* adalah jumlah total penerimaan zakat lebih besar dari jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semua zakat yang terkumpul dibagikan semua, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan pembiayaan proyek-proyek yang bernilai produktif.

Mengenai pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menurut pedoman pelaksanaan zakat ditentukan sebagai berikut :

- a. Bernilai edukatif, produktif, dan ekonomis agar para penerima zakat pada suatu maasa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan sebagai orang yang membayar zakat.
- b. Untuk fakir miskin, muallaf dan ibnu sabil pembagiannya dititik beratkan pada pribadinya, bukan pada lembaga hokum yang mengurusnya. Kebijakan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih kentara dan terasa.
- c. Bagi kelompok amil, gharim, dan sabilillah pembagiannya dititik beratkan kepada badan hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus atau melakukan aktifitas keislaman.
- d. Dana-dana yang tersedia dari pengumpulan zakat yang belum dibagi atau diserahkan kepada mustahiq, hendaknya dimanfaatkan untuk pembangunan dengan jalan menyimpannya di Bank berupa giro atau deposito atas nama badan amil zakat yang bersangkutan.

Lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut untuk merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan pengelola zakat lebih menitikberatkan

pada efek pemberdayaan masyarakat bukan pada populis atau tidaknya suatu program. Misalkan pengguliran program santunan pendidikan. Tugas para pengelola zakat tidak berhenti pada pemberian santunan dana, akan tetapi bagaimana upaya –upaya pemberdayaan memendirikan penerima beasiswa agar terbebas dari jerat kemiskinan. Bukan membiarkannya dalam kemiskinan hingga terbiasa dan bangga serta menjadi komoditi.

Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas program. Program yang diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan.

Manfaat yang didapatkan ketika selektif dalam member adaalah terhindarnya duplikasi atau penumpukan bantuan kepada mustahiq yang sama. Di samping itu, kesalahan dalam penyaluran bantuan relatif kecil karena adanya perencanaan dan control yang ketat. Pengetahuan tentang golongan-golongan masyarakat yang berhak menerima zakat nmenjadi acuan, di samping bukti-bukti administrative dan pembuktian aktif berupa investigasi. Dapat dilihat bahwa manajemen ini dapat menyelamatkan potensi dana zakat yang ada di masyarakat.

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi social sebagai sarana saling berhubungan sesame manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena dana zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah social yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produkktif konvensional dan produktif kreatif .



a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional maksudnya adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin yang biasa diberikan oleh amil pada saat idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi persoalan umat.

b. Konsumtif kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan social dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah, seperti mukena dan sejadah, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak sayur untuk pedagang sayur, dan sebagainya.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahiq dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya.

d. Produktif Kreatif.

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek social, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Dengan kata lain, bahwa hendaklah pila penyaluran zakat diarahkan untuk memapukan dan memberdayakan anggota masyarakat yang lemah ekonominya dalam bentuk pemberian modal yang sifatnya bergulir. Apalagi dalam krisis ekonomi sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak memiliki lapangan kerja akibat phk, menganggur, dan lain sebagainya. Mereka inilah yang perlu dibantu agar dapat berusaha di sector usaha kecil.

Untuk lebih memberdayakan ekonomi ummat, selain zakat diberikan secara individual bagi mereka yang memiliki jiwa enterpneur, akan lebih efektif lagi bila mereka dikoordinir menjadi satu bentuk yang terkoordinir pasarnya, misalnya zakat untuk membeli mesin jahit dan akan lebih mantap lagi dan berkesinambungan bila ada pengusaha yang menampung hasil jahitannya dan memasarkannya. Dan yang lebih bermanfaat lagi bila dana zakat dipakai sebagai modal untuk membentuk atau mendirikan usaha yang menampung para fukara dan miskin sebagai karyawannya, sehingga mereka memperoleh sumber pendapatan yang tetap sebagai karyawan.

#### Model Pemberdayaan Mustahiq

Adapun model pemberdayaan mustahiq yang dapat dilakukan oleh para amil zakat adalah:

1. Pengembangan ekonomi.

Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan amil, yaitu:

- a. Penyaluran modal. Penyaluran modal dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal dapat berbentuk modal kerja atau investasi. Modal tidak perlu kembali, karena zakat memang diwajibkan untuk membantu kaum dhuafa. Diharapkan bagi mustahiq yang sudah mendapatkan modal dan usahanya berkembang, dapat berkontribusi kepada mustahiq lainnya agar penyaluran ini member multipler effect dalam mendorong kegiatan ekonomi. Penyaluran modal untuk kelompok lebih

memudahkan lembaga zakat. Lembaga pengelola zakat harus mendorong kelompok membentuk organisasi. Organisasi ini dapat mengelola dana bantuan. Dan dana ini dapat berfungsi sebagai *revolving fund* dalam organisasi.

- b. Pembentukan lembaga keuangan. Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKSM). Lembaga zakaat tidak perlu lagi terjun mengurus langsung pengusaha gurem. Dengan adanya LKSM, lembaga zakat dapat mengontrol pemberdayaan dengan lebih seksama.
- c. Pembangunan Industri. Penyaluran dana tidak terbatas pada usaha mikro saja, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan investasi dengan mendirikan industri dan pabrik. Investasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja mustahiq yang sebelumnya sudah disiapkan kapasitas SDMnya. Sehingga dapat memenuhi standar persyaratan perusahaan.

## 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan terkait dengan pembinaan sumber daya manusia adalah dengan ;

- a. Program Beasiswa. Program ini bertujuan untuk membantu para mustahiq dalam meningkatkan diri untuk dapat melakukan perubahan diri yang lebih baik.
- b. Diklat dan kursus keterampilan. Bagi mustahiq yang kurang semangat melanjutkan pendidikan, maka jalur pelatihan praktis cukup efektif bagi mustahiq untuk menambah keahlian dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan etos kerja.
- c. Membuat lembaga pendidikan. Dalam hal ini penyediaan infrastruktur pendidikan, baik formal maupun non formal sangat penting untuk menampung anak sekolah yang kurang mampu. Dengan memiliki sarana dan prasarana pendidikan, maka diharapkan anak-anak sekolah yang

kurang mampu dapat menikmati pendidikan dengan nyaman, tenang dan sesuai standar. Ada beberapa manfaat dari pengelola lembaga pendidikan secara formal, yaitu :

1. Pengelola pendidikan direkrut sesuai visi dan misi yang dibutuhkan.
2. Secara otomatis lembaga pendidikan di bawah control lembaga.
3. Guru-guru direkrut sesuai standarisasi lembaga.
4. Anak-anak mustahiq berada dalam pengawasan lembaga secara teratur.

### 3. Layanan sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial di sini adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahiq dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahiq sangatlah beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan, pengobatan, pembayaran sekolah dan lainnya.

Namun demikian, walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Syechul Hadi Permono mencatat ada 8 hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu:

1. Tidak adanya persamaan persepsi antara ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang ta'abbudi (ibadah) atau termasuk bagian al-furudh al-ijtimaiyyah (kewajiban sosial).
2. Sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi social dengan pengentasan kemiskinan.
3. Banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang ditentukan pada masa Nabi Muhammad saw.

4. Banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain.
5. Undang-undang No 38 tahun 1999 dan UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak member sanksi terhadap orang Islam yang mampu, yang tidak mengeluarkan zakatnya.
6. Badan pengelola zakat baik BAZNAS atau BAZDA itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, karena tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian tidak menjadi efektif.
7. Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat (BAZ) bukan badan resmi pemerintah.
8. Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, bahkan di sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus badan amal zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan.<sup>95</sup>

### **C. Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat**

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>96</sup> Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah ataukah mungkin sebaliknya.

---

<sup>95</sup> Syechul Hadi permono, *Op.Cit*, h. 355-356

<sup>96</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi Kedua, EPFE Yogyakarta, Cet XIV, 1999, h. 359

Robert J. Mocler sebagaimana dikutip T. Handoko mengatakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>97</sup>

Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana. Niat tulus tapi tidak cakap, kegiatan ini akan menyimpang. Sebaliknya meski cakap tapi dilandasi kepentingan tertentu, kegiatan ini juga akan menyimpang. Jika memang terjadi penyimpangan, analisa pengawasan harus dilakukan dengan jernih, tepat dan obyektif. Analisa pengawasan harus sanggup mengungkap sebab-sebab penyimpangan. Karena itu tim pengawas yang ditugaskan juga tidak boleh memiliki kepentingan yang akan menambah parahnya suatu penyimpangan.<sup>98</sup>

Dalam Islam, pengawasan paling tidak terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
2. Kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan

---

<sup>97</sup> Ibid, h. 361

<sup>98</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Op.Cit*, h. 148

penyelesaian tugas dan perencanaan tugas serta yang lainnya.<sup>99</sup>

Oleh karena itu lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada hakekatnya di dalamnya terdapat dua pengawasan substantif, yaitu:

- a. Secara fungsional, pengawasan telah *built-in* melekat *inheren* dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memposisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil dipaksa dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakannya dengan lembaga social umum lainnya.
- b. Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktual. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syariah berada di atas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Di samping itu, dewan ini juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah. Mengingat namanya Dewan Syariah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya. Dipimpin oleh Ketua Dewan Syari'ah yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syariah.<sup>100</sup>

Dewan syariah inilah yang kemudian melakukan tiga macam pengawasan, yaitu:

---

<sup>99</sup> Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, h. 156

<sup>100</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Op.Cit.*, h. 141

1. Pengawasan syariah yang bersifat normative, terutama dalam mengawasi kehidupan keseharian dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang.
2. Pengawasan manajemen syariah yang akan memantau apakah manajemen telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.
3. Pengawasan ekonomi syariah dengan memantau apakah pengelolaan dan pendaayagunaannya telah dilakukan melalui pendekatan ekonomi syariah, karena zakat yang dikelola tanpa landasan ekonomi syariah, maka manfaatnya tidak akan dirasakan oleh fakir miskin.<sup>101</sup>

Kemudian kapan dilakukan pengawasan tersebut? Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan bisa dilakukan di awal, pertengahan dan diakhir kegiatan. Pengawasan di awal kegiatan ditujukan sebagai suatu upaya pencegahan yang dikenal sebagai pengawasan awal, sedangkan di tengah kegiatan atau pada saat kegiatan sedang berjalan ditujukan sebagai upaya pencegahan yang dikenal dengan sebutan pengawasan berjalan dan di akhir kegiatan ditujukan sebagai upaya perbaikan yang disebut pengawasan akhir. Menurut Eri Sudewo, lembaga zakat sebaiknya menggunakan dua pengawasan, yaitu pengawasan awal dan pengawasan berjalan. Alasannya ada tiga hal, yakni :

a. Dana Hibah

Ada dua pengertian yang berkaitan dengan dana hibah atau bebas. Pertama, dana hibah jelas tidak kembali kepada donator. Zakat bahkan diharamkan kembali kepada muzakki. Karena tidak kembali, seolah-olah ada keleluasaan untuk bebas mengalokasikan dana. Kedua, dana zakat, infaq dan shadaqah yang telah disumbangkan seolah tidak lagi bisa diawasi muzakki atau masyarakat. Karena dana sudah ada di tangan, maka amil seolah

---

<sup>101</sup> Ibid, h. 142



juga menjadi merasa paling tahu apa yang akan dilakukan. Tanpa disadari amil telah terjebak dalam logika persepsinya sendiri. Maka kebebasan cenderung tak dapat lagi dicegah. Untuk mencegah kebebasan tersebut, dibutuhkan pengawasan terus menerus dan melekat. Bentuk pengawasan terus-menerus dan melekat hanya dapat berjalan melalui pendekatan pengawasan awal dan pengawasan berjalan.

b. Tradisi tak cermat

Dalam pengelolaan zakat, sang manajer harus cermat melihat sikap orang lain, cermat menyimak kondisi, cermat menyimak kondisi, cermat memantau penyimpangan, cermat mengamati budaya organisasi. Kecermatan dituntut agar tidak terjadi kebebasan anggota untuk melakukan apa saja. Maka dengan pengawasan awal dan pengawasan berjalan, perkembangan organisasi zakat dapat terus dicermati.

c. Kebiasaan menunda

Disiplin adalah budaya yang mestinya harus dikembangkan dalam segala hal, termasuk dalam pengelolaan zakat. Namun budaya yang berkembang di Indonesia tidak seperti harapan tersebut, sehingga menimbulkan budaya sering menunda pekerjaan. Di Indonesia membuat perusahaan lebih mudah ketimbang menegakkan kedisiplinan. Di samping itu juga membuat suatu kegiatan jauh lebih muda dari pada mematuhi jadwal kegiatan. Maka dapat dipahami, pertumbuhan organisasi tersendat karena persoalan tidak dipatuhinya jadwal.

Dengan demikian, maka diperlukan adanya pemantauan, pengendalian serta pengawasan internal dan eksternal. Pemantauan dan pengendalian bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pemantauan dan pengendalian langsung dan pemantauan dan pengendalian tak langsung. Pemantauan dan pengendalian langsung adalah pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dengan mendatangi atau mengunjungi lembaga-lembaga pengelola zakat yang telah

dibentuk untuk mengetahui sejauhmana perkembangan lembaga, kinerja pelaksanaanya dan kendala atau hambatan yang dihadapinya. Hal ini sangat perlu dilakukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Sedangkan pemantauan dan pengendalian tak langsung adalah pemantauan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat pemerintah melalui laporan –laporan yang masuk, apakah laporan dari lembaga pengelola zakat, laporan masyarakat maupun laporan media massa. Pola pemantauan dan pengendalian seperti ini dianggap sangat efisien karena tidak membutuhkan biaya yang besar. Adapun teknik pemantauan dan pengendaliannya bisa dilakukan dengan survey, observasi dan angket.<sup>102</sup>

Sementara itu, pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 34 menjelaskan bahwa : Menteri, Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasann terhadap BAZNAS, BAZNAS Propinsi, BAZNASKabupaten/Kota dan LAZ sesuai kewenangannya. Sedangkan dalam pasal 35 dijelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS, LAZ dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk: akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Serta penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Peran pengawasan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau

---

<sup>102</sup> Depag, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, h. 39-40

melalui surat kepada lembaga yang bersangkutan, kepada pejabat pemerintah yang berkompeten, kepada legislatif atau mungkin disampaikan melalui media massa.

Dalam melakukan pemeriksaan keuangan yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ,yang bersangkutan dapat meminta bantuan akuntan public untuk melakukan audit atas neraca keuangannya. Sedangkan bagi Lembaga Amil Zakat, sewaktu mengajukan permohonan pengukuhan diharuskan melampirkan laporan keuangan dan surat pernyataan bersedia diaudit.

Oleh karena itu, maka hal terakhir yang tidak boleh dilupakan dalam melakukan pengelolaan zakat adalah proses evaluasi pelaksanaan program dan pelaporan secara transparan kepada publik. Inilah partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan program, profesionalisme dan komitmen suatu lembaga dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Ketika suatu program dinilai tepat sasaran, maka kepercayaan dan partisipasi masyarakat akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, ketika suatu program dinilai tidak tepat sasaran, maka kepercayaan masyarakat pun menjadi kecil bahkan hilang. Dengan demikian, maka diperlukan kelengkapan berupa data-data mustahiq, dokumentasi kegiatan, dan tanggapan masyarakat yang merasa terbantu oleh pengguliran program.

Dengan diterapkannya akuntansi yang baik, maka organisasi dapat dikatakan telah melaksanakan akuntabilitas dan transparansi yang baik. Karena dengan akuntansi, organisasi dapat mengetahui kinerja keuangan. Terlebih lagi jika laporan keuangan yang telah dibuat itu dipublikasikan secara luas.

Kewajiban melaksanakan akuntabilitas dan transparansi bagi organisasi pengelola zakat juga dituntut oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini tercantum dalam Undang –undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Dimana pengelola tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan

ketentuan, maka akan dikenakan sanksi pidana selama 5 tahun atau denda paling banyak 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Bahkan Islam pun mengatur masalah ini, sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجَرَّةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua lelaki, maka boleh seorang laki-laki dan dua perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, maka yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Oleh karena itu, maka secara umum laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibuat dengan tujuan:

- a. Untuk menilai manajemen OPZ dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- b. Untuk menilai pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuannya untuk terus memberikan pelayanan atau program tersebut.

Merujuk kepada tujuan di atas, dapat kita pahami bahwa bagi OPZ kesesuaian dengan syariat Islam dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya sangatlah penting. Dengan demikian adanya posisis Dewan Syariat dan Dewan Pertimbangan di sebuah OPZ

juga memegang peranan yang sangat penting. Idealnya, audit syari'ah harus dilakukan juga, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh internal audit (atau komisi pengawas) maupun eksternal auditor, untuk menilai semua aktivitas OPZ terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syari'at Islam. Khususnya jika diaudit oleh eksternal auditor dapat dikeluarkan "Opini Syari'ah."





## **BAB VI**

# **REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI NEGARA YANG MEWAJIBKAN ZAKAT**

### **A. Sudan**

#### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Sudan**

Dalam sejarah Sudan, zakat pertama kali di kelola oleh negara terjadi pada masa dinasti/kerajaan Mahdia pada tahun 1884 hingga berakhirnya dinasti tersebut pada tahun 1898. Sejak runtuhnya dinasti Mahdia, bertepatan dengan masa kolonialisme Inggris, pengelolaan zakat di Sudan dilakukan secara individu, sukarela dan langsung diserahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan.<sup>103</sup>

Perjalanan sejarah zakat di Sudan, hingga akhirnya menjadi dikelola negara oleh Dewan Zakat (zakat chamber) melalui tahapan panjang. Diawali pada 1980, pemerintah Sudan mengeluarkan zakat fund yang berbentuk korporasi. Selanjutnya, pada tahun 1404 H/1984, dikeluarkan Zakat Act atau Undang-Undang Zakat 1404 dimana kewajiban mengelola zakat merupakan tanggung jawab negara melalui Direktorat Pajak, meskipun masih bersifat sukarela. Uniknya, pada masa ini tarif pajak yang dikenakan kepada nonmuslim sama dengan tarif zakat. Tetapi, ketika itu pembayaran zakat masih bersifat sukarela, Zakat menjadi suatu yang wajib bagi masyarakat Sudan sejak tahun 1986 melalui UU zakat Nomor 1406. Pada waktu ini, dibentuklah Dewan Zakat (zakat chamber) secara tersendiri, terpisah dari Direktorat Pajak. Karena dilapangan terjadi ketimpangan antara zakat dan pajak, maka ditetapkan bahwa zakat itu khusus untuk muslimin dan dibayarkan ke Dewan Zakat.

---

<sup>103</sup> Nana Mintarta dkk, *Indonesia & Development Report 2012*, Jakarta: Indonesia Magnifinance Of Zakat, 2012. h. 171-172.



Sedangkan pajak untuk nonmuslimin dan dibayarkan ke negara. Dewan zakat Sudan ini merupakan Lembaga independent. Secara structural, Dewan Zakat langsung bertanggung jawab kepada Presiden dibawah pimpinan Direktorat Jenderal (Dirjen) Dewan Zakat. Dewan Zakat ini juga berhubungan langsung dengan Kementrian social.<sup>104</sup>

Independensi Dewan Zakat terlihat pada Pasal 4 ayat (1) UU Zakat 1406. Ditegaskan dalam UU bahwa Dewan Zakat mempunyai wewenang penuh menangani perzakatan, baik pemungutan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat. Pada waktu itu, Dewan Zakat dibentuk secara luas di Sudan. Artinya, dengan system federal, setiap wilayah, negara bagian, atau provinsi memiliki Dewan Zakat masing-masing. Zakat yang berhasil dihimpun di wilayah/provinsi tertentu tidak disetorkan ke pusat, tetapi dikelola dan didistribusikan di wilayah/provinsi masing-masing. Melalui UU itu, zakat mulai berkembang luas. Namun, hasil zakat belum benar signifikan karena belum ada sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayar zakat. Sanksi yang tegas baru muncul pada UU zakat 1410 yang dikeluarkan pemerintah. Sudan pada tahun 1990. Dalam UU itu disebutkan, zakat adalah wajib, bukan sukarela. Bagi yang tidak membayar zakat, menolak atau menghindari pembayaran zakat dengan sengaja dan melawan hukum dikenakan sanksi denda maksimal dua kali lipat dan zakat yang harus dibayarkan atau hukuman satu bulan penjara. Dalam UU Zakat 1410, selain sanksi, diatur juga semua harta yang wajib dizakati dan distribusinya secara local. Puncaknya, pada tahun 2001, pemerintah Sudan mengeluarkan Zakat Act 2001 yang membahas secara detail seluruh aspek zakat. Misalnya, zakat penghasilan dibedakan dengan zakat atas upah dan zakat atas gaji. Zakat penghasilan diambil dari penghasilan seseorang yang bekerja bagi dirinya sendiri, seperti dokter dan konsultan. Sedangkan zakat

---

<sup>104</sup> Majalah BAZNAS edisi April. Badan Amil Zakat Nasional: Jakarta, 2014, h. 24

atas upah dan gaji diambil dari pendapatan bekerja untuk orang lain sebagai karyawan

Keberadaan zakat Act 2001 ini sangat efektif untuk mendorong laju perolehan dana, hal ini dibarengi dengan jumlah pembayaran zakat yang meningkat secara signifikan, sehingga memberikan sumbangsih yang besar bagi upaya pengentasan kemiskinan. Dengan adanya UU zakat yang tegas dan jelas ini, perolehan dana zakat di Sudan kian meningkat. Pada 1990, zakat yang dikumpulkan baru mencapai 27,8 juta dinar Sudan. Pada tahun 2003, jumlah zakatnya meningkat menjadi 19,2 miliar dinar Sudan atau meningkat 690 kali lipat dari perolehan dana zakat pada tahun 1990. Sedangkan pada tahun 2008, dana zakat yang dihimpun mencapai 128 juta dollar As. Dari aspek distribusi, pada tahun 1990, dana zakat yang didistribusikan oleh Dewan Zakat Sudan mencapai 7,2 juta dinar Sudan. Sedangkan pada tahun 2003, dana zakat yang didistribusikan Dewan Zakat Sudan mencapai 16,1 miliar dinar Sudan. Deswan Zakat Sudan berhasil mengelola zakat karena ditopang antara lain, oleh adanya Lembaga Pendidikan khusus perzakatan yang sepenuhnya dibiayai oleh Dewan Zakat. Institut zakat ini berdiri tahun 1998 dengan nama *High Institute of Zakat Science*.

Saat ini, republik Sudan menjadikan zakat sebagai alat utama dalam memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan semua kementerian untuk mendukung pengoptimalan zakat di Sudan. Peran zakat di Sudan dalam pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah tergambar nyata dari pengurangan kemiskinan di negaranya. Dewan Zakat tidak hanya sukses memastikan di setiap orang miskin di Sudan selalu tersedia makanan pokok, tetapi juga sukses dalam sector pemberdayaan petani, nelayan, peternak, dan perajin. Buktinya, Sudan menjadi eksportir daging dan produk peternakan terpenting bagi negara-negara Arab. Karena itu, meskipun pendapatan per kapita Sudan

hanya sebesar U\$\$ 2.860 jauh dibawah Indonesia yang berpendapatan per kapitanya sebesar U\$\$ 4.700, dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar warganya sangat luar biasa.

Zakat sebagai lembaga nasional saat ini memiliki tujuan utama dalam pengembangan zakat sebagai berikut :

- Untuk memberikan jaring pengaman (*safety net*) terhadap bencana kekeringan, kelaparan, bencana dan wabah;
- Untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan uang tunai dan bentuk barang;
- Untuk langsung membangun dan berpartisipasi dalam berbagai proyek bagi kaum miskin dan yang membutuhkan;
- Untuk mengatasi pengangguran melalui membuat pelatihan wajib untuk buruh proyek-proyek kecil.

Di Sudan, Dewan Zakat merupakan badan zakat tertinggi atau *apex*. Ini adalah badan hukum yang independen dengan hak untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan kewajiban zakat dan mengumpulkannya . Ia juga bertanggung jawab untuk distribusi zakat kepada penerima manfaat yang berhak sesuai Syariah dan dengan tujuan mewujudkan tujuan social zakat. Dewan in juga bertanggung jawab untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang organisasi pengelola zakat. Dewan melaksanakan fungsinya di bawah pengawasan Dewan Amanat Pengawas Zakat, yang merupakan otoritas tertinggi.

Beberapa karakter utama regulasi zakat di Sudan mengatur beberapa hal pokok, di antaranya :

- Perluasan kategori harta yang wajib dizakati, seperti zakat hasil sewa dan profesi
- Kewajiban membayar zakat bagi warga negara Sudan yang beragama islam, baik sedang berada di Sudan ataupun di luar Sudan
- Hak muzaki untuk membagi zakatnya sendiri maksimal sebesar 20% kepada sanak saudara

- Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Syuro di seluruh jenjang organisasi pengelola zakat. Di tingkat pusat, dewan ini diketuai oleh Menteri Urutan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang
- Penerapan sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat, berupa denda dua kali lipat zakat dan hukuman penjara dua tahun bagi yang menolak membayar zakat secara sengaja
- Penghimpunan zakat dan pajak dilakukan di satu atap, dan distribusi zakat didelegasikan kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional
- Distribusi zakat hanya kepada lima kelompok muzaki, yaitu fakir, miskin, amil, *ibnu sabil*, dan gharim ditambah untuk kepentingan social dan darurat, seperti pegawai terkena pemutusan kerja, korban bencana, janda, keluarga narapidana, dan sebagainya.

## **2. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Sudan**

Pengelolaan zakat di Sudan telah banyak membantu kondisi fiskal negara. Salah satunya adalah keberanian dan kemampuan pemerintah memberikan Pendidikan dari tingkat paling dasar sampai menengah atas secara gratis. Bahkan, mereka telah mewajibkan warganya untuk kuliah. Tak hanya itu, Pemerintah Sudan juga mampu memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia. Di bidang kesehatan, Sudan juga telah menggratiskan biaya berobat kepada seluruh warganya dan Sudan termasuk salah satu negara miskin yang tingkat kriminalnya cenderung rendah.

Pertumbuhan penghimpunan zakat tahun 2013 cukup tinggi. Hasil studi *Institute of Zakat Science Sudan* tahun 2013, memperkirakan potensi basis zakat tahun 2013 telah meningkat menjadi SDG 193 miliar (Sudanese Pound, mata uang sudan) yang potensi zakatnya adalah sekitar SDG 5,8 miliar. Sedangkan zakat yang tekumpul tahun 2013 adalah sekitar SDG 1.3 miliar atau sekitar 22 persen dari potensi. Sebagaimana dapat dilihat pada table

di bawah, dengan kebijakan gradual tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan pengelolaan zakat di Sudan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar zakat terhimpun dari sector perdagangan dan pertanian, rata-rata masing-masing 45% dan 39%, sedangkan zakat perternakan menyumbang 7% dan zakat profesi menyumbang 5%. Sejak 2012 diterapkan objek zakat baru, yaitu zakat atas mineral/tambang dan memberikan kontribusi 1,4%.

**Tabel 6.1**  
**Penghimpunan Zakat Nasional di Sudan**

Tahun	Jumlah ('000 SDG)	Growth Rate %
2004	271,35	12
2005	314,48	16
2006	357,14	14
2007	404,49	13
2008	445, 28	10
2009	497,44	12
2010	592,64	19
2011	807,80	36
2012	1,198,64	48
2013	1,299,68	8

Sumber : Mohammed Obaidullah, 2015, [www.sadaqa.in](http://www.sadaqa.in)

Menurut M Ibrahim Muhamad, keberhasilan pengelolaan zakat di Sudan ini tidak terlepas dari peran Dewan Zakat Sudan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>105</sup>

- Merupakan institusi resmi yang dilindungi oleh undang-undang,
- Penerapan dilakukan dalam empat bertahap, sejak tahun 1980 hingga 2001,
- Adanya sinergi dengan Kementerian Penyuluhan Masyarakat di Sudan,

<sup>105</sup> Nana Mintarta dkk, op.cit. h. 41

- Memiliki kewenangan yang luas berijtihad fikih zakat dan melakukan ekspansi,
- Amil zakat mendapatkan hak sebagai pegawai pemerintah,
- Pengelolaan zakat mengikuti otonomi daerah nonsentralistik,
- Pendapatan zakat sebesar 10% digunakan untuk operasional dan sisa selebihnya hingga 12,5% diambil untuk amilin
- Adanya mekanisme pengawasan dari masyarakat
- Adanya hak amil untuk mengelola infak dan sedekah

## **B. Pakistan**

### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Pakistan**

Sejak Pakistan lepas dari India pada tahun 1947 dan berdiri sendiri sebagai negara islam, pengumpulan zakat sudah tidak lagi menjadi masalah. Saat ini, pemerintah Pakistan menyatakan bahwa zakat dikelola negara yang tercermin dalam pasal 31 UUD Pakistan 1954, yang berupaya mengorganisasi zakat. Pertama, tahun 1979, dikeluarkanlah Peraturan Presiden pada 24 juni 1979. Peraturan tersebut disahkan pada tanggal 20 Juni 1980. Proses pemotongan zakat yang pertama kali dilakukan pada 21 Juni 1980. Sedangkan untuk pemungutan zakat pertanian yang dikenal dengan Ushr terjadi pertama kali pada tanggal 15 Maret 1983. Sejak 1980 ini, UU ini telah lebih dari 12 kali amandemen. Begitu pula soal sifatnya.

UU Zakat ini menghasilkan lembaga pemerintahan yang mengelola zakat dan merupakan afiliasi dari Kementerian Keuangan. Isi pokok dari UU dan amandemen ini sebagai berikut:<sup>106</sup>

- Mempertegas peran pemerintah dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat;

---

<sup>106</sup> Monzer Kahf, *Zakah Management in Some Muslim Societies*, Background Paper No.11, IRTI-IDB, 1993, h. 23-24

- Kewajiban zakat dibagi menjadi dua, yaitu;
  - Item zakat yang akan dipungut oleh pemerintah, yaitu meliputi tabungan di bank, kantor pos dan semacamnya, surat berharga, anulitas, polis asuransi dan produk pertanian.
  - Item zakat lain seperti ternak, emas perak, uang kas, giro, saham, yang diperdagangkan dan aset lain yang tidak disebut pertama. Pemerintah mewajibkan individu membayar zakat atas item tersebut yang telah melebihi nishab secara sukarela, dan pemerintah tidak melakukan pengukuran maupun pengecekan nishab.
- Nonmuslim, warga asing dan Lembaga pemerintahan tidak terkena kewajiban zakat. Muslim yang memiliki keyakinan fikih yang berbeda dengan UU diberikan pengecualian.
- Pembayaran zakat atas 'ushr hanya dalam bentuk uang tunai, dan tarifnya ditetapkan 5% tanpa membedakan bentuk irigasinya.
- Beberapa keringanan pajak diberikan, seperti zakat digunakan sebagai pengurang pendapatan kena pajak.

Berdasarkan UU Zakat dan Ushr 1980 tersebut, pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik, Artinya, zakat dikelola secara sentralistik dengan hirarki: pusat atau nasional oleh Dewan Zakat Pusat (Central Zakat Council), provinsi oleh Dewan Zakat Provinsi (Provincial Zakat Council), kabupaten oleh Komite Zakat Kabupaten, kecamatan oleh komite zakat kecamatan dan pendesaan/perkotaan oleh Komite Zakat Lokal. Dewan Zakat Pusat atau Central Zakat Fund (CZF) dipimpin secara kolektif oleh 16 orang anggota yang salah satunya adalah Hakim Agung Paksitan. Unsur masyarakat, seperti ulama, juga terlibat di CZF yang tugas utamanya adalah melakukan pengawasan dan membuat kebijakan tentang penyaluran dana zakat. Selain itu, CZF juga bertugas

mendistribusikan dana zakat yang dihimpun ke Dewan Zakat Provinsi.<sup>107</sup>

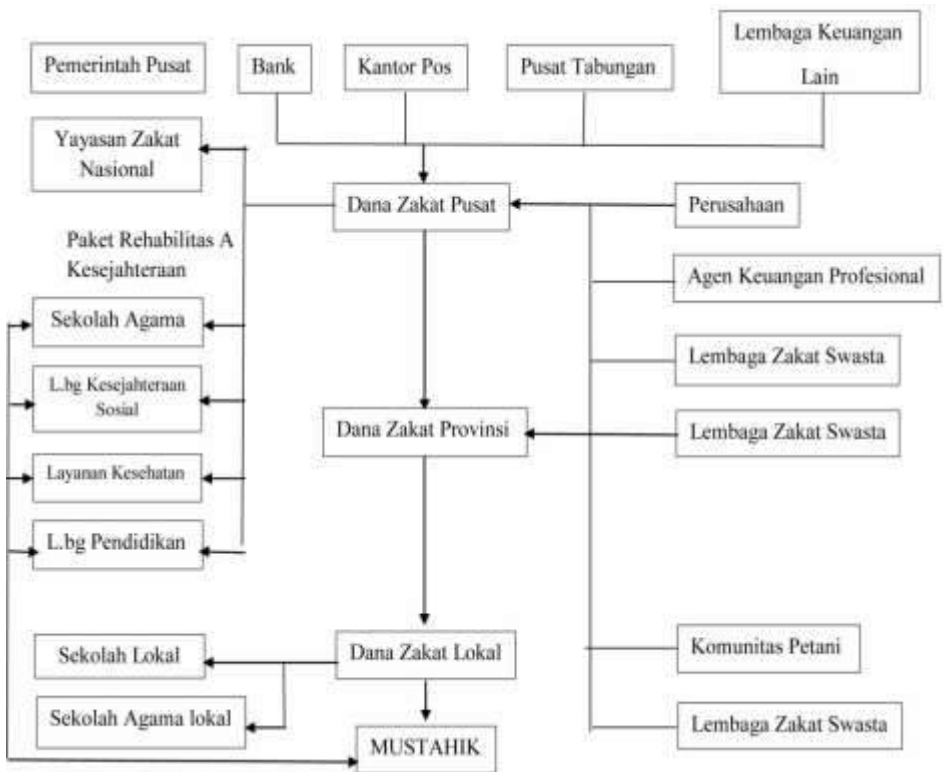
Kebijakan dan aturan dari Dewan Zakat Pusat menjadi pedoman. Dewan Zakat Provinsi yang di setiap provinsi terdiri dari 10 orang anggota dan dipimpin seorang hakim Pengadilan Tinggi. Dewan Zakat Provinsi ini bertugas mengawasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten, kecamatan, dan pedesaan/perkotaan serta mendistribusikan dana zakat ke Komite Zakat Lokal melalui Komite Zakat Kecamatan yang terdiri dari ketua dengan enam anggota yang bekerja secara sukarela. Komite Zakat Lokal ini keanggotannya bersifat non-official dan dipilih oleh Komite Zakat Kabupaten. Mereka yang bekerja secara sukarela, mempunyai tanggung jawab di dalam mengidentifikasi dan memverifikasi mustahik yang layak mendapat dana zakat. Setelah itu, baru mereka mencairkan dana zakat kepada para mustahik.

---

<sup>107</sup> Taufik Ridho, *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Moh Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 2006, h. 43



**Gambar 6.1.**  
**Struktur Kelembagaan Zakat di Pakistan**



## 2. Karakteristik Pengelolaan Zakt di Pakistan

Salah satu keunikan tata kelola dan *ushr* di Pakistan adalah menggabungkan antara peran intansi pemerintah dan relawan yang dipilih, berikut adalah aspek utama dalam pengelolaan zakat di Pakistan.

- a.) Orientasi pusat zakat, dengan cabang provinsi adalah bersifat otonom namun secara administrasi berafiliasi dengan lembaga keuangan. Kebijakan ini membantuk sebuah dewan yang dibentuk Dewan Zakat di tingkat pusat dan provinsi. Semua dewan dipimpin oleh seorang hakim dan memiliki beberapa *foqaha* dalam keanggitan mereka.

- b.) Tiga tingkatan manajemen ada di tingkat kabupaten kecamatan, dan tingkat lokal, di mana ada komite zakat yang bersifat sukarela. Pemimpin dan anggota kabupaten dan ketua komite kecamatan dan ketua komite lokal dipilih sesuai dengan prosedur dan kualifikasi yang ditetapkan UU. Selanjutnya, sekitar 36.000 komitem dengan sekitar 25 persen dari satu juta relawan, dibentuk dan mencakup hampir setiap desa wilayah negara.
- c.) Pengumpulan zakat dilakukan pada sumbernya/lokasinya. Karena harta yang *dozakati* sepenuhnya dikontrol oleh lembaga public atau swasta tertentu. Bukan oleh muzaki, hokum memberikan kewenangan kepada lembaga ini dengan tanggungjawab menilai, menghitung, dan mentranfer zakat kerekening administrasi zakat di bank sentral.
- d.) Penilaian dan pengumpulan *ushr* diserahkan kepada komite zakat lokasi (relawan yang di-*backup* oleh pemerintah dalam kasus adanya tunggakan)
- e.) Penanganan dana zakat dibatasi hanya tiga tingkat. Pusat, provinsi dan lokasi (desa). Tingkatan manajemen kabupaten dan kecamatan tidak menangani dana. Pemerintah pusat menerima zakat yang dikumpulkan oleh agen seluruh negeri. Sejumlah zakat tertentu disalurkan langsung ke sekolah, rumah sakit, dan organisasi amal. Untuk didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Sisa zakat didistribusikan diantara empat provinsi di Pakistan dan ibukota sesuai dengan kriteria tertentu, terutama dari ukuran jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan.

Sumber penerimaan dana zakat tingkat provinsi berasal dari dana pusat. Provinsi hanya mendistribusikan dana setengah dari penerimaan mereka untuk komite-komite lokasi dan setengah lainnya untuk instansi provinsi. Seperti rumah

sakit, sekolah, panti asuhan dan organisasi kesejahteraan sosial. Disini sekali lagi ukuran populasi adalah kriteria utama yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk membagi dana zakat antara komite-komite lokasi.

Komite zakat lokasi mengumpulkan *ushr* sebagai tambahan dari bagian mereka dari hasil zakat pemerintah provinsi. Komite lokasi mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan kebijakan mereka sendiri dalam batas-batas prinsip syariah dengan petunjuk dan pedoman yang disediakan oleh manajemen pusat dan provinsi. Semua dana zakat pada tingkat pusat, provinsi dan daerah menerima pembayaran sukarela pada item zakat Janis kedua, sumbangan dan bentuk dana sosial lainnya.

- f.) Pemerintah memnanggung biaya administrasi manajemen zakat diempat tingkat teratas. Komite lokasi dikenakan biaya yang sangat rendah sebagai biaya keanggotaan sukarela. Pengeluaran administrasi zakat lokasi tidak diizinkan melebihi 10% dari total dana yang didistribusikan. Pengeluaran ini mencakup pembukuan, alat tulis dan biaya lain-lain.
- g.) Pemerintah juga menyediakan dana tambahan dari sumber tersendiri untuk membangun *infrastruktur* yang diperlukan untuk distribusi zakat, seperti pembangunan panti asuhan, rumah bagi orang miskin, rumah sakit bagi orang iskin, dan lain-lain. Hal ini karena penerapan prinsip kamlik yang ketat. Prinsip ini menyatakan bahwa zakat diberikan sedemikian rupa sehingga menjadi milik pribadi orang miskin. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk kontruksi semacam ini dibatasi. Akibatnya, pemerintah mendirikan lembaga lain, yaitu yayasan zakat yang memiliki tujuan khusus untuk membangun infrastuktur zakat. Yayasan zakat didirikan dengan anggaran awal 100 juta RPS yang dibiayai sepenuhnya oleh Negara.

- h.) Pemerintah mengeluarkan petunjuk rinci tentang penilaian dari prosedur pengumpulan zakat dan ushr, yang menentukan tingkat kebutuhan orang miskin, model penyaluran zakat melalui lembaga amal, pendistribusian oleh komite-komite zakat lokasi, dan pengelolaan dana disemua tingkatan, akuntansi dan audit dan lain-lain.
- i.) Akses terhadap informasi syariah merupakan hal khusus tingkat tinggi, yang dikelola oleh dewan pusat dan provisi yang memiliki para ahli syariat.
- j.) Beberapa upaya dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang zakat dan kinerja pemerintah dalam sebuah majalah zakat yang diterbitkan secara terpusat dan terkadang program radio lokasi dan televisi serta artikel di surat kabar.
- k.) Pengelolaan zakat dipakistan tidak mengadopsi prinsip perencanaan. Pengamatan ini berlaku untuk semua tingkatan, baik pada lembaga pemerintahan maupun swasta. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang oleh administrasi manajemen untuk merencanakan cara bertindak dalam pencapaian target, sehingga mengurangi efesiensi dan mempengaruhi kinerjanya.
- l.) Meskipun peraturan zakat memuat aspek audit dan pengendalian kinerja dari aspek berbagai tingkat manajemen dan akun mereka, pemerintah belum melakukan ini dengan sepenuhnya. Bagan organisasi dari pusat dan administrasi provinsi tidak ada departemen untuk audit dan control, tidak ada personal untuk melaksanakan tugas ini terutama dengan besarnya jumlah Komite zakat lokal yang sangat membutuhkan bimbingan, supervisi, kontrol dan audit.

Dewan Zakat Pusat (*Central Zakat Coucil*) pada level nasional yang terdiri dari 16 anggota dengan diketahui seorang

hakim Mahkamah Agung, yang tugasnya adalah mengontrol dan membuat kebijakan penyaluran dana zakat.

Dewan Zakat Provinsi (*Provincial Zakat Council*) ada di setiap provinsi, yang terdiri dari 10 anggota yang diketahui seorang hakim Pengadilan Tinggi. Badan ini mengikuti pedoman yang dikeluarkan.

Dewan Zakat Lokal (*Local Zakat Commitees*) dan melakukan kontrol di tingkat kabupaten, kecamatan dan lokal.

Komite Zakat Kabupaten di masing-masing kabupaten yang dipimpin oleh seorang anggota *non-Official* dan wakil komisaris sebagai anggot. Badan ini mengawasi pemilihan Komite Zakat Lokal dan juga mengawasi pengumpulan *ushr*, sumbangan dan pemanfaatan dana yang diterima oleh komite zakat lokal.

Komite Zakat Lokal yang terdiri dari tujuh anggota yang bersifat *non-official*. Anggotanya dipilih oleh Komite Zakat Kabupaten yang memilih satu dari mereka sendiri untuk menjadi ketua. Identifikasi dan verifikasi kebutuhan layak serta pencairan dana zakat kepada mustahik adalah tanggung jawab Komite Zakat Lokal, yang bekerja atas dasar sukarela.

Secara umum, pengelolaan zakat di Pakistan adalah tersentralisasi pada CZF dengan 16 anggota pengurus, yang dipimpin secara kolektif oleh Hakim Agung Pakistan, yang terdiri dari 8 anggota non pemerintah yaitu Ketua Zakat Fund, Sekretaris Federal, Menteri Keuangan, Menteri Agama dan 4 Kepala Zakat Provinsi.

Setiap muslim warga negara yang memiliki harta melebihi nisbah diwajibkan membayar zakat, dan zakat langsung dipotong dari harta muzaki tertentu. Harta zakat diklasifikasi menjadi dua. Pertama, aset yang langsung dikeluarkan zakatnya berdasarkan UU, terdiri dari 11 jenis aset yaitu: (1) rekening tabungan di bank; (2) rekening tabungan khusus (*notice deposit account*); (3) rekening deposito; (4) sertifikat tabungan; (5) NIT unit; (6) sertifikat ICP; (7) sekuritas pemerintah; (8) saham perusahaan; (9)

anuitas; (10) polis asuransi jiwa; dan (11) Dana Pensiun Pemerintah (*provident funds*). Pemerintah atau lembaga keuangan yang mendapatkan otoritas, dapat memotong zakat atas 11 aset tersebut secara langsung tanpa persetujuan dari pemilik.

Klarifikasi kedua, merupakan aset selain 11 jenis di atas diserahkan kepada muzaki untuk menghitung dan membayarnya. Jenisnya meliputi uang tunai, emas, perak, surat berharga, perdagangan, industri, dan sebagainya. Zakat atas item tersebut tidak dipotong langsung oleh bank yang ditunjuk CZF, tapi diserahkan sepenuhnya kepada muzakki dengan cara menghitung sendiri (*self-assessment*). Zakat ini boleh dibayarkan melalui organisasi pengelola zakat, baik di tingkat pusat maupun daerah atau langsung ke mustahik, baik perorangan maupun lembaga. Sejak berlakunya UU zakat dan ushr 1980, selama tiga dekade (1981-2010) jumlah dana zakat yang dapat dihimpun pemerintah Pakistan umumnya mengalami peningkatan yang cukup berarti. Pada 1981,

dana zakat yang terhimpun adalah Rs 844 juta. Pada 2015, meingkat menjadi Rs 4.665 juta. Kemudian, pada 2010 turun menjadi Rs 4.222 juta. Jumlah tertinggi terjadi pada 1999 yang mencapai 6.512 juta.

Dana zakat tersebut dsalurkan kepada empat provinsi dengan proporsi sesuai persentase jumlah penduduk. Yaitu, Punjab (57,36%), Sindh (23,71%), Khyber Pakhtunkhwa (13,83%), dan Baluchistan (5,11%). Berdasarkan UU Zakat dan Ushr 1980, yang berhak menerima zakat ada tujuh sektor, yaitu tunjangan hidup, tunjangan pendidikan umum; tunjangan pendidikan agama; kesehatan; kesejahteraan sosial; bantuan pernikahan; dan rehabilitas. Jumlah dana zakat yang disalurkan dan penerima manfaat zakat dari tahun ke tahun berfluktuasi. Misalnya, pada 2001-2002, jumlah dana zakat yang disalurkan adalah Rs 5.254 juta dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.710.000 jiwa. Kemudian, pada 2002-2003 naik menjadi Rs 8.009 juta dengan

penerima manfaat 1.754.000 jiwa. Periode ini termasuk yang tertinggi. Sedangkan yang terendah terjadi pada periode 2008-2009 yaitu sebesar 2.877 juta dengan penerima manfaat sebanyak 1.085.378 jiwa.<sup>108</sup>

Tahun perhitungan zakat menggunakan tahun Qamariah dengan awal mulai bulan Ramadhan. Pemotongan zakat dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank, yang kemudian dana tersebut dikirimkan ke CFZ. Rekening dana zakat ini dipisahkan dari rekening pemerintah dan pengelolaannya menjadi wewenang mutlak CZF.

Pendistribusian zakat diberikan kepada delapan muzakki dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin, terutama para janda, anak cacat, baik melalui penyaluran langsung tunai ataupun program seperti beasiswa sekolah, biaya rumah sakit. Dan sebagainya. Kebijakan distribusi alokasi zakat ditargetkan 60 persen untuk fakir miskin, 18% untuk biaya pendidikan umum, 8% untuk biaya pendidikan agama, 6% untuk kesehatan dan 4% untuk kesejahteraan sosial dan 4 % untuk biaya pernikahan.

## **C. Saudi Arabia**

### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Saudi Arabia**

Pengaturan zakat di Saudi Arab dimulai tahun 1951 berdasarkan pada Keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 yang menetapkan sistem wajib zakat. Keputusan pertanggal 7 April 1951 ini berbunyi: “ Zakat syar’i yang sesuai dengan keputusan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.” Dalam keputusan tersebut,

---

<sup>108</sup> Indonesia Magnificence of Zakat, Indonesia Zakat & Development Report 2012: Soal Kebijakan dan Hal Lain Yang Belum Paripurna, IMZ, Jakarta, 2012.

zakat diwajibkan sesuai prinsip syariah Islam kepada individual dan perusahaan yang berkewarganegaraan Arab Saudi.<sup>109</sup>

Menurut Keputusan Raja ini, zakat tidak dikenakan atas nonwarga Arab Saudi, sehingga nonwarga hanya dikenakan pajak pendapatan. Sebaliknya, warga Arab Saudi tidak dikenakan pajak da zakat diperlakukan sebagai pengganti pajak. Untuk pengelolaannya, Departemen Keuangan Arab Saudi membentuk bagian khusus yaitu Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan (*Maslahat Az-Zakat wa Ad-Dakhl*). Hal ini kemudian menimbulkan persepsi masyarakat yang mengidentikkan zakat dengan pajak. Kebijakan yang membolehkan sebagian zakat disalurkan langsung oleh muzaki menjadi salah satu sebab keberhasilan program ini dan terlihat dari besarnya penghasilan zakat dibandingkan dengan penerimaan pajak pendapatan.

Dalam beberapa aturan turunannya, negara memberikan izin kepada muzaki untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada muzakki maksimal setengah (50%) dari zakat yang dibayarkandan setengahnya harus disetorkan ke Departemen Keuangan. Sedangkan untuk muzaki perusahaan diharuskan menyetor seluruh zakatnya ke Departemen Keuangan.

## **2. Karakteristik Tata Kelola Zakat Arabia**

Kewenangan penghimpun zakat seluruhnya menjadi kewenangan menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional, mulai dari aspek kebijakan hingga teknis pelaksanaan penghimpunan. Sedangkan aspek penyaluran zakatdiserahkan kepada Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan , terutama dibawah Departemen Sosial.

Tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan pada garis besarnya ada empat, yaitu:

- a. Melakukan pengumpulan zakat dan pajak dari piha-pihak yang diwajibkan untuk membayarnya. Pembayaran zakat

---

<sup>109</sup> Indonesia Magnificence Of Zakat, *Indonesia Zakat & Development Report 2009 Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, IMZ, Jakarta, 2009. h. 105



(2,5%) sifatnya wajib bagi perusahaan Arab Saudi dan pajak (20% atau sesuai dengan perjanjian bilateral Penghindaran Pajak Berganda) diwajibkan kepada perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha/bisnis di Arab Saudi.

- b. Memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengecekan atas harta kekayaan perusahaan dan jumlah zakat yang wajib ditunaikan atau nilai pajak yang harus dibayarkan ke kas negara.
- c. Tidak memiliki kewenangan untuk menagih zakat dari perorangan/individu. Bagi perorangan/individu, kewajiban zakatnya diserahkan kepada masing-masing individu.
- d. Hanya memiliki kewenangan pengumpulan atau pemungutan. Dalam penyalurannya, untuk zakat disalurkan khusus kepada kedelapan muzaki sebagaimana ketentuan syariat melalui Kementerian Sosial Arab Saudi yang berkewenangan membiayai pengeluaran keamanan sosial. Sedangkan penerimaan pajak masuk ke dalam rekening penerimaan pajak.

Setiap warga negara individu diwajibkan membayar zakat, tetapi ia boleh menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahiknya atau melalui yayasan sosial. Jika sudah membayar zakat, ia tidak ditarik oajak lagi. Dana pajak akan digunakan untuk membiayai kelangsungan negara, sedangkan dana zakat akan disalurkan melalui Departemen Sosial sesuai dengan peruntukannya, yaitu delapan kelompok mustahik. Berbeda dengan zakat individu, zakat perusahaan harus dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan. Setiap perusahaan yang telah membayar zakatnya akan mendapatkan sertifikat tanda telah membayar zakat, sertifikat ini akan memudahkan perusahaan itu untuk memperpanjang izin usahanya. Bagi perusahaan yang tidak memiliki sertifikat menandakan perusahaan itu tidak membayar zakat, sehingga izin usahanya tidak diperpanjang lagi.

Bagi perusahaan yang pemiliknya dan muslim atau asing, mereka tidak wajib membayar zakat namun wajib membayar pajak. Kondisi ini memperjelas aturan bahwa zakat dibayarkan oleh perusahaan milik muslim, sedangkan pajak dibayar oleh perusahaan milik non muslim. Pembayaran zakat yang seperti ini memastikan bahwa kewenangan resmi untuk menghimpun zakat hanya ada pada pemerintah. Hal ini serupa dengan masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa itu, pengumpulan dan pengelolaan zakat di bawah kewenangan negara.

Objek zakat meliputi semua jenis aset atau kekayaan yang pengelolaannya dilakukan oleh departemen terkait. Misalnya, zakat ternak dikelola oleh Komisi Bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut “Al-A’wamil” yaitu komisi khusus untuk tuangnya adalah melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok daerah dan hasilnya disetorkan ke Departemen Keuangan. Demikian pula zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan uang dan zakat pendapatan (khusus pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, pegawai hotel, seniman, biro travel), maka zakatnya dipotong dari rekening masing-masing muzaki. Cara perhitungan nisab didasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

Dalam pendistribusian zakat, Pemerintah Arab Saudi memfokuskan pada penyediaan jaminan sosial bagi warganya, yang pendistribusiannya melalui Kementerian sosial dan Tenaga Kerja. Penentuan mustahik merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh departemen tersebut dengan nilai antunan sekitar 6.000 riyal (mata uang Arab Saudi) atau sekitar 15.000.000 rupiah pertahunnya.

Pengelolaan zakat oleh badan zakat dan pajak ini, terutama dalam hal megumpulan zakat dan pajak, telah menggunakan sistem *online*. Mereka punya pusat data dan informasi yang lengkap dengan dukungan *Information and Communication Technology* (ICT). Dengan dukungan ICT ini terjadi peningkatan penerimaan zakat yang signifikan. Pada tahun 2012, kenaikannya meningkat

mencapai 18% atau jumlahnya menjadi 23,3 miliar SAR (Saudi Arabian Riyal). Ini terdiri dari penerimaan zakat perdagangan yang lebih dari 11 miliar SAR dan pendapatan penghasilan kena pajak perusahaan-perusahaan asing mencapai 12 miliar SAR. Kenaikan ini terjadi juga karena tumbuhnya perekonomian Arab Saudi tahun 2011.

Dalam perkembangannya, kementerian ini mengembangkan infrastruktur zakatnya dengan membuka kantor-kantor cabang di berbagai kota seperti Jazan, Najran, Arar, dan Al-Jouf. Tidak hanya itu, Arab Saudi juga telah menandatangani 31 perjanjian dengan negara-negara asing untuk upaya menghindari pajak berganda. Setelah berhasil membukuka penerimaan zakat dan pajak yang tinggi, kementerian yang menghimpun dana zakat dan pajak ini mentransfer dana tersebut ke rekening milik Badan Moneter Harian Arab Saudi untuk kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkannya.

#### **D. Yordania**

##### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Yordania**

Pegaturan zakat di Kerajaan Yordania dimulai tahun 1944 dengan menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat. Yordania erupakan megara Islam pertama yang melahirkan undang-undang zakat, yaitu UU yang mewajibkan pemungutan zakat di negara Kerajaan Hasyimite Yordania.<sup>110</sup> UU ini membuat zakat wajib aoda semua umat Islam di Yordania, namun dibatasi aplikasinya terbatas hanya untuk ternak, tanah dan barang-barang impor. UU yang berlaku sampai tahun 1953 ini tidak berdasarkan nishab, dan tarif yang ditetapkan oleh hukum itu jauh di bawaah tingkat wajib zakat yang ditentukan oleh syariat. UU tersebut menetapkan struktur organsasi yang terdiri dari suatu lembaga yang

---

<sup>110</sup> Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Penerbit FOZ, 2016). h.44-45

independen dan dewan administratif yang diangkat oleh pemerintah. Mengenai distribusi zakat yang dikumpulkan di bawah pengawasan Dewan Menteri Negara, untuk menentukan kriteria kemiskinan yang layak mendapatkan zakat. UU tahun 1944 ini tidak memberikan konsesi pajak kepada wajib zakat, atau setara bagi non muslim.

UU zakat tahun 1944 ini dihapus pada tahun 1953 sejalan dengan berlakunya UU Pajak Pelayanan Sosial sampai dengan tahun 1978 di mana UU Zakat yang baru dikeluarkan. UU 1953 memberlakukan pajak pelayanan sosial sebagai bagian dari pendapatan pajak. Penerimaan dari pajak ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dalam hal pencairan uang tunai dan membantu badan-badan amal, seperti panti asuhan, kamp-kamp pengungsi, dan lain-lain.

Undang-undang zakat tahun 1978 menyediakan pembentukan sebuah lembaga otonomi zakat dalam domain pelayanan wakaf. Lembaga ini menerima dana zakat atas dasar sukarela dan diijinkan untuk menerima sumbangan selain zakat. Distribusi dana dari lembaga tersebut utamanya disalurkan oada kategori layak penerima zakat. UU tahun 1978 ini memberikan konsesi pajak sebagai insentif untuk pembayaran zakat dengan mengurangi jumlah zakat yang dibayarkan dari penghasilan kena pajak.

UU ini berjalan melalui dua amandemen yang memungkinkan pemerintah menrima donasi dan meningkatkan insentif pajak. Sedangkan untuk pembayaran dana zakat dengan menaikkan jumlah pengurangan sampai lebih dari seperempat kali utuk jumlah zakat penuh yang dibayar. Berbeda dengan tindakan 1944, tindakan 1978 sevara eskplisit mengatur pencairan dana untuk kategori orang miskin dan yang layak menerima didefinisikan sesuai dalam syariat.

Dana bantuan nasional didirikan pada tahun 1986 dengan tujuan menyediakan bantuan darurat untuk orang-orang dan

keluarga yang membutuhkan. Dana ini berafiliasi dengan pelayanan pembangunan sosial dan dibiayai oleh anggaran tahunan dan penjatahan pendapatan pajak. Selain itu, dana ini dibandingkan dengan dana zakat, diberi kewenangan yang lebih luas dan akses ke pelayanan-pelayanan yang memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dana ini dikelola pada tingkat nasional terlepas dari agama calon penerima dan karyawan.

Ditahun 1988, ditetapkan UU mengenai lembaga amal zakat yang disebut dengan UU *Shubduq Az-Zakat* tahun 1988, undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen dan hak penuntutan macam aturan, dan petunjuk teknis pelaksanaan zakat yang efektif.

Lingkup dan fokus dari UU zakat ini ada lima hal pokok yaitu:

- a.) Peningkatan keikutsertaan para dermawan dan lembaga donor.
- b.) Penguatan jaringan terhadap lembaga sosial dalam dan luar negeri.
- c.) Jangkauan ke seluruh pelosok kerajaan Yordania, terutama terhadap daerah miskin.
- d.) Transparansi terhadap seluruh kegiatan shunduq.
- e.) Integrasi dan kontribusi sektor lain terhadap sektor zakat.

Dengan tingginya tujuan UU itu, maka dibentuklah Dewan Direksi Shunduq yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan Tempat-Tempat Suci. Anggota Dewan Direksi ada 10, yaitu lima perwakilan pemerintah dan lima perwakilan swasta. Wakil ketua yaitu Sekretaris Jendral dari Kementerian Wakaf, Mufti besar Kerajaan Yordania, Direktur Shunduq Zakat, Perwakilan dari Kementerian Keuangan, Perwakilan dari Kementerian Pertumbuhan dan Sosial.

Dalam operasionalnya, shunduq Yordania mendukung kelompok kerja yaitu komisi zakat, yang terbesar diseluruh pelosok. Ada lima tugas utama dari komisi zakat ini, yaitu:

- a.) Memantau, memetakan kemiskinan di masyarakat dan mendistribusikan bantuan kepada mereka sesuai hasil studi kelayakan;
- b.) Mendirikan klinik layanan kesehatan dan operasionalnya untuk para muzaki;
- c.) Mendirikan pusat-pusat pendidikan untuk penganggur;
- d.) Menciptakan lapangan kerja, seperti proyek investasi untuk para muzaki;
- e.) Mendirikan pusat-pusat usaha rumahan dengan melakukan pelatihan-pelatihan.

## **2. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Yordania**

Pengelolaan zakat di Yordania memiliki beberapa karakter, di antaranya, adalah:

- a.) Dana zakat yang otonom tetapi dikelola oleh direktorat kecil dalam pelayanan wakaf
- b.) Direktorat memiliki struktur organisasi struktur organisasi yang sama sebagai pelayanan wakaf, yaitu memiliki pusat manajemen di ibukota dan bagian di provinsi –provinsi, pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan di pusat dan provinsi.
- c.) Selain direktorat zakat, terdapat 43 komite zakat sukarela yang meliputi berbagai bagian negara. Setiap komite memiliki dana sendiri yang independen dari dana pusat.
- d.) Model pendistribusian zakat yang ditetapkan cukup inovatif. Misalnya, seorang muzaki bisa menunjuk calon penerima (mustahik) tertentu, dan setelah dievaluasi oleh direktorat, direktorat dapat memutuskan untuk menerima dana tersebut atau mentransfernya ke penerima yang ditunjuk . dalam cara ini pembayar/muzaki mendapatkan konsesi pajak.

- e.) Sebuah dana cadangan yang dibentuk sekitar 100% ditransfer setiap tahun untuk tujuan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan layanan rawat inap dan rehabilitasi kepada anggota dengan Kategori yang layak menerima. Ini berarti bahwa dana zakat di Yordania tidak ketat dalam memegang prinsip tamlik zakat.
- f.) para ahli syariah membuat Integritas Dana Zakat dengan pelayanan wakaf yang dimaksud oleh Direktorat Zakat. Ini memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari support tambahan dalam aspek pelayanan dan ulama. Dalam operasionalnya, pemerintah mewajibkan Dana Zakat ini untuk mengikuti prosedur dan peraturan pemerintah.
- g.) Penerimaan Zakat diminta untuk mengisi aplikasi dan menghadiri wawancara dan kadang-kadang seorang petugas dikirim ke tempat tinggal pemohon untuk verifikasi. Sebelum keputusan dibuat, pencarian biasanya dibuat untuk sumber-sumber lain yang tersedia, bantuan terutama dari dana bantuan baru yang dibentuk secara nasional
- h.) Direktorat Zakat mempersiapkan rencana tahunan untuk kegiatan . Namun, karena kecilnya ukuran direktorat dan keterbatasan sumber daya membuat target tidak terlalu ambisi dan sulit tercapai target.

Model pendistribusian zakat di Yordania dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dalam bentuk bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim dan program pemberdayaan SDM produktif. Model program pemberdayaan cukup bervariasi, di antaranya yang cukup unik adalah :

- a.) Program pemberdayaan pertanian dan peternakan produktif di wilayah perkampungan. Bentuk programnya ada delapan, yaitu pemeliharaan sapi perah, pemeliharaan kambing g syarat, pembuatan produk berbasis susu, peternakan lebah, ayam pedagang, kelinci, pembuatan produk hasil pertanian dan program penanaman sayuran lokal

- b.) Program industri kecil dan kerajinan, program ini meliputi 10 jenis dengan prinsip peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga miskin. Sepuluh program tersebut adalah tenun pakaian adat, kerajinan bordir, realita budaya setempat, kerajinan berbasis pasir, seni kaligrafi kaca, seni merangkai bunga, kerajinan keramik, permadani sajalah, permadani Arab dan piring hias.
- c.) Program pelatihan keahlian, seperti elektro, servis peralatan rumah tangga, jasa perhotelan, dan sebagainya.
- d.) Program pemberdayaan wanita.
- e.) Layanan kesehatan kepada orang miskin, kerjasama dengan rumah sakit dan apotek untuk memberikan keringanan biaya.







## **BAB VII**

# **REGULASI DAN TATA KELOLA ZAKAT DI NEGARA YANG TIDAK MEWAJIBKAN ZAKAT**

### **A. Bangladesh**

Pada tahun 1982, Bangladesh mengeluarkan Zakat Fund Ordinance untuk mengatur pengelola zakat. Zakat Fund Ordinance 1982 Aini pernah mengalami aransemen setahun berikutnya, yaitu pada 1983. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Bangladesh membentuk Dewan Zakat yang bertugas menyusun kebijakan manajemen dan administrasi zakat dari fungsi-fungsi lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan UU tersebut. Zakat Board ini dibentuk pada tanggal 5 Januari 1982 yang terdiri dari 3 anggota yaitu:

- Ketua dan wakil ketua yang ditunjuk oleh pemerintah dari kalangan ulama
- Sekretaris Direktorat Keagamaan (Religious Affair Division), ex-officio
- Direktur Jenderal, Yayasan Islam (Islamic Goundation), ex-officio
- Sembilan ilmuwan muslim yang ditunjuk oleh pemerintah

Meskipun penduduk Bangladesh mayoritas muslim, namun praktik zakat di negara tersebut belum cukup menggambarkan hal ini. Menurut Hossain, disebabkan karena beberapa faktor, yaitu: pertama, kurangnya pengetahuan umat Islam di Bangladesh tentang pentingnya zakat dan potensi zakat. Kedua, adanya sentimen antireligius dalam kalangan intelektual sejak perang kemerdekaan Bangladesh dimana ketika sesama muslim saling menempatkan darah, umat hidup mengalirkan

bantuan kepada salah satu kelompok muslim sehingga sekularisme menjadi basis konstitusi di Bangladesh. Ketiga, para perencana strategi pengenalan kemiskinan, baik dari kalangan pemerintah maupun LSM, merupakan hasil dibikin "barat" yang menganggap ide keagamaan sebagai sesuatu hal yang non-progresif. Keempat, terjadinya peristiwa 9/11 yang semakin menambah kecurigaan nonmuslim terhadap umat islam, tak terkecuali di Bangladesh.<sup>111</sup>

Dana Zakat Bangladesh tidak hanya disalurkan dalam bentuk karikatur, tetapi disalurkan dalam berbagai bentuk program, seperti layanan kesehatan untuk anak-anak miskin, beasiswa bagi pelajar miskin dan berprestasi, bantuan modal usaha berupa pemberian becak, mobil van, mesin jahit, binatang ternak dan unggas sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah untuk tuna wisma, pemberian modal dan asisten pembangunan usaha mikro, dan penanggulangan bencana. Tidak seperti Pakistan, data penghimpunan dan distribusi zakat di Bangladesh tidak tersedia dan di asumsikan jumlahnya sangat kecil.

## **B. Kuwait**

### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Kuwait**

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait dapat disimpulkan menjadi tiga tahap utama.<sup>112</sup> Tahap pertama, zakat dikelola secara pribadi dan sukarela, langung didistribusikan oleh muzaki. Tahap kedua, aktivitas kolektif Seiring dengan berkembangnya bangsa Kuwait dan tuntunan perkembangan ekonomi perdagangan yang menjadi sumber penghasilan penting secara nasional. Tahap ketiga, aktivitas terlembaga di awal abad ke-20. Embrionya adalah berdirinya "Perhimpunan Kebajikan Arab" (Al-jamiyyah Al-Khoiriyah Al Arabiyyah) tahun 1931 M.

---

<sup>111</sup> Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016). h. 200

<sup>112</sup> Kuntarno, dkk, op.cit. h. 49-52

Dalam perkembangannya, pengelolaan zakat diarahkan pada otoritas dan pengawasan negara yang direpresentasikan oleh dua kementerian, yaitu:

- a.) Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, yang tugasnya mengarahkan kerja Baituz Zakat Kuwait sekaligus mengurus lembaga milik pemerintah;
- b.) Kementerian Sosial dan Tenaga kerja yang bertugas mengurus lembaga zakat swasta.

Pada 16 Januari 1982, pemerintah Kuwait menerbitkan UU No 5/82 tentang Pendirian Baitul Zakat. Baitul Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung oleh Menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan 10 anggota. Anggota terdiri dari wakil Menteri Wakaf dan Urusan Islam, Wakil Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, Kepala Rumah Tangga Istana, dan enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang ditentukan oleh Pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Namun, hukum zakat ini adalah paket sistematis pertama di sejarah modern negara itu. Karakter utama dari peraturan zakat di Kuwait adalah

- a.) Peran pemerintah terbatas untuk mengatur upaya pengumpulan dan distribusi zakat. Untuk tujuan ini, Lembaga otonom pemerintah telah membentuk afiliasi dengan pelayanan wakaf, lembaga ini disebut Baituz Zakat. Tidak ada pengumpulan wajib yang diatur dalam hukum zakat. Baituz Zakat menerima secara sukarela yang ditawarkan oleh individu maupun sebagai donasi, kontribusi dan hibah dari individu dan swasta serta badan publik. Tidak adanya kewajiban membayar zakat ke Baituz zakat ini, nyatanya tidak dipertanyakan atau dipersoalkan oleh pembayar yang religius, warga negara dan sekolah hukum. Oleh karena itu Baituz Zakat diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak manapun.

- b.) UU dan peraturan yang terkait tidak memaksakan Baitul Zakat untuk menerima zakat dan sumbangan. Baituz Zakat telah menetapkan bagian tertentu untuk menerima dan menyalurkan zakat dalam bentuk tertentu. Disisi lain lembaga ini dapat menerima ushr serta zakat pada setiap jenis harta tetap, selama hal itu diberikan kepada lembaga atas dasar sukarela.
- c.) karena Kuwait tidak memiliki pajak penghasilan atau pajak kekayaan, maka peraturan tersebut tidak membuat referensi atau aturan apapun untuk konsesi pajak , juga tidak menyebutkan kerahasiaan catatan dan informasi zakat

## **2. Model Pengelolaan Zakat Di Kuwait**

Undang-undang zakat di Kuwait memberikan bentuk manajemen inovatif yang menciptakan sebuah organisasi untuk mengelola zakat (Baitut Zakat) yang memiliki sisi kebebasan dalam penyesuaian aturan-aturan yang diperlukan dan peraturan yang merumuskan organisasi yang terstruktur, cara melakukan kegiatan dan prosedur pemberian pelayanan kepada penerima dan pemberi rakat potensial. Sebagai hasilnya, Baituz Zakat di Kuwait telah membentuk sebuah organisasi yang dilengkapi dengan baik dan memiliki teknik ilmiah dalam menangani tugasnya. Aspek utama dari jenis manajemen ini adalah sebagai berikut:

- a.) Baituz Zakat telah menempatkan penekanan khusus pada perencanaan dan memperkenalkan ide-ide baru dengan menciptakan sebuah departemen untuk penelitian dan perencanaan. Telah juga dibentuk departemen untuk pelayanan sosial, hubungan masyarakat dan kegiatan luar negeri. Lembaga ini mempekerjakan pekerja sosial laki-laki dan perempuan untuk dapat mencapai keluarga miskin yang biasanya sulit dijangkau karena kerendahan hati mereka dan keinginan untuk menghindari perhatian publik.
- b.) Beberapa ide-ide dan proyek baru telah diperkenalkan oleh Baituz Zakat Ini termasuk: proyek keamanan sosial anak

yatim, dana siswa miskin, dana amal permanen, proyek pelatihan, tunjangan dana mahasiswa, unit posel untuk digunakan dengan menyediakan layanan dari pintu ke pintu, proyek pinjaman, proyek untuk mempublikasikan Qur'an, proyek distribusi daging qurban, dan lain lain.

- c.) Sumber pendapatan Baituz Zakat termasuk zakat, bantuan dari pemerintah, donasi umum, amal, dan pengembalian atas dan investasi. Baituz Zakat memelihara akun yang terpisah untuk setiap jenis sumber dana dan kemudian menggunakannya sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dalam syariat dan oleh pendonor. Berbagai sumber daya keuangan telah memungkinkan organisasi zakat ini untuk mendiversifikasi tujuan-tujuannya dengan memasukan layanan tersebut, seperti pinjaman dan pembangunan bangunan amal, yang pembiayaannya melalui zakat.
- d.) Pemerintah Kuwait menanggung semua beban administrasi organisasi zakat.
- e.) Baituz Zakat memiliki akses langsung ke ahli syariah melalui badan konsultatif yang dibentuknya. Dengan bantuan badan ini, Baituz Zakat telah mampu melakukan beberapa informasi kegiatan yang bertujuan menciptakan kesadaran di antara pembayar zakat dan penerima. Untuk tujuan ini, beberapa brosur informasi telah dipublikasikan.
- f.) Kendati upaya untuk menjangkau orang-orang yang membutuhkan dan miskin masih bergantung pada aplikasi yang disampaikan oleh individu yang potensial, namun Baituz Zakat Kuwait masih belum mampu meninggalkan metode ini menuju pendekatan humanistik.
- g.) Selain Baituz Zakat, masih ada beberapa komite sukarela yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengelola zakat berupaya untuk mengorganisir para komite dan bekerja sama dengan mereka dalam memberikan

pelayanan pada pemberi dan penerima zakat. Sebuah peraturan dikeluarkan oleh pelayanan wakaf dalam rangka untuk mengatur pembentukan dan pelaksanaan komite tersebut dan untuk memberi mereka dukungan, namun bantuan dan kontrol tetap melalui Baituz Zakat.

## **C. Mesir**

### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Mesir**

Dalam tiga dekade hingga tahun 1980-an, penegakan hukum zakat di Mesir telah mengalami beberapa upaya namun belum menunjukkan kesuksesan. Mesir memiliki jaringan penghimpunan dan pendistribusian zakat berbasis sukarela yang sangat besar sejak dulu. Jaringan zakat di Mesir terdiri dari empat elemen utama, yaitu:

- a.) Komite sukarela yang tidak teratas dengan komite badan public;
- b.) Komite wakaf dan perusahaan berafiliasi dengan relawannya;
- c.) Nasir Social Bank dan relawannya;
- d.) Mesir Faisal Bank dan relawannya.

Oleh karena fungsi penegakan hukum zakat belum berhasil, maka akibatnya zakat dibayarkan sukarela untuk komite ini dan didistribusikan kepada orang layak dan keluarga sesuai dengan kebijakan penuh dan pengambilan Keputusan dari relawan.

Namun, sebuah preseden unik muncul dalam UU No 48 Tahun 1977 yang mendirikan Faisal Islamic Bank of Egypt. Undang-undang ini mewajibkan bank untuk memotong zakat pada modal dan keuntungan pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank. Undang-undang ini tidak memberikan insentif atau konsensi pajak untuk para pembayar zakat pada Mesir Faisal Islamic Bank atau lembaga pengumpul zakat lainnya.

## **2. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Mesir**

Lahirnya Bank Sosial Nasir pada tahun 1971 merupakan tonggak awal pengelolaan zakat di Mesir. Bank yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ini diberi tanggung jawab membuat proyek-proyek kesejahteraan sosial. Sejak berdirinya, Bank Nasir telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Bank mendirikan pusat direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini memiliki aksesibilitas untuk semua cabang bank. Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, direktorat ini telah mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.

Fitur utama pengelolaan zakat Bank Nasir dapat diringkas sebagai berikut:

- a.) Struktur administratif bank menyediakan direktorat zakat pusat di kantor pusat bank dengan bagian cabang cabangnya yang mencakup daerah perkotaan dan sebagian besar pusat-pusat pedesaan di negara ini. Direktorat zakat memiliki hubungan dengan komite bantuan sukarela di mana mereka diberikan dukungan manajerial, termasuk dukungan akuntansi, dukungan organisasi, bimbingan dan bahan informasi, bantuan keuangan bila dipandang perlu.
- b.) Bank bertanggung jawab atas semua pengeluaran administratif direktorat zakat dan bagian dalam cabang-cabang bank
- c.) Setiap komite zakat memiliki rekening bank sendiri untuk penerimaan dan penyaluran zakat. Selain itu, bank memelihara rekening zakat terpisah di pusat dan cabang untuk zakat yang dibayar langsung ke bank.
- d.) Bank menjaga kerja sama erat dengan Kementerian Wakaf yang menyediakan ahli syariah.
- e.) Peraturan dan perundangan yang diadopsi oleh bank dalam pengelolaan zakat sangat fleksibel, sehingga memungkinkan direktorat dan komite zakat untuk bebas



merancang proyek dan menerapkan ide-ide sesuai dengan keinginan pembayar dan penerima zakat. Sebagai contoh organisasi zakat (direktorat dan komite) menerima pembayaran dalam bentuk tunai dan dalam bentuk natura dan pembayaran yang umum atau yang dirancang khusus untuk golongan penerima tertentu target khusus. Organisasi zakat menerima zakat, sumbangan, amal, dan dana sosial yang dipercayakan, dan lain-lain Selain itu, pembentukan komite zakat sangatlah fleksibel. Sebuah komite dapat dibentuk di tempat manapun, baik itu masjid, sekolah, pabrik, kantor pemerintah, desa di beberapa bagian kota, atau daerah manapun di mana beberapa orang merasa perlu dan memiliki waktu serta relawan

- f.) Seluruh organisasi zakat menunjukkan kemampuannya untuk diversifikasi layanan dan menciptakan ide-ide dan proyek untuk merespon berbagai kebutuhan. Berbagai sumber daya yang tidak terbatas pada zakat saja, juga sangat membantu. Selain melayani kebutuhan orang miskin dan melarat, organisasi zakat menyediakan pelatihan pelayanan medis di klinik dan rumah sakit yang disponsori oleh zakat, tunjangan bagi Penghafal Al Qur'an, kelas privat untuk meningkatkan kemajuan akademik siswa miskin, penitipan anak untuk anak-anak kecil yang ibunya bekerja, pembangunan masjid, pengajaran bahasa asing, jasa pemakaman, berkemah dan fasilitas olahraga untuk anak-anak dan remaja miskin, dan lain-lain. Penyaluran zakat yang ditawarkan oleh Bank Nasir sangat bervariasi seperti berbuka puasa bersama di bulan Ramadhan untuk orang miskin dan untuk para musafir, mobil karavan untuk peduh zakat dan penyaluran, pameran tahunan untuk produk yang disponsori oleh pusat pelatihan zakat: dan perjalanan haji, Penyaluran zakat dapat berupa sponsor dalam serangkaian kuliah informasi dan budaya. Perlu dicatat bahwa distribusi

rakat oleh Bank Nasir tidak terlalu ketat pada penerapan prinsip tamlik.

- g.) Komite zakat telah mengembangkan kemampuan untuk menjangkau orang-orang yang layak menerima zakat. Oleh karena itu, aplikasi penerima zakat potensial bukanlah satu-satunya metode penyaluran zakat yang dilakukan manajemen Bank Nasir. Komite lokal biasanya mensurvei lingkungan mereka dan mencari orang yang membutuhkan. Anggota Komite merekomendasikan calon penerima dan proyek penerima zakat kepada Direktorat Zakat di Bank.

Selain Bank Sosial Nasir, Mesir Fasal Islamic Bank telah membentuk dana zakat sendiri. Sumber daya ini terdiri dari dana zakat yang dinilai dari modal dan keuntungan pemegang saham sebagaimana disyaratkan oleh peraturan Bank Zakat dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito investasi dan setiap sumbangan lainnya dan zakat yang diberikan oleh pihak manapun. Dana zakat dari Mesir Faisal Islamic Bank ini telah tumbuh melampaui batas dana individu yang berafiliasi dengan perusahaan, karena daya akses bank ini untuk sejumlah besar investasi dan banyaknya cabang di berbagai daerah.

## **D. Malaysia**

### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Malaysia**

Malaysia dikenal sebagai negara yang sukses mengelola zakat. Namun, sebelum periode 1980-an, pengelolaan zakatnya pernah mengalami kondisi yang terbengkalai. Ketika itu, belum ada sistem dan sosialisasi zakat, sehingga penghimpunan dana zakatnya relatif masih sangat rendah. Melihat kondisi itu, Majelis Agama Islam (MAI) yang memiliki otoritas besar dalam pengelolaan zakat membuat terobosan dengan membentuk Pusat Pungutan Zakat (PPZ). Untuk pengelolaan haji, MAI yang berada dalam kementerian nondepartemen ini membangun Tabung Haji (TH). Kedua lembaga ini sekarang menjadi rujukan beberapa negara di

luar Malaysia. Gagasan pembentukan PPZ ini sudah ada sejak bulan Mei 1989, namun baru berjalan pada 1 Januari 1991. Kurun waktu dua tahun tersebut digunakan MAI untuk melakukan beberapa kajian tentang peningkatan penghimpunan zakat, seperti struktur dan sistem organisasi, model kampanye, dan kiat-kiat marketing. Dalam hal ini, MAI bekerja sama dengan konsultan asing, Coopers & Lybrand.

Dari hasil kajian tersebut, PPZ menjadi perusahaan murni yang hanya bertugas menghimpun zakat. PPZ berada di bawah koordinasi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang juga memiliki lembaga lain yang bertugas khusus sebagai penyalur dana zakat, yaitu Baitul Maal (BM). PPZ berkedudukan Seajar dengan BM. CEO (Pejabat Eksekutif Tertinggi) pertama yang memimpin PPZ adalah Moh. Dahlan bin Abdul Latief, seorang profesional muda. Dibawah Kepemimpinannya, PPZ menjadi lembaga zakat profesional yang diresmikan oleh pemerintah yakni oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, pada Maret 1991.

Sejak berdirinya PPZ, pengelolaan zakat di Malaysia mengalami perubahan cukup signifikan. Sebagai akibatnya, model pengelolaan zakat ala PPZ ini dicontoh secara luas di negara-negara bagian Malaysia. Kini, selain Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur, lima negeri bagian lain seperti Malaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan juga memiliki PPZ yang Independen. Delapan negeri lainnya tidak memiliki PPZ tersendiri, namun memiliki BM yang selain bertugas menyalurkan juga menghimpun zakat. Ini menandakan pengelolaan zakat di Malaysia itu tidak secara nasional. ke-14 negeri bagian itu diberi hak mengelola zakatnya masing-masing.

Secara umum, model kelembagaan zakat di Malaysia terbagai jadi tiga kelompok setelah dibentuknya PPZ ini, yaitu, korporasi, semi korporasi, dan badan usaha milik negara. Penghimpunan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh korporasi

atau PPZ berada di Selangor, Serawak dan Pulau Pinang. Sementara yang dilakukan oleh semi korporasi penghimpunan zakat oleh PPZ, tapi penyalurannya oleh MAI (Baitul Maal)] berada di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, dan Pahang. Sedangkan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, penghimpunan dan penyaluran zakatnya dilakukan oleh MAI (pemerintah) atau Baitul Maal di tujuh negara bagian sisanya.

Karena pengelolaan zakat ada di masing-masing negara bagian, regulasinya juga berbeda-beda. Ini memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran. Misalnya, penafsiran nishab, harta wajib zakat, sanksi untuk muzaki yang tidak membayar zakat, dan definisi delapan muzaki yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena lembaga zakatnya independen di masing negara bagian, maka pada Maret 2004 Perdana Menteri Badawi mendirikan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (jawazh). Jawazh ini ada di bawah kantor Perdana Menteri dan menjalankan fungsi koordinasi seluruh lembaga zakat di Malaysia. Dengan adanya koordinasi ini, pengelolaan zakat Malaysia tergolong berhasil, terutama dalam hal penghimpunan zakat. Misalnya, pada 2010, total zakat yang bisa dihimpun lembaga zakat se-Malaysia mencapai 1.360, 82 juta RM atau sekitar Rp3,64 trillun, Ini tentu lebih besar bila dibandingkan dengan total dana zakat yang berhasil dihimpun oleh lembaga amal zakat Indonesia.

Semua jenis zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada lembaga pengelola zakat di Malaysia mendapat insentif sebagai pengurang pajak. Di samping itu, terdapat budaya kerja BM yang berorientasi profesional di mana karyawan diposisikan sebagai aset, bekerja secara tim, dan dibekali oleh pelatihan pelatihan. Dalam operasional BM, pemerintah memberikan anggaran tersendiri. Dengan adanya dana tambahan dari pemerintah itu, maka makin banyak dana yang bisa digunakan untuk membantu kaum dhuafa, baik berupa dana pendidikan maupun berbagai latihan keterampilan, seperti menjahit, bengkel, dan catering lewat Institut

Kemandirian yang didirikan BM. BM juga membangun Institut Profesional dan Institut Pengajian Tinggi. Dengan membangun berbagai hal itu, nyatanya dana BM masih berlebih. Maka, dana berlebih ini diinvestasikan ke berbagai bisnis, seperti perdagangan dan perumahan.

Mengikuti struktur politik di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing negeri (negara bagian) dan negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung Jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majlis Perundang-undangan Negeri. Setiap negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat, namun harus berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri.

Kebebasan dalam kompetensi pembuatan undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi kesalahan tidak membayar zakat dalam akta atau undang-undang kesalahan pidana syariah. Perkara-perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya. Namun demikian, jika peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan addendum (facia enakmen) dan tidak dimasukkan ke dalam Lembaran Negara, maka tidak boleh ditegakkan hukumannya. Berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia, ada tiga aspek utama berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia. Pertama, Jenis-jenis zakat yang dikumpulkan oleh lembaga resmi. Kedua, dakwaan pada pelanggaran pelaksanaan zakat. Ketiga, bentuk serta jumlah hukuman dan denda yang boleh dikenakan.<sup>113</sup>

Berikut ini adalah Undang-undang yang mengatur tentang zakat berdasarkan 14 Negeri Di Malaysia :

---

<sup>113</sup> Ibid., h. 208

Tabel 7.1.  
Pengaturan Negara bagian di Malaysia tentang Zakat

Negeri	UU/Peraturan	Keterangan
1.Kelantan	<p>1. Notis Zakat Kelantan Tahun 1907;</p> <p>2. Notis zakat No. 3 Tahun 1916;</p> <p>3. Notis Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1917; 4. Notis Tahun 1916 dipinda oleh Notis Zakat No. 2 Tahun 1924;</p> <p>5. Enakmen kutipan zakat Kelantan (pindaan) 1927 (No. 4);</p> <p>6. Enakmen Majelis Ugama Islam dan Adat Istiadat Mlayu Kelantan no. 23 tahun 1938 memperkenalkan 2 peraturan : a. Peraturan Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1938; b. Peraturan Kutipan Zakat No. 74 Tahun 1938.</p> <p>7. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1; 8. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan 1966 No. 2;</p> <p>9. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994.</p>	<p>Diperkenalkan oleh Majelis Mesyuarat Negeri atas nasihat Inggris. UU ini di-mansûkh oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1 Kelantan menerapkan UU Zakat dan Fitrah ini. Mahkamah Syariah punya peran aktif untuk memantau kutipan zakat. Contoh dalam kes ‘Majelis v. Musa &amp; lain-lain’, Mahkamah mengenakan denda kepada 16 orang karena gagal membayar fitrah pada tahun 1947. Setiap mereka didenda RM15 atau dipenjara selama sebulan berdasarkan seksyen 8 Peraturan Kutipan Fitrah 1938.</p> <p>Di-mansûkh dengan Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan 1966 No. 2.</p> <p>Di-mansûkh oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994</p>
2.Terengganu	UU Zakat Terengganu tahun 1947	
3.Perlis	1. Peraturan-peraturan mengutip zakat dan	

	<p>fitrah tahun 1930 (Minit Paper Kerajaan AP. 50/583);</p> <p>2. Enakmen Zakat dan Fitrah Perlis (No. 3) Tahun 1949;</p> <p>3. Melalui Enakmen Tahun 1949 ini, keluar Peraturan Zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1950 (LN. 14 of 51-s.s.Ps.531/1950 yang menghapus Peraturan Kutipan Zakat dan Fitrah Tahun 1930;</p> <p>4. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis (pindaan) 1966 No. 6, membatalkan Enakmen Tahun 1949, sementara Peraturan tahun 1950 tidak ada penjelasan masih berlaku atau sudah dihapuskan;</p> <p>5. Peraturan Tabdiran Zakat Padi pada tahun 1978 yg ditetapkan tanggal 10 Januari 1978 melalui Titah DYMM Sultan Kelantan dalam M.A Laporan Tahunan Jabatan Zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1953 melaporkan 10 orang petani yang enggan membayar zakat telah didakwa dan dihukum penjara.</p>	
4.Perak	<p>Peraturan Zakat dan Fitrah Tahun 1952 No. 1222 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen</p>	<p>Tahun 1953 sebanyak 52 orang telah didakwa karena gagal membayar fitrah. Tahun 1953,</p>

	Baitulmal Zakat dan Fitrah Perak Tahun 1951.	tercatat sebanyak 69.000 orang, dan 84.000 orang tahun 1954 yang tidak membayar fitrah di seluruh Negeri Perak. Tahun 1956 Pejabat Agama Islam Negeri Perak telah menemukan sejumlah 49 orang di daerah Selama dan 38 orang di daerah Setiawan yang gagal membayar Fitrah.
5.Johor	1. Enakmen Zakat dan Fitrah Johor Tahun 1957; 2. UU ini dipindah tahun 1962 (Peraturan Zakat dan Fitrah Johor tahun 1962.	Semua UU dari No. 1-5 telah dimansûkh.
6.Kedah	1. Enakmen Zakat Kedah Tahun 1955 (No. 4); 2. Pindaan tahun 1962; 3. (Pindaan) Peraturan zakat Kedah Tahun 1982 (K.P.U 11).	Masih berlaku sampai hari ini. Tahun 1965 sampai 1966, ada 36 kasus kesalahan zakat. Hasil penelitian Mohd Ali Baharom menjelaskan bahwa sebelum tahun 1965 dan setelah tahun 1966 tidak pernah ada pendakwaan karena jawatan merinyu zakat yang bertanggung jawab menerapkan UU zakat adalah seorang Inspektor Polis pencen yang berpengalaman. Keengganan untuk membayar zakat di Kedah tahun 1965 dan 1966 itu dibagi 4: 1.Keengganan memberi maklumat kepada amil keluasan tanah yang



		<p>ditanam padi;                  2.Keengganan membayar zakat;                  3.Kesalahan menerima zakat tanpa tauliahkesalahan;                  4.Yang dilakukan oleh amil.</p> <p>Tahun 1986, tercatat bahwa seorang petani di Kampung Sedekah Kedah pernah di dakwah dan dihukum sebanyak tiga kali karena tidak membayar zakat padi.</p> <p>Hasil penelitian Scott tahun 1986 mengatakan bahwa ada kelemahan dalam tindakan hukum bagi petani padi yang enggan membayar zakat. Hak ini disebabkan oleh faktor sosial politik. Faktor sosial adalah amilamil yang ditugaskan memungut zakat tidak mampu menerapkan karena pendapatan mereka tergantung kepada petani-petani tersebut. Faktor politik adalah ketegasan amill nantinya akan menyebabkan kehilangan dukungan masyarakat terhadap partai politiknya.</p> <p>Faktor lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perubahan mendasar oleh pihak pengelola zakat;</li> <li>2. kekurangan pakar dan tenaga di bidang</li> </ol>
--	--	---

		<p>pendakwaan;</p> <p>3. takut kepada tindak balas pembayar zakat yang enggan;</p> <p>4. kedudukan undang-undang yang tidak kuat;</p> <p>5. UU zakat tidak bisa memaksa pihak bank untuk mengekspos simpanan (tabungan) Muslim yang dipandang berkewajiban membayar zakat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang cukai (pajak) pendapatan. (Menurut Aidit Ghazali tahun 1988);</p> <p>6. pengelola zakat enggan untuk menerapkan kutipan zakat karena beranggapan bahwa keengganan membayar zakat kepada Majelis Agama bukan kesalahan yang serius. Jika ditindak, pihak yang mangkir kemungkinan menerima hukuman yang berat;</p> <p>7. sebagian UU atau peraturan zakat tersebut tidak diberitakan penerapannya</p>
7. Selangor	1. Aturan Pentadbiran Ugama Islam (fitrah dan zakat) 1953 no.	Peraturan ini memansukh peraturan tahun 1953 dan 1969

	<p>1033 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam 1952 no. 3;</p> <p>2. (Pindahan) SLP.U. 53 tahun 1969;</p> <p>3. Peraturan Kutipan dan Pembagian zakat Fitrah Selangor (pindaan) tahun 1973;</p>	
8. Malaka	<p>Peraturan menjalankan kerja-kerja zakat dan fitrah Malaka tahun 1960 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam Malaka 1959 No. 1.</p>	<p>Tidak ada penjelasan apakah peraturan ini masih berlaku setelah peraturan zakat dan fitrah, urusan wakaf, dan baitulmal Negeri Melaka tahun 1982</p>
9. Serawak	<p>(UU kecil) UU zakat dan fitrah Serawak tahun 1966 (Swk. L.N. 94) yang ditetapkan berdasarkan UU Melayu Serawak (Cap. 51)</p>	<p>UU kecil ini akhirnya diserap ke dalam Majelis Islam (incorporation) Ordinance cap. 105 (Reprinted) 1972).</p>
10. Pahang	<p>UU kecil tahun 1970 yang ditetapkan berdasarkan kaedah zakat dan fitrah Pahang 1970 (Phg.mP.U. 18)</p>	<p>Pahang adalah Negeri yang paling aktif memberikan dakwaan di mahkamah berhubungan dengan kutipan zakat dan fitrah. Tahun 1985 ada 28 kasus, tahun 1986 ada 13 kasus dan tahun 1987 ada 126 kasus.</p>
11. Sabah	<p>Enakmen zakat dan fitrah Sabah Tahun 1993 No.6</p>	<p>Enakmen ini berdasarkan kepada draf UU zakat yang dibuat oleh jawatan kuasa Teknikal Hukum Syarak dan Sivil. Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri (Sekarang</p>

		Jabatan Kemajuan Islam Malaysia/JAKIM). Banyak kesamaan antara draf Enakmen zakat dan Fitrah Sabah tahun 1993 no. 6 dengan draf UU JAKIM ini (Draf Akta zakat Wilayah Persekutuan)
12. Wilayah Persekutuan	1. Kaedah Baitulmal Wilayah Persekutuan (perbelanjaan dan penggunaan) 1980 (P.U.(A) 154; 2. Kaedah tahun 1988 (P.U.(A) 436); 3. Kaedah tahun 1996 (P.U.(A)58).	
13. Negeri Sembilan	Negeri Sembilan Kaedah zakat Negeri Sembilan 1998	

## 2. Karakteristik Pengelolaan Zakat di Malaysia

Organisasi pengelolaan zakat di Malaysia berdiri pada bulan Mei 1989 dengan nama Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ tumbuh dibawah akta syariaat pada tahun 1965 dan merupakan sebuah entiti syarikat di bawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Pemisahan dari birokrasi pemerintahan saat itu dikarenakan untuk meminimalkan semua jenis birokrasi yang tidak terlalu mendukung adanya PPZ. Hasilnya, PPZ juga dilihat semakin baik dalam meningkatkan pemungutan zakat melalui aktivitas dakwah dan pemasaran yang lebih maju dan modern.

Secara umum, PPZ adalah subyek di bawah satu kelompok lembaga pengarah yang diketuai oleh seorang ketua dan beberapa anggota termasuk Direktur Jabatan Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) dan Multi Wilayah Persekutuan. Manakal urusan *tadbir*, PPZ diketuai oleh seorang pengurus besar dan dibantu oleh

2 orang yaitu di bagian manajer operasi dan satu lagi di bagian administrasi dan keuangan. Kedua bagian ini akan didukung oleh unit-unit tertentu untuk memperkuat berjalannya di dalam sektor-sektor tertentu berdasarkan perkembangan dan kebutuhan saat ini.

Beberapa keberhasilan PPZ telah diraih dalam beberapa aspek, yaitu:

- a.) Menanamkan budaya korporasi di kalangan anggota atau sifatnya.
- b.) Memperkenalkan konsep amal korporasi yang menarik dan sistematis.
- c.) Membangunkan sistem komputer yang canggih, cepat dan tepat, melalui penggunaan Sistem Integrasi Zakat (SIZ) yang mengintegrasikan sistem pungutan zakat, operasi dan administrasi PPZ di dalam satu jaringan online yang komprehensif dan mampu menghasilkan output yang diinginkan di dalam konteks pengurusan/manajemen zakat.
- d.) Mewujudkan pejabat yang modern, nyaman dan khusus.
- e.) Mengamalkan kualitas layanan yang berorientasi kepada pelanggan.

PPZ sebagai organisasi yang diamanahkan untuk mengambil zakat bagi pihak baitulmal MAIWP, juga berperan melaksanakan proyek berbentuk kebajikan/kemanusiaan kepada umat Islam di dalam dan luar negeri. Proyek dan program yang dilaksanakan oleh PPZ sebagai bukti keprihatinan dan kepeduliannya terhadap masalah umat, yaitu :

- a.) Mewujudkan Skwad Bantuan Kecemasan (SBK) untuk membantu korban-korban bencana alam di sekitar Kuala Lumpur dalam waktu 24 jam setelah kejadian.
- b.) Mendirikan pusat dialisis PPZ-MAIWP untuk membantu pembiayaan biaya pengobatan hemodialisis bagi pasien ginjal yang kurang mampu.
- c.) Bekerjasama dengan pihak baitulmal Nanggroe Aceh Darussalam membiayai kehidupan 265 anak-anak yatim di

Aceh pasca tsunami, penghimpunan dana yang disalurkan dari seluruh donatur di Malaysia.

- d.) Memberikan makanan dan minuman bergizi secara gratis kepada golongan dhaif dan fakir miskin di Kuala Lumpur seminggu sekali kecuali di bulan Ramadhan.
- e.) Menyumbangkan buku-buku agama Islam kepada umat Islam di Kamboja sebagai usaha memelihara akidah mereka yang hidup miskin sebagai akibat sikap pemerintah yang kurang peduli tentang kehidupan masyarakat muslim di sana.

Walaupun pengelolaan zakat di Malaysia berada di bawah 14 buah negeri yang berlainan, pada dasarnya hanya ada 2 cara pengelolaan zakat yang dilaksanakan, yaitu :

1. Cara urus tadbir korporasi/swasta;
2. Cara urus tadbir kerajaan negeri atau pemerintahan.

Penjelasan kepengurusan tadbir korporasi: Majelis Agama Islam Negeri Malaysia telah melahirkan sebuah badan yang terpisah dari kepengurusan/manajemen pemerintah yang bersifat mandiri, namun tetap diwajibkan bertanggungjawab untuk melaporkan segala aktivitas dan prestasi organisasi kepada Badan Kerajaan Negara. Contoh negara-negara yang menggunakan cara seperti ini :

1. Pusat Pungutan Zakat Persekutuan
2. Lembaga Zakat Selangor
3. Pusat Urus Zakat (Pulau Pinang)
4. Pusat Kutipan Zakat (Pulau Pahang)
5. Pusat Zakat Negeri Sembilan (Negara Sembilan)
6. Pusat Zakat Malaka
7. Pusat zakat Sabah.

Dari 7 buah organisasi di atas, hanya Lembaga Zakat Selangor dan Pusat Urus Zakat (Pulau Pinang) yang diberikan tanggungjawab mengalokasikan zakat secara sepenuhnya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan; sedangkan yang lain hanya

mengumpulkan saja sementara yang mendistribusikan zakat masih dilakukan baitulmal Majlis Agama Islam negeri masing-masing.

Selanjutnya cara untuk tadbir kerajaan negeri tanggungjawab mengalokasikan zakat dilaksanakan 100% oleh badan kerajaan negeri yaitu Majlis Agama Islam negeri-negeri sebagai berikut:

1. Majlis Agama Islam Johor
2. Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak
3. Jabatan Zakat Negeri Kedah
4. Majlis Agama Islam Dan Adat-Istiadat Melayu Perlis
5. Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Kelantan
6. Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu
7. Tabungan Baitul Sarawak.

Selain itu, kerajaan Malaysia juga membentuk jabatan wakaf, zakat dan hajidi bawah Perdana Menteri Malaysia untuk menyelaraskan dan memajukan pengurusan manajemen zakat di Malaysia. Gagasan tentang pembentukan Dewan Pengelolaan Zakat Malaysia (LUZAM) belum dapat direalisasikan karena, sebagaimana dipaparkan di atas, bidang kuasa *pentadbiran* agama Islam adalah di bawah tanggungjawab masing-masing negeri.

## **E. Indonesia**

### **1. Latar Belakang Sejarah dan Regulasi Zakat di Indonesia**

Sejarah panjang pergerakan zakat di Indonesia dimulai sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, sebelum masa penjajahan Belanda sebelum abad ke-16, zakat telah dilaksanakan, baik secara sukarela ataupun diwajibkan. Di beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Banjar, zakat telah dikelola oleh kerajaan layaknya pajak.

Pada masa penjajahan, Pemerintah Hindia belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi

mengeluarkan zakat harta mereka.<sup>114</sup> Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat. Namun, pada awal abad 20, diterbitkanlah peraturan yang tercantum dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905. Dalam peraturan ini, Pemerintah Hindia Belanda tidak lagi mencampuri urusan pengelolaan zakat, dan sepenuhnya pengelolaan zakat diserahkan kepada umat Islam.

Perhatian Pemerintah terhadap organisasi pengelola zakat mulai meningkat sekitar tahun 1968. Saat itu, diterbitkanlah peraturan Menteri Agama Nomor 4 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kotamadya.

Pada periode Orde Baru, 1967-1998, pengembangan zakat dilaksanakan atas anjuran Presiden yang diutarakan dalam pidatonya saat memperingati Isra' Mi'raj di Istana Negara, 22 Oktober 1968. Setelah itu, dibentuklah Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) di berbagai provinsi. Sebelum tahun 1999, pengelolaan zakat di setiap daerah atau provindi bisa berbeda-beda, baik dari aspek lingkup, hingga program dan institusinya. Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama, berperan sebagai lembaga Amil Zakat tingkat nasional yang memiliki cabang di setiap provinsi dan kabupaten kota. Di sisi lain, pengelolaan zakat oleh individual ataupun swasta tetap diizinkan dengan tanpa adanya insentif ataupun sanksi yang diatur oleh peraturan. Berbagai peraturan menteri dikeluarkan sebatas untuk meningkatkan efektivitas kinerja BAZIS. Misalnya, Instruksi menteri Agama Nomor 2 tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infak Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan. Pada 12 Desember 1989, dikeluarkan pula Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang

---

<sup>114</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998, h. 32-33



Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah. Pada 1991, dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Zakat, Infak, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis BAZIS.

Baru pada tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian, dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Undang-undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah (mulai dari pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk tingkat pusat, dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat daerah.

Secara garis besar, UU NO. 39 Tahun 1999 memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, serta dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. UU ini juga mengatur beberapa hal pokok, yaitu tujuan utama pengelolaan, bentuk organisasi pengelola zakat, pengumpulan, dan pendistribusian zakat, pengawasan.

Dalam perjalanannya, UU ini tidak mampu mendorong tumbuh dan efektif kerjanya BAZIS, baik di tingkat nasional maupun daerah dan provinsi. Di sisi lain, lembaga amil swasta justru semakin tumbuh pesat hingga lahirlah beberapa organisasi pengelola zakat berskala nasional, seperti Dompot Du'afa, DPU Darut Tauhid, PKPU, Rumah Zakat, dan sebagainya.

Belum optimalnya pelaksanaan UU zakat ini disebabkan oleh kurang lengkapnya lingkup pengaturan maupun kekurangjelasan dan menariknya sistem yang diatur. Di antaranya, UU ini belum mengatur tentang pengelolaan zakat secara integratif

nasional, termasuk tata kelola organisasi pengelola zakat yang profesional.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat ini, maka dikeluarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang sempat diamandemen. UU ini memiliki beberapa perbaikan atau perubahan, yaitu:

- a) Koreksi terhadap pengertian dan definisi, misalnya cakupan mustahik.
- b) adanya sentralisasi pengelolaan zakat, di mana Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengelola yang disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan amil swasta difungsikan sebagai kepanjangan tangan BAZNAS.
- c) Adanya larangan dan sanksi individual atau pihak yang tidak berizin untuk mengelola zakat.
- d) Tata kelola zakat yang lebih detail.

**Tabel 7.2**  
**Pokok-pokok pikiran UU No.23/2011**  
**tentang Pengelolaan Zakat**

Kategori	Kandungan
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BAZNAS	Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melaksanakan pengelolaan zakat yang berkedudukan di ibukota Negara. Lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri (menteri yang dimaksud adalah menteri urusan agama (Pasal 1 dan Pasal 2). BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dari kegiatan pengelolaan zakat nasional (pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Pasal 3). Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi BAZNAS menyusun pedoman pengelolaan zakat yang menjadi acuan untuk BAZNAS

	provinsi, kabupaten/kota dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Pasal 4).
Keanggotaan BAZNAS	<p>BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Menteri (Pasal 5) dengan masa kerja 5 tahun dan dapat dipilih lagi satu kali masa jabatan (Pasal 6). Syarat anggota BAZNAS: WNI, Islam, takwa dan berakhlak mulia, usia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota politik, memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat dan tidak pernah dipidana dengan minimal kurungan 5 tahun.</p> <p>Anggota BAZNAS terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah (Pasal 8). Calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Menteri dengan sistem tim seleksi harus memilih calon anggota sebanyak 2 kali jumlah yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada Menteri (Pasal 9). Calon anggota dari unsur pemerintah berasal dari pejabat struktural eselon 1 yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang ditunjuk oleh menteri bidang dalam negeri serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan kemudian disampaikan kepada menteri (Pasal 10).</p> <p>Kemudian, menteri mengusulkan calon anggota BAZNAS kepada Presiden, dan Presiden memilih 8 orang dari unsur masyarakat kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan (Pasal 11). Setelah mendapatkan pertimbangan anggota BAZNAS dari unsur masyarakat, ditetapkan menjadi anggota BAZNAS bersamaan dengan penetapan dari 3 orang anggota dari unsur pemerintahan dengan Keputusan Presiden (Pasal 12).</p> <p>Anggota BAZNAS diberhentikan apabila: meninggal dunia, habis masa jabatan,</p>

	mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus-menerus atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.
Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS	Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS, dibentuk unit pelaksana, yang bukan dari pegawai negeri sipil yang telah diatur dalam Peraturan Menteri (Pasal 31). Untuk melaksanakan pengelolaan zakat di tingkat daerah, dibentuk BAZNAS provinsi oleh Menteri atas usulan Gubernur dan dipertimbangkan BAZNAS, dan bertanggungjawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi (Pasal 32), kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian atas usulan bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, dan bertanggungjawab terhadap BAZNAS Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota, kemudian diberhentikan oleh bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS (Pasal 39). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) sesuai dengan Peraturan Ketua BAZNAS (Pasal 46).
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS	BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang membawahi maksimal 4 bagian jabatan fungsional (Pasal 47). Sekretariat BAZNAS bertugas memberi dukungan teknis dan administratif. Sekretariat BAZNAS dibina oleh dan bertanggungjawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada menteri.
Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat	BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ secara

	<p>langsung. Pengumpulan melalui UPZ dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, BUMN, perusahaan swasta nasional atau asing, perwakilan RI diluar negeri, kantor-kantor perwakilan negara/lembaga asing, dan masjid negara dengan disaranai oleh BAZNAS Provinsi (Pasal 54).</p>
<p>Persyaratan Organisasi, Mekanisme Perizinan, dan Pembentukan LAZ</p>	<p>Untuk membantu BAZNAS , masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 56) dengan mendapat izin dari menteri atau pejabat ditunjuk oleh menteri dengan syarat: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam, yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial atau lembaga berbadan hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawasan syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk memberdayagnakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala (Pasal 57).</p> <p>Izin pembentukan LAZ dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis, yang diajukan oleh pimpinan organisasi dengan melampirkan: 1) Anggaran Dasar; 2) surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; 3) surat keputusan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan HAM; 4) Surat rekomendasi dari BAZNAS; 5) Susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat; 6) surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; 7) program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat (Pasal 58).</p> <p>Pengajuan untuk pendirian LAZ dalam skala</p>

	<p>nasional diberikan kepada menteri; skala provinsi diberikan kepada direktur jendral menteri, dan dalam skala kabupaten diberikan oleh kepala kantor wilayah provinsi.</p> <p>Dalam komunitas atau wilayah tertentu belum terjangkau BAZNAS dan LAZ, maka kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat (alim ulama) atau pengurus/takmir masjid/mushala dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan (Pasal 66).</p>
Pembiayaan BAZNAS dan Penggunaan Hak Amil	<p>Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada APBN dan hak amil. Besaran hak amil ditetapkan sesuai dengan aspek syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat dan telah dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS dan disahkan oleh Menteri (Pasal 67).</p>
Laporan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ	<p>BAZNAS kabupaten wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan bupati/walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun; untuk BAZNAS Provinsi kepada BAZNAS dan Gubernur; sedangkan BAZNAS kepada Presiden melalui Menteri dan DPR dengan perbedaan waktu yang minimal 1 tahun sekali (Pasal 72).</p> <p>Sedangkan LAZ kepada BAZNAS dan pemerintah daerah (Pasal 73). Semua laporan pertanggungjawaban harus diaudit syariah dan keuangan oleh kementerian dengan bantuan akuntan publik.</p>
Sanksi Administratif	<p>BAZNAS atau LAZ menerima sanksi apabila: 1) tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki; 2) melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam; 3)</p>

	pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari keanggotaan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri (Pasal 82).
--	---

## 2. Karakteristik pengelolaan Zakat di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat diberikan kewenangannya kepada lembaga sosial kemasyarakatan ataupun lembaga negara. Organisasi kemasyarakatan dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan lembaga negara dikenal dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ). Berdasarkan peraturan terbaru, UU No 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat memiliki tiga peran utama yaitu penghimpunan, pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan. Dua kegiatan yaitu penghimpunan dan pendayagunaan, merupakan ujung tombak kembar organisasi zakat untuk terjun ke masyarakat. Sedangkan pengelolaan (keuangan) merupakan kegiatan yang sifatnya supporting.

Dalam struktur organisasinya, masing-masing kegiatan di bawah departemen atau divisi, dengan memiliki struktur yang dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi setempat. Mengingat suatu daerah dan daerah lain berbeda situasi dan kondisinya, ada lembaga zakat yang telah berkembang strukturnya menjadi lebih kompleks, namun ada pula yang strukturnya tetap sederhana. Struktur yang kompleks belum tentu menggambarkan lebih baiknya organisasi, dan juga struktur sederhana dari sebuah organisasi zakat tidak dapat menggambarkan bahwa organisasi itu lemah, karena pada dasarnya yang terpenting adalah profesionalitas dalam mengelola zakat.

### (a) Struktur Organisasi OPZ swasta LAZ

Sebagai organisasi yang tumbuh dari masyarakat, struktur LAZ terus berbenah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada Organisasi yang strukturnya bertahan dengan pola yayasan saat awal membangun, ada organisasi yang strukturnya dirombak menyesuaikan diri dengan LAZ yang

lain, dan ada pula LAZ yang berinisiatif, mengembangkan struktur organisasi sesuai dengan ekspansi kegiatan. Adanya perbedaan struktur ini tentu tidak mencerminkan perbedaan kualitas.

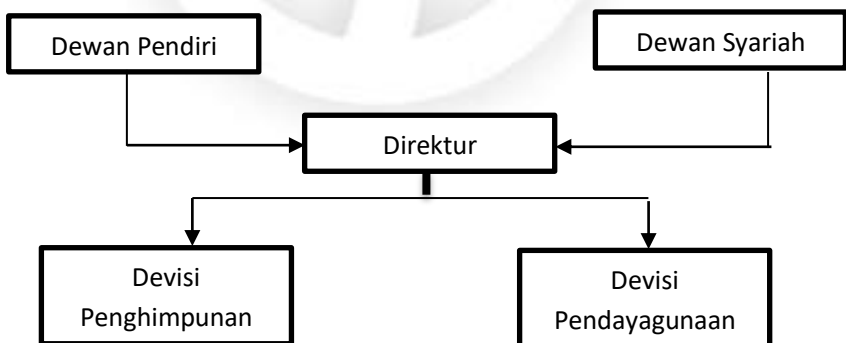
Dari sisi ukuran organisasi, organisasi LAZ tidak harus lebih kecil dalam segala hal, meskipun diyakini bahwa LAZ yang sadar diri untuk tetap ramping ialah yang akan tetap eksis. LAZ paham merancang diri untuk tetap efisien dan efektif, meski kegiatannya terus berkembang. LAZ diharapkan sadar untuk tidak terjebak dalam kompleksitas keragaman kegiatan. Dinamika perjalanan LAZ, ditandai dengan bongkar pasangnyanya struktur organisasi, dari jatuh bangunnya LAZ di Masyarakat.

Berikut ini tampilan tiga tipe struktur organisasi LAZ yang terus mengiringi pertumbuhannya, yaitu :

- 1) Struktur organisasi sederhana;
- 2) Struktur organisasi standar;
- 3) Struktur organisasi tumbuh.

Di bawah ini merupakan diagram dan penjelasan tipe struktur Organisasi yang ada pada LAZ :

- 1) Tipe struktur organisasi sederhana



Tipe sederhana ini umumnya digunakan oleh LAZ yang baru berdiri, meski sebenarnya tidak harus berstruktur seperti ini. Digunakannya struktur ini, lebih dikondisikan karena faktor kemampuan pendirian lembaga zakat, maksudnya terutama



berkisar diseputar kurangnya pendanaan awal serta minimnya SDM sebagai pihak amil. Agar efesiensi dan efektifitas kerja berjalan, struktur sederhana ini bisa di jalankan oleh dua orang amil. Pimpinan merangkapi semua ini, serta amil yang lain juga merangkapi semuanya kecuali sebagai pimpinan.

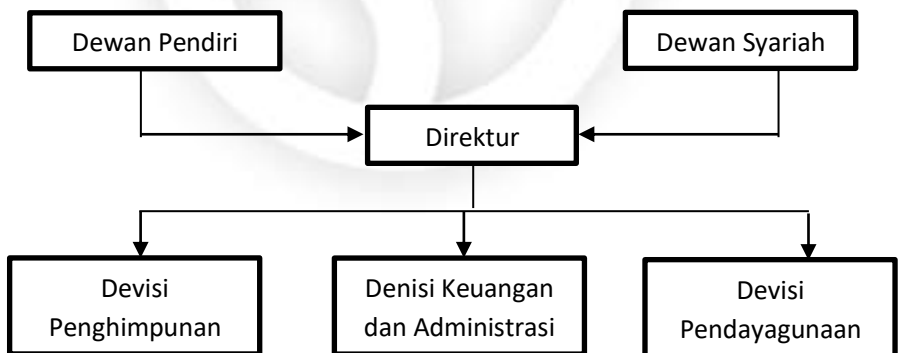
Dalam hal pendanaan, lembaga zakat yang dibangun di tingkat grassroad biasanya tidak memiliki dana operasional awal. Hal ini yang menjadi perbedaan mendasar Antara pendirian yayasan di Indonesia dan yayasan di luar negeri. Pendirian yayasan di luar negeri, banyak yang dimulai melalui pengisihan dana orang-orang kaya, sehingga profil lembaga dan struktur organisasi bisa langsung di rancang sesuai kehendak donator. Sementara di Indonesia, pendirian yayasan kebanyakan berangkat dari tingkat grassroad yang memiliki keterbatasan, sehingga SDM pengelolaan yayasan yang professional sangat terbatas. Kualifikasi dan persyaratan SDM calon pengelola tidak ditetapkan seperti diberbagai perusahaan yang mencari pegawainya. Bagi yayasan lokal, termasuk didalamnya lembaga zakat, hadirnya orang yang mau aktif mengurusnya sudah merupakan anugrah tersendiri. Karena itu, dengan SDM seadanya, pembagian tugas hanya diatas kertas. Struktur organisasi dibuat sekadarnya, dan saat operasional masing-masing bekerja sesuai intuisi dan tidak berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan.

Kurangnya SDM, minimnya dana dan fasilitas yang lain, sebaiknya disadari petugas yang ada. Perangkapan kerja dilakukan karena memahami kendala yang dihadapi lembaga. Sehingga dengan kesadaran itu justru membuat lembaga lebih efesien dan efektif perangkapan kerja bukan merupakan hal yang salah, namun yang keliru jika dilakukan dengan terpaksa sehingga terkondisikan lembaga menjadi sulit berkembang.

Dalam struktur organisasi sederhana, terutama pada LAZ grassroad, jabatan pimpinan biasanya dipegang oleh para pendiri organisasi. Kedudukan pendiri berada di atas pimpinan utama,

dengan tugas : 1) Menjadi penasihat, 2) Pembina organisasi, dan 3) pengawas organisasi. Pada masa awal, perangkapan tugas ini begitu kuat dan menjadi kiat yang tepat, sehingga mekanisme koordinasi lebih efisien dan efektif. Keputusan segera dapat di ambil dan program pun dapat segera bergulir. Dalam hal syariah, dapat dibuat semacam dewan syariah khusus meskipun baru merekrut satu orang. Kedudukan dewan syariah sejajar dengan badan pendiri dan berada diatas direktur. Dewan syariah berperan menyelamatkan organisasi zakat jika terjadi penyimpangan. Tugas pimpinan utama memang harus merangkap ditim penghimpunan dan sekaligus dalam tim pemberdayaan zakat, sementara manajer penghimpunan dapat difungsikan menjadi tim pendayagunaan dan bila perlu difungsikan juga yang memegang keuangan. Sementara itu, manajer pendayagunaan bisa juga difungsikan sebagai tim marketing. Dalam tahap awal, orang yang bekerja di organisasi zakat dapat dimulai dengan minimal tiga orang termasuk dengan pimpinan.

## 2) Tipe struktur organisasi standar



Tipe standar tidak banyak berbeda dengan tipe sederhana, perbedaan hanya terletak pada tambahan bidang keuangan dan administrasi. Personil dibidang keuangan tidak dapat merangkap apapun, baik dalam penghimpunan maupun pendayagunaan. Tujuan kebijakan ini agar keuangan benar-benar steril dan aman

dari penyimpangan. Karena pendiri sudah dapat melaksanakan fungsi penasihat dan pembinaan, fungsi pengawas pun sudah lebih optimal oleh adanya dewan syariah.

### 3) Tipe struktur organisasi tumbuh



Dalam tipe tumbuh, yang dikembangkan, berbagai bidang, baik bidang yang langsung dibawah wewenang direktur maupun bidang-bidang yang ditumbuhkan dibawah penghimpunan, keuangan dan pendayagunaan. Bidang-bidang tersebut dapat dibuat sesuai dengan kekuatan lembaga dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta lingkungan masyarakatnya. Bidang yang dikembangkan langsung dibawah wewenang direktur merupakan bidang yang tidak berkoodinasi pada penghimpunan, keuangan dan pendayagunaan. Sebagai contoh, bidang uang yang dikembangkan dibawah direktur adalah bidang litbang (penelitian dan pengembangan), corporate secretary, internal audit dan personalia.

#### (b). Struktur organisasi OPZ Pemerintah, BAZ

Dalam rancangan, seluruh struktur organisasi dibuat sama dari tingkat nasional yakni BAZNAS, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota dan BAZ Kecamatan. Dalam tipe organisasi, struktur organisasi BAZ merupakan tipe struktur organisasi tumbuh, karena memiliki struktur organisasi yang lebih lengkap namun hanya dapat dirancang oleh lembaga yang sudah mapan.

Bagi kementrian agama yang memiliki peran penting, perancangan dan implementasinya bukanlah hal yang sulit dengan fasilitas yang telah lengkap tersedia dengan dana yang cukup, kementrian agama dapata dengan leluasa melakukan hal perekrutan SDM untuk bergabung.

Menurut UU Nomor 23 tahun 2011, BAZ bisa langsung didirikan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, BAZ mendapatkan beberapa kemudahan : Pertama, BAZ dapat segera didirikan sebagai institusi resmi pengelolaan dana masyarakat. Kedua, untuk menjadi pengelola zakat di BAZ siapapun bisa mendaftar asalkan statusnya merupakan pegawai pemerintah, baik PNS, Militer atau pejabat pemerintah lainnya. Dan siapapun yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang secara otomatis telah masuk dalam tim pengelola zakat yang resmi di BAZ.

Struktur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Secara ringkas dapat dipaparkan dalam table dibawah ini variasi tata kelola, peran pemerintah dan regulasi, serta pengawasan zakat di beberapa Negara.

Table 7.3  
Regulasi dan UU Zakat di Negara-Negara OKI

No	Negara	Tingkat Regulasi Zakat	Lembaga Pengawasan	Manajemen Penghimpunan	Manajemen Pendistribusian
1.	Indonesia	Undang-undang pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 Peraturan pemerintah No.14 tahun 2014	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Zakat dikumpulkan melalui koordinasi oleh BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Zakat didistribusikan berdasarkan prioritas. Mengingat prinsip-prinsip ekuitas, kaedilan, dan territorial kedekatan zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif guna meningkatkan kualitas hidup.
2.	Malaysia	Hukum federal 1986 dan setiap Negara memiliki hukum zakat sendiri.	The state Islamic religious councils (SIRC's)	Zakat yang dikumpulkan dibawah 13 otoritas pemerintah lokal Negara bagian Malaysia dan 1 pemerintahan pusat	Semua 8 golongan ashnaf; pembayaran uang tunai atau barang atau ekuitas.
3.	Saudi arabia	RDec No.17/2/28/8634 tahun 1951 Keputusan mentri No.393 Mentri keputusan No. 394	Departemen zakat dan pendapatan pajak kementrian keuangan dan ekonomi Nasional	Individu dan perusahaan wajib membayar setengah dari kewajiban zakat mereka berdasarkan asset mereka.	Semua hasil zakat dihabiskan hanya untuk orang miskin dan ditransfer orang miskin ke Dept. asuransi social kecuali untuk pembayaran zakat tanaman dan buah-buahan melalui komite lokal.
4.	Kuwait	Hokum zakat (16 Januari 1982) terdiri dari 5 pasal UU No.46/2006	The zakat house of Kuwait berada dibawah ketua mentri waqaf dan agama Islam	Kontribusi sukarela oleh orang kaya Kuwait. Perusahaan harus membayar 1% dari keuntungan bersih untuk anggaran Negara dan mereka harus	Semua delapan kategori merujuk pada QS. At-Taubah:60.

## Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat

				membayar zakat mereka dengan baik.	
5.	Sudan	UU zakat dan pajak hokum Sudan, 1984. Terdiri dari 6 bab dan 46 pasal.	Zakat bureau of the ministry of buidance and direction	Pembayaran zakat(wajib) bagi setiap muslim di Sudan dan nonmuslim yang tinggal atau bekerja di Sudan. Untuk nonmuslim, wajib membayar pajak solidaritas social.	Hokum menyediakan pencarian zakat yang berada dalam jarak provinsi sama, kecuali diputuskan oleh presiden republic untuk transfer ke satu provinsi lain
6.	Jordan	UU zakat No.35(1944) dan terdapat empat belas pasal.	Dewan direksi dana zakat	Zakat yang dikumpulkan berdasarkan hokum dalam bentuk tunai, ternak, tanah, komoditas dan asset inpor	Pendistribusian ke orang miskin dan pengelola yang membutuhkan tidak melebihi 10%
7.	Pakistan	Pasal No.31 dalam konstitusi	Dewan pusat zakat yang dipimpin oleh seorang hakim dari mahkamah agung	Regulasi pengembangan dimandatkan dalam pengumpulan zakat dalam ketidakterlihatan kekayaan pada akun bank dan laporan kauangan dengan ekspektasi dalam perhitungan pada mata uang asing.	Pencairan zakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui sekolah, pendidikan, kejuruan dan lembaga kesehatan.
8.	Libya	Peraturan eksekutif hokum zakat 28 Oktober 1971	Sekretariat keamanan umum social/social security general secretaria	Zakat wajib pada koleksi emas, dan perak, hewan yang gembalakan dan pertanian yang menghasilkan.	Zakat hasil yang dibayarkan oleh organisasi untuk asuransi social dan dakwa Islami masyarakat
9.	Banglades	Peraturan zakat tahun 1982	Lembaga zakat yang terdiri dari dewan pusat dan dewan dari kabupaten	Pembayaran zakat secara sukarela	50% hasil zakat dicairkan melalui komite zakat local, sementara sisanya dicairkan malalui dewan pusat.
10.	Bahrain	Undang-undang No.8 tahun 1879	Dewan direksi dana zakat	Pembayaran zakat secara sukarela	Hak muzaki menunjukkan preferensi penerima

## Regulasi dan Tata Kelola Zakat di Negara yang Mewajibkan Zakat

			dipimpin oleh mentri pemerintahan		manfaat
11.	Libanon	23 Februari 1984	Komisi zakat yang diketuai oleh Muhtibeirut	Pembayaran zakat secara sukarela	Disesuaikan dengan syariah
12.	Brunei darussala m	Direvisi edisi tahun 1984 dari Undang- undang dewan agama Islam dan Undang-undang kadi pengadilan (bab 77)	Dewan Agama Islam Brunei	Mewajibkan pembayaran zakat	Pendistribusian dana zakat semata- mata adalah otoritas dewan Agama Islam brunei. Ada 6 muzaki di Brunei, Fatwa Mufti No.14 MKB 3 tahun 1969 yang tidak termasuk adalah budak dan fisabilillah(berjuan g dalam jalan Allah)

Sumber : berbagai sumber, Kuntarno dkk, 2006.; BI, Baznas, IRTI, 2004, Zakat Core Principle.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA MENGHITUNG ZAKAT MAL DAN CONTOH-CONTOHNYA**

#### **A. Langkah-langkah Menghitung Zakat**

Adapun langkah-langkah menghitung zakat terdiri dari hal-hal berikut :

1. Menentukan waktu perhitungan zakat dan penunaianya. Artinya seorang Muslim hanya menentukan untuk dirinya sendiri waktu tahunan untuk menghitung dan menunaikan zakat, baik berdasarkan penanggalan Hijriah atau qamariah.
2. Menentukan harta-harta yang wajib dizakati. Artinya seorang Muslim harus mendata harta-hartanya yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di depan.
3. Menentukan kewajiban-kewajiban (hutang-hutang) yang harus dibayarkan dari harta yang wajib dizakati, dengan syarat kewajiban-kewajiban tersebut jatuh tempo pada tahun depan.
4. Menentukan bejana zakat, yaitu jumlah bersih harta yang wajib dizakati. Caranya adalah dengan mengurangi harta pada nomor 2 dengan harta pada nomor 3. Persamaanya adalah sebagai berikut ; Bejana zakat = harta-harta yang wajib dizakati- (dikurangi) dengan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.
5. Menghitung kadar nishab sesuai dengan jenis zakat. Setiap harta memiliki nishab yang khusus. Jika bejana zakat mencapai nishab, selanjutnya zakat akan dihitung.
6. Menentukan prosentase zakat yang wajib diterapkan.
7. Menghitung kadar zakat dengan cara mengalihkan bejana zakat dengan prosentase zakat yang telah ditentukan. Persamaannya adalah sebagai berikut :

Kadar zakat= bejana zakat x prosentase zakat.



## B. Menghitung Zakat Harta Moneter

Hukum-hukum umum yang mengatur penghitungan zakat harta moneter adalah sebagai berikut :

1. Harta-harta moneter wajib dizakati. Dan dia dinamakan dengan zakat *naqdayn*.
2. Contoh harta moneter yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :
  - a. Emas dan perak batangan.
  - b. Uang kertas.
  - c. Uang emas dan perak.
  - d. Saham dan sejenisnya.
  - e. Piutang yang diharapkan akan dibbayar.
  - f. Rekening bank.
3. Hutang-hutang yang jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh muzakki kepada orang lain harus ditentukan.
4. Bejana zakat harta moneter adalah selisih antara jumlah harta moneter yang wajib dizakati dan hutang-hutang yang harus dibayarkan pada orang lain.
5. Kadar zakat dihitung dari jumlah bersih bejana zakat, jika dia mencapai *nishab* , yaitu seharga 94 gram emas murni.
6. Prosentase zakat harta moneter adalah 2,5 % setiap tahun berdasarkan penanggalah hijriah atau qamariah.

Berikut ini contoh praktis perhitungan zakat harta moneter (*zakat naqdyn*) :

Harta-harta yang wajib dizakati	Jumlah dalam bentuk rupiah
Emas batangan	Rp 100.000.000
Uang emas	Rp 50.000.000
Saham	Rp 100.000.000
Piutang yg pasti di bayarkan	Rp 50.000.000
Rekening di bank	Rp 200.000.000
Jumlah keseluruhan harta	Rp 500.000.000
Utang yang harus dibayarkan	Rp 150.000.000

Jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah ; kita harus menetapkan dulu jumlah harta bersih-dengan utang  $(Rp500.000.000.-150.000.000)= Rp 350.000.$  jadi wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah memenuhi nishab 85 gr emas. Dengan perhitungan 1 gram mas senilai Rp 700.000.  $(85 \times Rp 700.000 = Rp 59.500.000)$ . jadi zakat harta yang harus dikeluarkan selama kepemilikan 1 tahun ini adalah  $Rp 59.500.000 \times 2,5\% = Rp 1.487.000$

### C. Menghitung Zakat Perhiasan

Yang dimaksud dengan perhiasan adalah apa-apa yang digunakan untuk mempercantik diri oleh perempuan, baik terbuat dari emas, perak, berlian, maupun batu-batu mulia lainnya.

Fuqaha berselisih pendapat tentang zakat perhiasan perempuan. Para pengikut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa zakat perhiasan adalah wajib. Sebaliknya para pengikut Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, bahwa perhiasan tidak wajib dizakati. Sementara para pengikut Madzhab Syafi'I memandang bahwa perhiasan tidak wajib dizakati jika masih berada dalam batas kewajaran. Dan apa-apa yang melebihi dari batas kewajaran wajib dizakati dengan prosentase 2,5% setiap tahunnya. Pendapat inilah yang kita ambil, karena berlebih-lebihan dalam perhiasan di luar batas kewajaran tidak boleh.

Berikut contoh praktis Penghitungan Zakat perhiasan

Kita andaikan seorang wanita muslimah memiliki 500 gram perhiasan emas. Batas kewajaran memakai perhiasan dalam masyarakatnya adalah 200 gram. Jika harga perhiasan emasnya per gram adalah Rp 700. 000, maka zakatnya dihitung sebagai berikut:

- a. Berat perhiasan yang wajib dizakati adalah  $500 \text{ gram} - 200 \text{ gram} = 300 \text{ gram}$ .
- b. Kadar zakat yang wajib ditunaikan :  $300 \text{ gram} \times Rp 700.000 \text{ per gram} \times 2,5\% = Rp 5.250.000$ . Adapun nishabnya zakat emas  $(Rp 700.000 \times 85 \text{ gr emas}) = Rp 59.500.000$

#### **D. Menghitung Zakat Investasi Harta**

Hukum-hukum umum yang mengatur penghitungan zakat investasi harta adalah sebagai berikut ;

1. Yang dimaksud investasi harta adalah investasi dalam bentuk saham, surat, obligasi, cek, sertifikat investasi, deposito, tabungan dan sejenisnya.
2. Padanya diberlakukan zakat *naqdyn*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
3. Bejana zakat investasi harta adalah nilai keseluruhan investasi yang dihitung berdasarkan harga pasar pada akhir haul, dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan, jika ada.
4. Jika investasi harta ini memiliki keuntungan yang sudah diterima dan dalam bentuk yang halal, maka keuntungan tersebut ditambahkan padanya.
5. Jika bejana zakat mencapai nishab, yaitu seharga 94 gram emas murni, maka zakat dihitung dengan persentase 2,5 % setiap tahun.
6. Keuntungan investasi harta yang berbentuk riba tidak masuk ke dalam harta yang wajib dizakati, karena dia adalah harta yang haram dan kotor yang harus dihilangkan secara keseluruhan dengan menyalurkannya kepada kebaikan.
7. Zakat saham untuk investasi dan perdagangan dihitung berdasarkan harga pasarnya ketika waktu pembayaran zakat tiba. Jika itu tidak diketahui, maka nilainya dihitung berdasarkan pengetahuan para spesialis dalam bidang tersebut.
8. Saham yang dimiliki bukan untuk investasi dan perdagangan, tapi untuk memproteksinya dan ini yang disebut dengan saham jangka panjang, sebagian fuqaha berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah keuntungannya dengan prosentase 10% setiap tahun berdasarkan qiyas atas zakat pertanian.

9. Zakat surat obligasi untuk investasi dan perdagangan dihitung berdasarkan daftar nilai nominalnya. Sementara keuntungannya yang berbentuk riba dihilangkan dengan menyalurkannya kepada kebaikan dan bukan dengan niat sedekah, karena dia adalah harta yang haram atau kotor.
10. Zakat cek investasi Islam dihitung berdasarkan harga pasarnya, ditambah keuntungannya yang halal, jika tidak digunakan untuk kebutuhann-kebutuhan hidup.
11. Zakat sertifikat investasi dihitung berdasarkan daftar harga nominalnya. Sementara keuntungannya yang haram dihilangkan dengan menyalurkannya dengan kebaikan.
12. Zakat deposito pada bank-bank konvensional dihitung berdasarkan daftar nilai nominalnya pada akhir haul. Sementara keuntungannya yang haram dihilangkan dengan menyalurkan pada kebaikan.
13. Zakat rekening pada bank-bank Islam dihitung berdasarkan daftar nilai nominalnya, ditambah keuntungannya yang halal.
14. Berdasarkan prinsip pencampuran, investasi-investasi harta yang telah disebutkan di atas digabungkan dengan kekayaan moneter lainnya pada akhir tahun, dan dizakati berdasarkan azas-azas yang telah dijelaskan dengan prosentase 2,5%, jika jumlah keseluruhannya mencapai nishab, yaitu seharga 85 gram emas murni.

Berikut contoh perhitungan Zakat investasi harta ;

Harta-harta yang wajib dizakati	Jumlah
Saham	Rp 70.000.000
Cek	Rp 100.000.000
Sertifikat investasi	Rp 50.000.000
Deposito	Rp 60.000.000
Tabungan	Rp 40.000.000
Jumlah Keseluruhan	Rp 320.000.000
Kewajiban yang harus dibayarkan: (hutang dan hak-hak orang lain)	Rp 100.000.000

Kadar nishab dari zakat investasi di atas adalah 85 gr emas. Seandainya harga emas per gram adalah Rp 700.000, maka nishabnya adalah Rp 59.500.000. Untuk menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah jumlah harta bersih yaitu; jumlah keseluruhan harta-kewajiban yang harus dibayarkan x 2.5 %. .Karena harta bersihnya (Rp 320.000.000-Rp 100.000.000 =Rp 220 000.000), maka dia wajib kena zakat karena sudah melebihi nishab yaitu Rp 59. 500.000, maka zakatnya adalah Rp 220.000.000 x2,5% = Rp 5.500.000

### **E. Menghitung Zakat Perdagangan**

Hukum-hukum umum yang mengatur penghitungan zakat perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Aktifitas perdagangan wajib dizakati, karena dia termasuk sumber penghasilan yang baik-baik. Dalilnya adalah firman Allah, sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267 Terjemahnya;” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik,”
2. Pokok-pokok yang tetap dalam perdagangan, seperti bangunan (toko), instalasi, peralatan, mobil, mesin hitung, dan lain-lain tidak wajib dizakati.
3. Seorang pedagang harus menentukan waktu tahunan yang khusus baginya untuk menghitung zakat, hal mana dia mendata dan menilai barang-barang dagangan yang dimilikinya, sebagaimana dia mendata dan menilai hutang-hutang yang jatuh tempo dan harus dia bayar dalam waktu dekat.
4. Bejana zakat adalah selisih antara nilai keseluruhan barang-barang yang wajib dizakati dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar.
5. Barang-barang dagangan dihitung berdasarkan harga pasar, yakni harga grosir, pada saat penghitungan zakat dilakukan. Piutang yang menjadi tanggungan orang lain dihitung apabila kondisinya baik dan diharapkan akan dibayar. Berbagai

bentuk investasi dihitung berdasarkan harga pasar. Dan uang yang ada di bank atau brangkas dihitung berdasarkan saldonya.

6. Jika bejana zakat mencapai nishab, yaitu seharga 85 gram emas, maka kadar zakat dihitung dengan prosentase 2,5% setiap tahun.
7. Jika terdapat persekutuan dagang, maka zakat dibagi atas orang-orang yang bersekutu berdasarkan porsi masing-masing dalam modal.

Berikut ini contoh praktis perhitungan zakat perdagangan :

Harta-harta yang wajib dizakati	Jumlah harta
Barang-barang dagangan	Rp 100.000.000
Hutang pelanggan yg pasti dibayarkan	Rp. 50.000.000
Nota penerimaan	Rp 10.000.000
Uang di bank	Rp 50.000.000
Jumlah keseluruhan	Rp 260.000.000
Kewajiban yang harus dibayarkan kepada orang lain;	
Hutang	Rp 20.000.000
Setoran kepada penyuplai	Rp 30.000.000
Hak-hak orang lain	Rp 20.000.000
Jumlah keseluruhan	Rp 70.000.000
Bejana zakat	Rp (260.000.000-Rp70.000.0000) =Rp 190.000.000

Kadar nishab adalah 85 gr, seandainya harga emas Rp 700.000, maka nishab zakat perdagangan adalah; Rp 59.500.000. Dengan demikian bejana zakat mencapai nishab dan harus dihitung zakatnya. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah; Rp  $190.000.000 \times 2.5\% = \text{Rp } 4.750.000$

## F. Menghitung Zakat Industri

Hukum-hukum umum yang mengatur penghitungan zakat industry adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas perindustrian wajib dizakati, karena dia termasuk sumber penghasilan yang halal dan baik, berdasarkan keumuman ayat-ayat tentang zakat.
2. Padanya diberlakukan hukum zakat barang-barang dagangan. Ini adalah pendapat yang kuat. Sementara sebagian fuqaha mengqiyaskan atau menyamakan dengan zakat hasil pertanian.
3. Pada setiap haul, pemilik pabrik harus mendata dan menghitung harta-hartanya yang wajib dizakati, dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan.
4. Bejana zakat adalah selisih antara nilai keseluruhan barang-barang yang wajib dizakati dan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar.
5. Jika bejana zakat mencapai nishab, yaitu seharga nilai 94 gram emas, maka kadar zakat dihitung dengan prosentase 2,5% setiap tahun.
6. Jika terdapat persekutuan industry, maka zakat dibagi atas orang-orang yang bersekutu berdasarkan porsi masing-masing modal.

Berikut ini contoh praktis penghitungan zakat industry :

Harta-harta yang wajib dizakati	Jumlah
Produk jadi	Rp 20.000.000
Produk setengah jadi	Rp 10.000.000
Bahan mentah	Rp 5000.000
Titipan pada orang lain	Rp 10.000.000
Uang di bank	Rp 30.000.000
Uang di brangkas	Rp 20.000.000
Jumlah keseluruhan	Rp Rp 85.000.000
Kewajiban yang harus	

dibayarkan kepada orang lain	
Tagihan bank	Rp 10.000.000
Hutang	Rp 5.000.000
Pembayaran listrik	Rp 3000.000
Jumlah keseluruhan	Rp 18.000.000
Bejana zakat	Rp. 85.000.000-Rp 18.000.000= Rp. 67.000.000

Kadar nishab adalah 85 gr emas, seandainya harga setiap gram emas adalah Rp 700.000, maka nishabnya adalah Rp 59.500.000. Dengan demikian bejana zakat mencapai nishab dan harus dihitung zakatnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah:  $\text{Rp } 67.000.000 \times 2,5\% = 1.675.000$

### G. Menghitung Zakat Properti

Aktivitas dalam bidang property terdiri dari :

1. Aktivitas pembangunan. Aktivitas ini wajib dizakati berdasarkan qiyas atas zakat barang-barang dagangan dan industry.
2. Aktivitas investasi dalam bidang property, wajib dizakati berdasarkan qiyas (anologi) atas zakat barang-barang dagangan.
3. Aktivitas penyewaan property. Aktivitas ini wajib dizakati berdasarkan qiyas atas barang-barang yang dieksploitasi.
4. Memiliki property dengan tujuan untuk investasi dan pertumbuhan, padanya diterapkan hukum-hukum zakat barang-barang dagangan.
5. Memiliki property dengan tujuan untuk ditempati tidak wajib dizakati.
6. Properti warisan yang sulit dijual atau dieksploitasi karena adanya beberapa permasalahan tidak wajib dizakati.
7. Tanah-tanah yang gersang, tidak dapat ditanami, tidak dapat dieksploitasi, dan sulit untuk dijual tidak wajib dizakati.



Berikut ini beberapa kondisi dan contoh praktis penghitungan zakat properti.

1. Zakat Perusahaan Investasi dalam Bidang Properti

Hukum-hukum umum yang mengatur perhitungan zakat perusahaan investasi dalam bidang property adalah sebagai berikut;

- a. Yang dimaksud dengan aktivitas investasi dalam bidang property adalah membeli tanah, bangunan, dan sejenisnya dengan maksud untuk dijual kembali, atau membeli tanah dengan maksud untuk mendirikan bangunan di atasnya bersama seorang kontraktor.
- b. Pada aktivitas ini diterapkan hukum-hukum zakat barang-barang dagangan dan industri.
- c. Bejana zakat adalah harta-harta yang wajib dizakati terdiri dari tanah, bangunan dan sejenisnya yang dipersiapkan untuk dijual, demikian juga piutang pada lain yang diharapkan akan dibayar, uang yang ada di bank, uang di barangkas, dikurangi kewajiban-kewajiban yang jatuh temponya dalam waktu dekat.
- d. Tanah, bangunan dan sejenisnya dihitung berdasarkan harga pasar ketika waktu pembayaran zakat tiba dan padanya berlaku hukum-hukum penghitungan barang-barang perdagangan yang telah dijelaskan di atas.
- e. Nishab zakat adalah 85 gram emas.
- f. Jika bejana zakat mencapai nishab, maka kadar zakat dihitung dengan prosentase 2,5% setiap tahun.
- g. Jika perusahaan adalah milik beberapa orang, maka zakat dibagi atas orang-orang yang bersekutu atau orang-orang yang memiliki saham berdasarkan porsi masing-masing dalam modal.

Berikut ini contoh praktis penghitungan zakat perusahaan investasi dalam bidang property :

Harta-harta yang wajib dizakati	Jumlah
Tanah untuk dijual	Rp 50.000.000

## Tata Cara Menghitung Zakat Mal dan Contoh-contohnya

Tanah untuk pembangunan	Rp 50.000.000
Bangunan untuk dijual	Rp 30.000.000
Perumahan yang siap ditempati	Rp 70.000.000
Proyek yang sedang diselesaikan (harga tanah dan bangunan)	Rp 100.000.000
Piutang	Rp 25.000.000
Nota penerimaan	Rp 15.000.000
Uang muka yang dibayarkan oleh konsumen	Rp 20.000.000
Uang di bank	Rp 60.000.000
Uang di brangkas	Rp 30.000.000
Jumlah keseluruhan	Rp 450.000.000
Kewajiban yang harus dibayarkan pada pihak lain, berupa;	
Cicilan di bank	Rp 50.000.000
Hutang	Rp 100.000.000
Jumlah keseluruhan	Rp 150.000.000
Bejana zakat= Rp 450.000.000- Rp 150.000.000.	Rp 300.000.000

Kadar nishab adalah 85 gram aka nishabnya adalah ( $85 \times \text{Rp } 700.000 = \text{Rp } 59.500.000$ ). Dengan demikian bejana zakat mencapai nishab, dan harus dihitung zakatnya. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah :  $\text{Rp } 300.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp } 7.500.000$  emas, seandainya harga setiap gram emas adalah Rp 700.000, m

### 2. Zakat Perdagangan Properti

Hukum-hukum umum yang mengatur penghitungan zakat perdagangan property adalah sebagai berikut:

- a. Pada aktivitas perdagangan property diberlakukan hukum-hukum zakat barang-barang dagangan, sebagaimana yang telah dijelaskan.
- b. Pada saat waktu penghitungan zakat tiba, property yang diperdagangkan dihitung berdasarkan harga pasarnya,

ditambah dengan piutang yang diharapkan akan dibayarkan dan uang yang ada di bank dan brangkas.

- c. Kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh pedagang pada akhir haul dihitung berdasarkan daftarnya.
- d. Bejana zakat dihitung dengan cara mengurangi harta-harta property yang wajib dizakati dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayar.
- e. Bejana zakat dibandingkan dengan nisab zakat, yaitu seharga 94 gram emas, jika bejana zakat mencapai nishab, maka zakat dihitung dengan prosentase 2,5% setiap tahun.
- f. Kadar zakat = bejana zakat x prosentase zakat.
- g. Daftar penghitungan zakat mengikuti contoh yang telah disebutkan di atas.

### 3. Contoh Property Yang Tidak Wajib Dizakati

Di antara contoh property yang kadang dimiliki oleh seorang muslim, tapi tidak wajib dizakati adalah sebagai berikut :

- a. Rumah yang digunakan untuk tempat tinggal tetap berdasarkan kebiasaan.
- b. Rumah yang digunakan untuk tempat tinggal pada musim panas.
- c. Rumah-rumah yang dipersiapkan untuk anak-anak di masa depan dan belum ditempati.
- d. Sebidang tanah yang di atasnya akan dibangun rumah tempat tinggal di masa yang akan datang.
- e. Sebidang tanah yang belum memiliki tujuan yang jelas pada masa sekarang. Bisa jadi dia akan jual atau di atasnya dibangun bangunan tempat tinggal.
- f. Sebidang tanah yang didapatkan dari warisan dan pemiliknya tidak dapat menjualnya dan menyewakan.
- g. Bangunan atas tanah yang dipersengketakan, sehingga sulit untuk dijual atau ditransaksikan pada masa sekarang.
- h. Property yang dibekukan atau digadaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Thabarah, Arif. *Ruh al-Din al Islami, Dar al-Ilmy al-Malayiin*, Cet. VII, Beirut, 1996.
- Abu Fida Ismail Ibnu katsir, Imam Imanuddin. *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, t. Th.
- Abu Sinn, Ahmad Abraham. *Manajemen Syari'ah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Ali Nashif, Mansur. *At Tajhul Jami' Lil Ushul Fi Haditsir Rasul*, Cet IV, Mesir, Cairo, al-Babi al-Halabi.
- al-Jauziyah, Ibn al-Qoyyim. *Zad al-Ma'ad*, Dar al-Fikr, Kuwait, 1995.
- al-Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*, Dar al-Fikr, Bairut, 1994.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al Hanafi. *Badaai'us Sanai Fii Tarbitis Syarai*, Mesir: al-Imam, t.th.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998.
- Al-Mujam al-Wasit Juz 1; Turki, Istambul, t.th.
- Al-Mujam al-Wasith, Juz II.
- Al-Nawawi. *al Majmu*, Jilid 5, Idharah al-Tibaah al-Munirah, t. Th.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, (Cet II: Beirut, Libanon : Muassasah al- Risalah, 1993). Diterjemahkan oleh Tim (Salman Harun, Didin Hafiuddin, Hasanuddin) dengan judul “ *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdsarkan Quran dan Hadis*, Juz I, Cet 3; Bogor, PT : Pustaka Lentera Anter Nusa, 1996.

- ..... *Fiqhus Zakat*, Jlid II, Beirut: Darul Irsyad, t.th.
- ..... *Musykilah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*, Cet II, Maktabah Wahbah, Mesir, 1975.
- al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. *al-Zakah wa Tathbigatuha al Muashirah Dar al-Wathan*, Cet II, Riyadh, 1414 H.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyah Addillatuh*, Jilid III, t.th.
- ..... *Zakat, Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- ..... *al-Tafsir al-Munir*, Dar al-Fikr, Damasqus, Jilid II.
- an-Nawawi, Abdul Khaliq. *an-Nizam al-Malifil Islam*, Mesir : Al-Matba'ah al-Fanniyah al-hadis, 1971.
- Ash-Shiddiqy, T.M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997.
- asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Mesir :, tt.tp.
- Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank-Indonesia, 2016.
- Depag, UU RI No 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Kep Menteri Agama RI No 581 tahu 1999 Tentang pelaksanaan UU No 38 tahun 1999.
- Depag, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005.
- Departemen Agama, *UU No 3 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat Seri 8, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam*, Zakat dan Wakaf, Jakarta, 1997.
- Didin Hafidhuddin dan Henri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.

- Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat*, UIN Malang, Press, Cet I, 2008.
- Hadi Permono, Syehul. *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- ..... *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen*, EPFE, Yogyakarta, cet XIV, 1999.
- ..... *Manajemen*, Edisi kedua, EPFE, Yogyakarta, Cet XIV, 1999.
- Hasahuddin AF, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*.
- Ibnu Taimiyah, Syekh al-Islam. *Majmu al-Fatawa*, Jilid 5, Dar Al-fikr, 1983.
- Indonesia Magnificence of Zakat, Indonesia Zakat & Development Report 2012: Soal Kebijakan dan Hal Lain Yang Belum Paripurna, IMZ, Jakarta, 2012.
- Indonesia Magnificence Of Zakat, *Indonesia Zakat & Development Report 2009 Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Ummat*, IMZ, Jakarta, 2009.
- Kahf, Monzer. *Zakah Management in Some Muslim Societies*, Background Paper No.11, IRTI-IDB, 1993.
- Kuntarno Noor Aflah dan Mohd Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Penerbit FOZ, 2016.
- Majalah BAZNAS edisi April. Badan Amil Zakat Nasional: Jakarta, 2014.
- Mannan, M. A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Muhammad Amin, Ibnu Abidin. *Raddul-Mukhtar alaad-Duril-Mukhtar*, Mesir, Al-Amirah, 1307 H.

## Daftar Pustaka

- Nana Mintarta dkk, Indonesia & Development Report 2012, Jakarta: Indonesia Magnifinence Of Zakat, 2012.
- Parwaatmadja, Karnaen. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Usaha Kami, t. th.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial )* Cet I, PT: Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1998.
- Qutub, Muh. *Qabasatun Minar Rasuli*, Cet II, Mesir :Maktabah Wahbah, 1962.
- Raharjo, Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir Quranul Karim*, Cet 1, Mesir :Al-manar, 1353 H.
- Ridho, Taufik. *Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*, dalam Kuntarno Noor Aflah dan Moh Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, jilid I, Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, Jilid I, Beirut; Dar al-fikr, 1977.
- ..... *Fiqhuz Zakah*, Jilid 1, Kuwait: Darul Bahrn, 1388 H.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, UIN Press, malang, 2007.
- Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Syahatah, Husein. *Kaifa Tashibu Zakata Malika*, Cet I, Kalam Pustaka: Jakarta, 2005.
- ..... *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Terj H. Dudung RH, Idhoh Anas, Gema Insani Press, Jakarta, 2004.
- Syaltut, Mahmud. *Al-fatawa*, Kairo: Darul Qalam, 1996.
- Wahbah, Muhammad Zaid Dkk, *Dirasat Muqaranat Fi Zakat al-Mal*, Cet I, 1984, Tihama; Jeddah.

## **RIWAYAT PENULIS**

Nama : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M.Ag  
NIP : 197607012002 12 2001  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala (IV/a)  
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 1-Juli-1976  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN Alauddin Makassar

Riwayat Sekolah: SD Inpres Prumnas Makassar Tamat Tahun 1988, MTsN Makassar, Tamat tahun 1991, MAN 2 Makassar Tamat Tahun 1994, S1 selesai tahun 1999, S2 selesai tahun 2001 Jurusan Ekonomi Islam di Universitas Muslim Indonesia dan S3 selesai tahun 2016, Program Studi Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar.

Riwayat Pekerjaan: Sejak tahun 2002, bertugas sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) dan tahun 2008 sampai tahun 2012 menjadi sekertaris jurusan Ekonomi Islam. Tahun 2013-2019 sebagai ketua jurusan Ekonomi Islam dan pada tahun 2020-2024 sebagai Wakil Dekan II pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.





## **LAMPIRAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011  
TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
Dan  
PRESIDEN

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

1. syariat Islam;
2. amanah;
3. kemanfaatan;
4. keadilan;
5. kepastian hukum;
6. terintegrasi; dan
7. akuntabilitas.

## Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;

- d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

**BAB II**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 5**

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

**Pasal 6**

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

## Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

### Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Pasal 10

1. Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
2. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

### Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pember-hentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

### Pasal 16



- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Lembaga Amil Zakat  
Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistri-busian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;<sup>115</sup>
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

---

<sup>115</sup> Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 huruf a dan huruf b “*terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*”;

- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;<sup>116</sup>
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

#### Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>116</sup> Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 huruf d "*pengawas syariat, baik internal, atau eksternal*";

### BAB III

#### PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Pengumpulan Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

##### Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak

##### Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

##### Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

##### Bagian Kedua Pendistribusian Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

## Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

## Bagian Ketiga Pendayagunaan

### Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Keempat

### Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

### Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

## Bagian Kelima

### Pelaporan

#### Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/ kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.

- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

#### Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 35**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 36**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

### Pasal 38

Setiap orang<sup>117</sup> dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 40

Setiap orang<sup>118</sup> yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

---

<sup>117</sup> Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 “*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*”;

<sup>118</sup> MK Nomor 86/PUU-X/2012 “*mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang*”;



dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 -(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah adasebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2011  
**MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA,**  
ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2011 NOMOR 115**

PENJELASAN ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23  
TAHUN 2011  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggungan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## II. PASAL DEMI

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Huruf a cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “amah” adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pesdistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitul mal*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

## Pasal 27

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif" adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

### Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 28

Cukup jelas.

## Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52**



